

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA

(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ABDULLAH FAHMI
125030105111003



Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
2. Dr. Abdullah Said, M.Si

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016

MOTTO

“Berbagilah ilmu yang shahih. Sesungguhnya kau telah mencoba berinvestasi dengan kehidupan akhirat”

(Muhamad Alhabsyi, 2012)

“Individu terbaik bukan hanya diukur dari harta, tahta, prestasi, dan ilmunya. Individu terbaik diukur oleh sejauhmana individu tersebut dapat membagi apa yang dimilikinya dan berguna bagi sekitarnya”

(Abdullah Fahmi, 2016)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

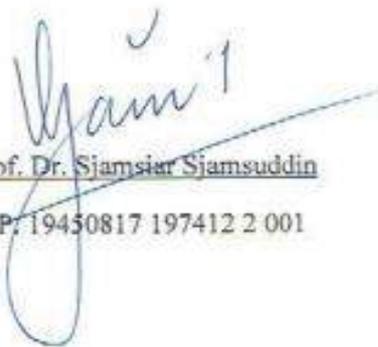
Judul : Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna
 Susila (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna
 Susila Kediri)
 Disusun oleh : Abdullah fahmi
 NIM : 125030105111003
 Fakultas : Ilmu Administrasi
 Jurusan : Administrasi Publik
 Konsentrasi : -

Malang, 03 Agustus 2016

Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
 NIP. 19450817 197412 2 001


Dr. Abdullah Said, M.Si
 NIP. 19570911 198503 1 008



TANDA PENGESAHAN

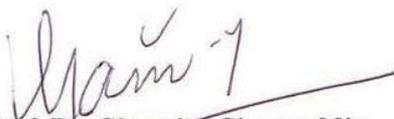
Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji pada Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB di ruangan ujian skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Judul : Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi pada Unit Pelaksana teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)

Disusun oleh : Abdullah Fahmi
 NIM : 125030105111003
 Fakultas : Ilmu Administrasi
 Jurusan : Administrasi Publik
 Prodi : Ilmu Administrasi Publik
 Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
 NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota,


Dr. Siti Rohmah, M.Si
 NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota,


Dr. Abdullah Said, M.Si
 NIP. 19570911 198503 1 008

Anggota,


Andy Kurniawan, S.AP., M.AP
 NIP. 2011078603201001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar sarjana akademik yang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003), (Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 02 Agustus 2016



Abdullah Fahmi

NIM. 125030105111003

RINGKASAN

Abdullah Fahmi, 2016, **IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)** Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Abdullah Said, M.Si

Menurut Undang-Undang (UU) nomor 11 Tahun 2009 pada bab 1 pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan yang terjadi di Jawa Timur merupakan permasalahan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Sebagai Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di pulau Jawa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencoba meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Jatim dengan berbagai kebijakan dan program yang ada di daerah. Terbukti dengan adanya data dari dinas sosial Provinsi Jatim yang menjelaskan bahwa angka penyandang permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami penurunan. Salah satu permasalahan kesejahteraan di Jatim yang mendapatkan sorotan oleh Pemprov Jatim ialah kemunculan wanita tuna susila (WTS) atau wanita penjual diri. Istilah nama WTS mengalami berbagai pergantian. Dahulu wanita yang menjual dirinya disebut dengan sebutan pelacur. Seiring berjalannya waktu Pemerintah mengganti sebutan pelacur dengan sebutan wanita tuna susila (WTS).

Kemunculan WTS di Provinsi Jatim termasuk dalam salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Jatim. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim bergerak cepat dengan mendeklarasikan kebijakan Provinsi Jatim bebas lokalisasi pada tahun 2015. Kebijakan tersebut membuat lokalisasi ditutup, dan WTS beralih tempat dengan membuka praktek ke panti pijat dan warung remang-remang. Hal itu membuat Pemprov Jatim mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Peraturan tersebut menjelaskan tata kerja UPT dibawah naungan dinas sosial Provinsi Jatim. Satu diantaranya ialah mengatur UPT yang memberikan rehabilitasi pada WTS. UPT yang memberikan fasilitas rehabilitasi pada WTS ialah UPT rehabilitasi sosial tuna susila (RSTS) Kediri. Dalam UPT RSTS tersebut memiliki program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila (Sumber: Powerpoint draft rancangan rencana strategis dinas sosial Provinsi Jatim tahun 2014-2019).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hanya dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dan (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif, dengan melalui proses data *collection*, data *condensation*, data *display*, dan *conclusion*.

Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dalam pelaksanaannya memiliki delapan proses kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Delapan kegiatan tersebut ialah pendekatan awal dan penerimaan klien, *assesment*, bimbingan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, evaluasi, dan pengakhiran. Sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila ialah wanita tuna susila (WTS) hasil razia dinas sosial kota dan kabupaten di daerah masing-masing. Partisipasi instruktur dan klien dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS dinilai tinggi. Hal itu didukung oleh dokumen absensi kehadiran klien dan *instruktur* yang penuh pada bulan Mei. Tujuan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri ialah mengembalikan nilai sosial dan rasa percaya diri klien sehingga mampu bertanggung jawab atas dirinya dan keluarga. Manfaat yang diperoleh klien dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila terbagi menjadi tiga manfaat. Manfaat jangka pendek berupa penyaluran yang masih belum *effektive*. Manfaat jangka menengah klien mampu membuka usaha dengan modal yang telah dimiliki berupa alat dan ketrampilan yang mumpuni. Manfaat jangka panjang yaitu klien mampu diterima kembali oleh masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Pendukung dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri ialah peran DINSOS seluruh Jawa Timur, Keuangan program pelayanan dan rehabilitasi yang tidak pernah terlambat, Fasilitas yang memadai, dan sumber daya manusia yang handal. Sedangkan penghambat dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri terdiri dari tiga penghambat yaitu rendahnya pendidikan klien, penyakit yang diderita klien, klien merindukan keluarganya.

Kata Kunci: Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, Wanita Tuna Susila

SUMMARY

Abdullah Fahmi, 2016, **THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION AND CARE PROGRAM FOR PROSTITUTES (Study on Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)** Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Dr. Abdullah Said, M.Si

According to the Law No. 11 of 2009 chapter 1, article 1, clause 1, it is explained that Social Welfare is a condition in which the material, spiritual and social needs of the citizens are met so that they can have decent lives and are able to develop themselves in order to perform their social functions. One of the issues that is happening in East Java is the unbalanced distribution of society welfare. As a province with the second highest population in the island of Java, the Provincial Government of East Java is trying to improve the society welfare in East Java by creating various policies and program that are implemented in regional level. This effort is proven by the data gathered from the social services of East Java province which show that the number of people with social welfare problems (Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial/PMKS) has declined. One of the welfare issues in East Java that is being highlighted by the Provincial Government of East Java is the presence of female prostitutes or sex workers (Wanita Tuna Susila/WTS). The term WTS itself has been changing through time. In the past, a woman who offers sex for money used to be called hooker. As time goes by, the government replaced it with female prostitute (WTS).

The presence of WTS in the province of East Java is considered as one of the deviations that occurs within the society of East Java. Realizing this situation, the Provincial Government of East Java takes the immediate action by declaring the free-prostitution complex policy in East Java province on 2015. This policy leads to the closing of prostitution complexes, and the prostitutes move their practices to hidden places disguised as massage parlors or small coffee shops. This situation makes the Provincial Government of East Java refers to the Governor Regulations No. 119 of 2008 regarding The Organization and Working Procedures of Technical Implementation Unit (Unit Pelaksana Teknis/UPT) of the Social Services of East Java Province. The regulation describes the working procedures of UPT under the supervision of the social services of East Java province. One of the procedures is to manage the UPT that will facilitate the rehabilitation for WTS. The UPT that provides rehabilitation facility for WTS is the UPT of social rehabilitation for prostitutes (Rehabilitasi Sosial Tuna Susila/RSTS) in Kediri. This UPT of RSTS has their own social rehabilitation and care program for prostitutes (Source: A Powerpoint file containing the draft of the strategical plans of East Java social services on 2014-2019).

This study is using a qualitative method and is limited to two research focuses, which are (1) The implementation of social rehabilitation and care program for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri and (2) The supporting and restrictive factors of the implementation of social rehabilitation and care program

for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri. The data source of this study are primary and secondary data. This study uses descriptive data analysis as the data analysis method, by going through the steps consisting of data collection, data condensation, data display and conclusion.

In the implementation, social rehabilitation and care program for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri consist of eight activities. Those activities include initial approachment and client acceptance, assessment, counseling, resocialization, deployment, advanced counseling, evaluation, and conclusion. The target of this social rehabilitation and care program for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri is the female prostitutes who get caught during raid conducted by the municipal or county social service officers within their respective region. The participation of instructors and clients in this social rehabilitation and care program for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri is considered to be very good. It is supported by the documents that record the full attendance of clients and instructors in May. The objective of this social rehabilitation and care program for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri is to restore the clients' social value and confidence so that they can be responsible of themselves and their families. The benefits for the clients from this social rehabilitation and care program for prostitutes are divided into three areas. The short-term benefit is the deployment that is not effective yet. The mid-term benefit is enabling the clients to start a business with the existing capital in the form of tools and sufficient skills. The long-term benefit is the acceptance from the society.

On the other hand, the factors affecting the results are divided into supporting factors and restrictive factors. The supporting factors in this social rehabilitation and care program for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri are the participation of social services across all regions in East Java, the financing of the rehabilitation and care program that is always on time, sufficient facility, and skilled human resources. While the restrictive factors in this social rehabilitation and care program for prostitutes in the UPT of RSTS Kediri consist of three obstacles, which are the poor educational background of the clients, the diseases suffered by the clients, and the situation where the clients are missing their families.

Keywords: The Implementation of Social Rehabilitation and Care Program for Prostitutes, Female Prostitutes

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar dan menyempatkan waktu disela-sela kesibukan

- untuk memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Orang tua tercinta, Bapak Muhamad Alhabsyi (Alm) dan Ibu Mu'rifah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi serta memanjatkan doa yang tiada henti dalam suka dan duka untuk kesuksesan anaknya.
 6. Kedua saudariku, Khadijah Alhabsyi dan Habsyiyah yang tiada henti memberikan motivasi dalam setiap langkah peneliti.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan serta Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
 8. Sahabat seperjuangan yang tak hentinya memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, Fajar Adam, Indah Setyowati, Enny Eka, Isa Zakaria, Hidayathul, Afin Kurnia, Yessa Putri, Rahma Prima, Velli Ardika, Denny Ariyanti, Pancarani Deasy, Amalia Wanda, Niki Joko.
 9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) yang telah menjadikan peneliti sebagai manusia yang terus berkembang dalam bidang akademik maupun organisasi.
 10. Saudara dan saudari jurusan administrasi publik 2012 yang selalu memberikan inspirasi bagi penulis.
 11. Sahabat perantauan di Malang, Ridho Asarday, Fakhry Rasyidi, Ridho Ardiansyah, Setyo Pambudi, Syaukani Ichsan, Wahyu Satrio, Mirza Mento

yang tidak pernah bosan memberikan motivasi, lelucon, dan menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

12. Anggiyaza Adha yang tidak pernah berhenti dalam memberikan dukungan serta nasihat ketika penulis berada pada titik jenuh.
13. Seluruh Pimpinan UPT RSTS Kediri, Ibu Tinny, MM, Bapak Sutarminto, SIP, Ibu Rinny W. Antarlina, SH, M.Si, Bapak Drs. Abad Yanu yang telah memberikan izin untuk meneliti di UPT RSTS Kediri.
14. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis menagharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, itu semata-mata datang dari penulis dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 02 Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	13
B. Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2. Proses Kebijakan Publik	16
3. Pengertian Implementasi.....	18
4. Model Implementasi Kebijakan	19
a. Implementasi kebijakan Model Donald Van metter dan Carl Van Horn	19
b. Implementasi Kebijakan Publik Model Brian W. Hoogwood Dan Lewis A. Gunn	20
c. Implementasi Kebijakan Publik Model Merile S. Grindle.....	22
d. Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward	23
5. Kebijakan Sebagai Program.....	27



C. Pelayanan dan Rehabilitasi	30
1. Pelayanan	30
2. Pengertian Rehabilitasi.....	31
3. Kegagalan dalam Program Rehabilitasi.....	32
4. Tujuan Rehabilitasi	33
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPTRSTS Kediri	34
D. Wanita Tuna Susila	36
1. Definisi Wanita Tuna Susila	36
2. Sejarah dan Konsep Pelacuran di Indonesia	38
3. Jenis Pekerja Seks	39
4. Faktor Munculnya Wanita Tuna Susila.....	43
5. Dampak Timbulnya Wanita Tuna Susila.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Analisis Data	56
H. Keabsahan Data.....	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri	62
B. Gambaran Umum UPT RSTS Kediri.....	79
C. Penyajian Data.....	75
1. Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialTuna Susila	75
a. Proses Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	75
b. Sasaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial TunaSusila	87
c. Partisipasi Instruktur dan WTS dalam Program Pelayanandan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila.....	91
d. Tujuan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	100
e. Manfaat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	103
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi ProgramPelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	108
a. Faktor Pendukung.....	108
b. Faktor Penghambat.....	116



D. Pembahasan dan Analisis Data.....	122
1. Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialTuna Susila	122
a. Proses Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	122
b. Sasaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	127
c. Partisipasi Instruktur dan WTS dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	130
d. Tujuan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	132
e. Manfaat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	135
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila	137
a. Faktor Pendukung.....	137
b. Faktor Penghambat.....	141
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	149

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Penurunan angka Kemiskinan & PMKS di Jatim Tahun 2010-2013.....	2
2	Jumlah Lokalisasi di Indonesia dalam Provinsi Tahun 2012.....	4
3	Jenis Pekerja Seks	40
4	Jadwal Piket Angkatan II Tahun 2016 UPT RSTS Kediri.....	78
5	Nama Kelompok Piket Angkatan II Tahun 2016 UPT RSTS Kediri	79
6	Materi Resosialisasi didalam Kelas.....	79
7	Pembagian Bapak dan Ibu Asuh Klien Angkatan II Tahun 2016 UPT RSTS Kediri.....	81
8	Nama Instruktur dan Materi yang diberikan	92
9	Materi Instruktur Tata Boga Bulan Kedua.....	98
10	Materi Instruktur Tata Busana Bulan Kedua.....	99



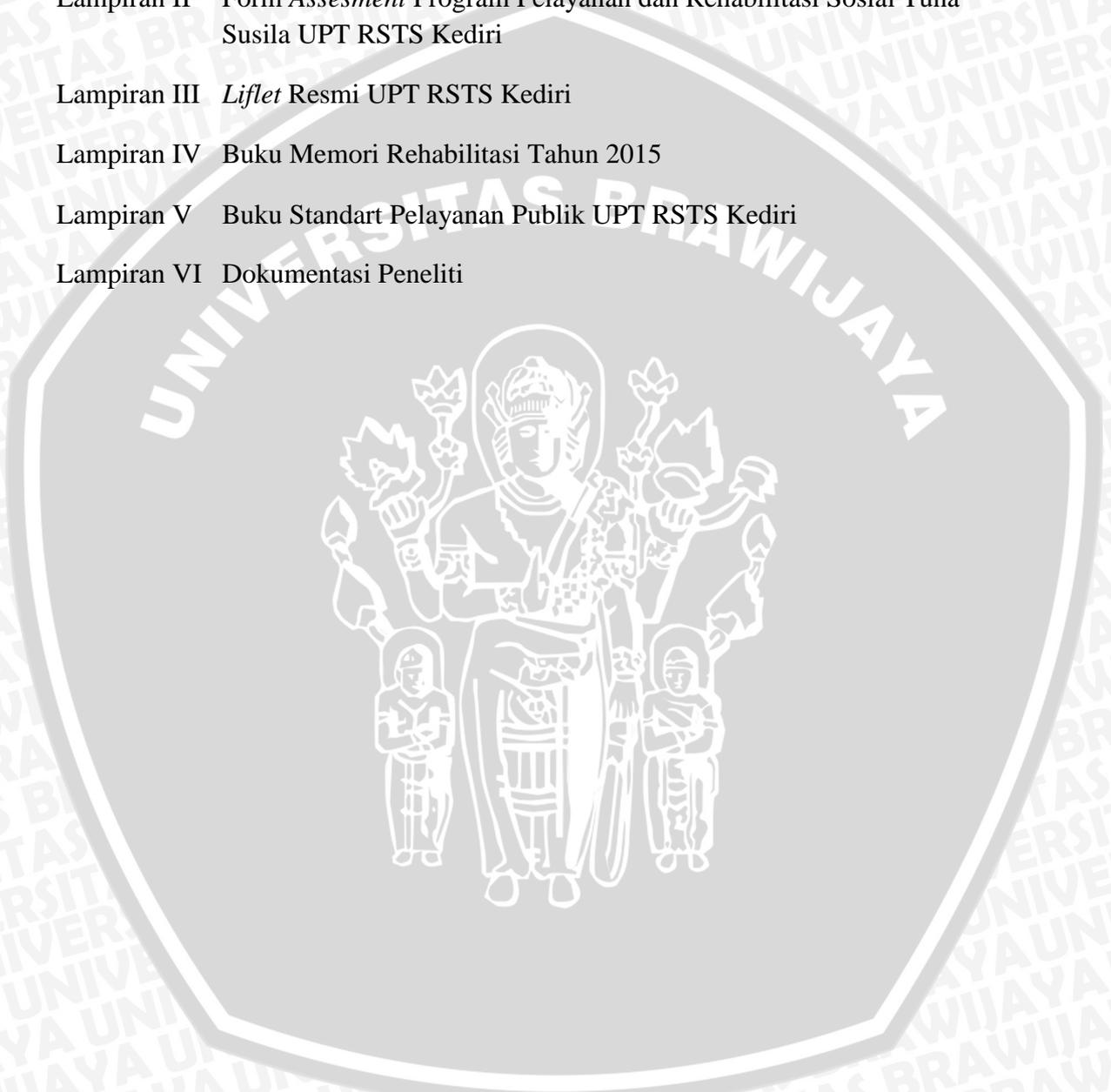
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Tahapan dalam Proses Kebijakan Publik.....	17
2.	Basic Logic Model.....	29
3.	Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	57
4.	Gambar Kota Kediri.....	62
5.	Gambar Lambang Kota Kediri.....	65
6.	Gambar Struktur UPT RSTS Kediri.....	73
7.	Gambar Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri.....	76
8.	Sasaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.....	90
9.	Absensi Klien Bimbingan Tata Boga Angkatan Kedua Bulan Mei 2016 UPT RSTS Kediri.....	96
10.	Absesnsi Instruktur Bimbingan Tata Boga Angkatan kedua Bulan Mei 2016 UPT RSTS kediri.....	97
11.	Buku Serah Tewrima Klien dan Home Visit, Pembinaan Lanjut Klien UPT RSTS Kediri.....	108



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Izin Penelitian UPT RSTS Kediri
- Lampiran II Form *Assesment* Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila UPT RSTS Kediri
- Lampiran III *Liflet* Resmi UPT RSTS Kediri
- Lampiran IV Buku Memori Rehabilitasi Tahun 2015
- Lampiran V Buku Standart Pelayanan Publik UPT RSTS Kediri
- Lampiran VI Dokumentasi Peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jawa Timur (Jatim) merupakan Provinsi yang memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota yang tersebar di 49.922 km²(Sumber: Wikipedia kota Kediri). Luas wilayah yang besar dengan cakupan yang luas membuat Pemerintah Provinsi Jatim memiliki banyak permasalahan daerah. Permasalahan tersebut terkait kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jatim. Menurut Undang-Undang (UU) nomor 11 Tahun 2009 pada bab 1 pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya menurut kamus W.J.S Poerwadarminta dalam Suryono (2014:99), sejahtera diartikan sebagai keadaan “aman, sentosa, dan makmur”. Arti kesejahteraan tersebut meliputi kemanan, keselamatan dan kemakmuran dari masyarakat. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkait dengan sektor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang berpotensi untuk menjadi orang miskin). Penjelasan UU dan teori diatas menjadi pedoman bahwa kesejahteraan sosial belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Jatim.

Sebagai Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Jawa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mencoba meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang ada di Jatim dengan berbagai kebijakan dan program yang ada di daerah. Terbukti dengan adanya data berikut yang menjelaskan bahwa angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) bertahap mengalami penurunan.

Tabel 1. Indeks Penurunan Angka Kemiskinan dan PMKS di Jatim Tahun 2010-2013

Tahun	PMKS	Kemiskinan
2009	1.487.079	5.835.825
2010	1.474.962	5.816.120
2011	1.469.207	5.227.312
2012	1.219.675	4.960.540
2013	1.219.675	4.771.540

(Sumber: Powerpoint Evaluasi Kinerja Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tahun 2010-2013)

Tabel diatas membuktikan bahwasanya penurunan Jumlah PMKS yang ada di Jatim dan diikuti oleh jumlah kemiskinan yang setiap tahunnya ikut menurun. Hal itu menjadikan bukti bahwa Pemprov Jatim berupaya keras untuk mengurangi jumlah PMKS dan menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jatim. Keberhasilan Pemprov Jatim dalam menurunkan angka kemiskinan dan angka PMKS ialah dengan program-program yang berusaha menuntaskan masalah tersebut.

Salah satu permasalahan kesejahteraan di Provinsi Jatim yang mendapatkan sorotan oleh Pemprov Jatim ialah kemunculan wanita tuna susila (WTS) atau wanita penjual diri. Istilah nama WTS mengalami berbagai pergantian. Dahulu wanita yang menjual dirinya disebut dengan sebutan pelacur. Seiring berjalanya waktu Pemerintah mengganti sebutan pelacur dengan sebutan WTS. Sebutan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Selanjutnya sebutan WTS dianggap tidak sesuai oleh masyarakat dikarenakan tidak semua yang menjual

dirinya tidak memiliki norma susila. Maka masyarakat mengganti sebutan WTS dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Pergantian nama tersebut tidak berdampak pada Pemerintah yang masih menggunakan sebutan WTS dikarenakan lebih etis dan tidak menyinggung perasaan wanita. Hal itu dibuktikan dengan hasil wawancara AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (UPT RSTS) Kediri yang berpendapat, “WTS dan PSK itu sama. Hanya istilah penyebutan saja. Mereka juga sama-sama masuk kedalam Tuna Sosial” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Selanjutnya Kartono memberikan penjelasan terkait PSK atau WTS dalam bukunya Patologi Sosial (2011:216) yang menjelaskan, WTS merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Definisi tersebut sejalan dengan Koentjoro, (2004:36) yang menjelaskan bahwa PSK merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan seks dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Pendapat diatas semakin memperkuat bahwasanya WTS merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan wanita dengan bermodalkan dirinya untuk mendapatkan imbalan dan kepuasan seks.

Keberadaan WTS merupakan seperangkat bagian kerja dengan germo, mucikari, lokalisasi dalam porstitusi. Menurut Kartono (2011:208), Masalah prostitusi bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia. Prostitusi itu sendiri

merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara umur kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Ingleson dalam Koentjoro, (2004:61-62) Meningkatnya permintaan akan pelayanan seks, yaitu PSK pada abad ke-19. Selanjutnya Perkins dan Bannet dalam Koentjoro (2004:30), menjelaskan pelacuran atau prostitusi merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.

Kemunculan WTS di Jatim dipicu oleh permasalahan ekonomi dan adanya lokalisasi yang siap menampung keberadaan WTS. Terkait permasalahan ekonomi, hal itu didukung oleh hasil wawancara STI(P,36th) sebagai eks WTS di Jatim yang berpendapat “Faktor ekonomi mas, awalnya saya butuh uang buat biayain keluarga” (Wawancara 19 Mei 2016 10.00 WIB UPT RSTS Kediri). Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa faktor ekonomi merupakan masalah awal seseorang untuk merelakan dirinya bekerja sebagai WTS. Selanjutnya mengenai keberadaan lokalisasi di Jatim yang siap menampung WTS dibuktikan dengan tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah lokalisasi di Indonesia dalam Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	Jumlah Lokalisasi	Jumlah lokalisasi ditutup
1	Nias	1	0
2	Riau	9	0
3	Jambi	2	0
4	Kep. Riau	10	0
5	Kep. Bangka Belitung	10	0

6	Kalimantan Timur	32	0
7	Kalimantan Tengah	12	0
8	Sulawesi Utara	5	0
9	Papua	2	0
10	Lampung	3	0
11	Bengkulu	1	0
12	Sumatera Selatan	1	1
13	Jawa Tengah	3	0
14	Jawa Barat	13	2
15	Banten	5	0
16	Bali	3	0
17	Jawa Timur	53	20
Jumlah		165	23

Sumber: (DATA KEMENSOS 2012 / Detik.news.com)

Tabel diatas menjelaskan perbandingan jumlah lokalisasi di setiap Provinsi di Indonesia. Jumlah lokalisasi di Jatim mencapai 53 lokalisasi. Hal tersebut yang menjadikan bukti bahwa keberadaan WTS di Jatim didukung oleh keberadaan lokalisasi yang memiliki peringkat tertinggi di Jatim. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah berhasil menutup lokalisasi sejumlah 20 lokalisasi. Hal itu tidak berpengaruh pada jumlah lokalisasi di Jawa Timur yang masih menduduki peringkat pertama terbanyak di Indonesia diatas Kalimantan Timur.

Kemunculan WTS di Provinsi Jatim termasuk dalam salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Kartono (2011:1), terjadinya penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan. Jika

penyimpangan yang dilakukan masyarakat dianggap biasa, penyimpangan-penyimpangan tersebut akan menjadi biasa dan tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Pernyataan diatas memberikan penjelasan bahwa adanya WTS merupakan sebuah penyimpangan. Jika masyarakat Provinsi Jatim menganggap keberadaan WTS sebagai hal yang wajar dan biasa, maka akan muncul regenerasi WTS.

Menanggapi permasalahan WTS yang ada di Jatim, Pemerintah Provinsi Jatim bergerak cepat dalam menanganannya. Terbukti dengan adanya kebijakan Gubernur Jatim mendeklarasikan Provinsi Jatim bebas lokalisasi pada tahun 2015 (sumber: liputan6.com). Implementasi Provinsi Jatim bebas lokalisasi baru terealisasi pada bulan Juni 2016, dengan penutupan lokalisasi Balong Cangkring yang berada di wilayah Mojokerto (sumber: regionalkompas.com). Gubernur Jatim berpendapat pada regionalkompas.com bahwa “Lokalisasi Balong Cangkring merupakan lokalisasi ke 47 yang ditutup oleh Pemerintah Daerah.” Kebijakan tersebut dirasa sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan pertumbuhan WTS di Jatim. Pada kenyataannya, setelah lokalisasi ditutup WTS berpindah tempat untuk meraih keuntungan dengan bekerja tetap sebagai WTS.

Perpindahan WTS tersebut semakin menyebar luas kedaerah-daerah dengan bertempat di warung remang-remang dan panti pijat. Keadaan tersebut membuat masyarakat khawatir akan penyebaran virus HIV/AIDS yang semakin menyebar. Saat WTS bertempat di lokalisasi, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pemeriksaan rutin terkait kesehatan WTS. Pasca penutupan lokalisasi, WTS tetap membuka praktek dengan menjajakan dirinya kepada masyarakat tanpa adanya

pemeriksaan kesehatan secara rutin yang membuat masyarakat khawatir akan virus HIV/AIDS. WTS juga dianggap tidak memiliki *skill* atau keahlian dalam bekerja dibidang yang lain. Masyarakat beranggapan, adanya penutupan lokalisasi di Jatim hanya sebagai kebijakan penutupan rumah dari WTS. Kenyataanya permasalahan WTS masih berlanjut di Provinsi Jatim, meski Provinsi Jatim sudah tidak memiliki lokalisasi.

Melihat kondisi diatas, Pemprov Jatim mengacu pada Peraturan Gubernur Jatim Nomor 199 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan tentang tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) dibawah naungan dinas sosial Provinsi Jawa Timur (dinsos Jatim). UPT dibawah naungan dinsos Jatim yang bertugas menaungi pelayanan dalam rehabilitasi sosial tuna susila ialah UPT rehabilitasi sosial tuna susila (RSTS) Kediri. Permasalahan WTS tersebut dapat diserahkan kepada UPT RSTS untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.

UPT RSTS memiliki program khusus untuk menaungi WTS. Program tersebut ialah program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila (Sumber: Powerpoint draft rancangan rencana strategis dinas sosial provinsi jawa timur tahun 2014-2019). Program yang termasuk dalam rencana kerja dinas sosial (DINSOS) Jatim tahun 2016 merupakan program yang bertugas menaungi permasalahan tuna susila untuk beralih profesi menjadi wanita yang lebih memiliki nilai dalam masyarakat dengan cara memberikan bimbingan WTS. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila menaungi segala WTS yang

berada di Jawa Timur. Hal ini menjadikan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila sebagai program pemecah masalah dalam mengurangi jumlah WTS di Jawa Timur. Bukan hanya menutup lokalisasi sebagai rumah dari WTS, tetapi memberikan dampak yang bagus untuk kelangsungan hidup WTS kedepannya.

UPT RSTS Kediri memiliki empat aspek dalam menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila bagi WTS yang berada di UPT RSTS Kediri. Empat aspek tersebut ialah bimbingan keterampilan, bimbingan sosial, bimbingan mental, dan bimbingan fisik. WTS yang menerima program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila tersebut diharuskan mengikuti bimbingan fisik, mental, dan bimbingan sosial. Selanjutnya untuk bimbingan keterampilan, WTS diharuskan memilih satu bimbingan ketrampilan yang bersifat wajib bimbingan. RWA(P,52th) selaku Kepala Sie Pelayanan UPT RSTS berpendapat,

“Program pelayanan dan rehabilitasi sosial tersebut berjalan selama 4 bulan. Selama berjalanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial tersebut WTS harus berada di dalam asrama dan tidak diperkenankan meninggalkan asrama dengan alasan apapun. Jadi kalau sudah masuk ke UPT RSTS, alasan apa saja gak bisa buat mereka pulang atau keluar dari UPT RSTS ini” (wawancara pada 17 Juni 2016 09.00 UPT RSTS Kediri).

Artinya selama program pelayanan dan rehabilitasi sosial berlangsung WTS dituntut untuk tetap tinggal dan mengikuti seluruh kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial hingga selesai yang berlangsung selama 4 bulan.

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan WTS di Provinsi Jatim merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan. Keberadaan WTS di Provinsi Jatim yang selalu ada dan tidak dapat berhenti secara langsung

menjadikan bukti bahwa permasalahan WTS masih ada. Keberadaan UPT RSTS menjawab masalah tersebut dengan mengimplementasikan program pelayanan dan rehabilitasi sosial di Provinsi Jatim. Adanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial tersebut bertujuan untuk menghentikan jumlah pertumbuhan WTS serta merubah profesi WTS menjadi profesi yang lebih baik lagi dengan berbagai keterampilan yang telah disiapkan oleh UPT RSTS. Maka dari itu, peneliti berminat untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh UPT RSTS, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai :

1. Pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis :

1. Kontribusi Teoritis :
 - a. Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan pengembangan ilmu administrasi publik
 - b. Diharapkan dengan penelitian ini akan menjadi wacana keilmuan kebijakan publik khususnya pada implementasi program program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila
2. Kontribusi Praktis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila.

- c. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para pelaku (stakeholder) yang terlibat pada program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila (studi pada UPT RSTS kediri). Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

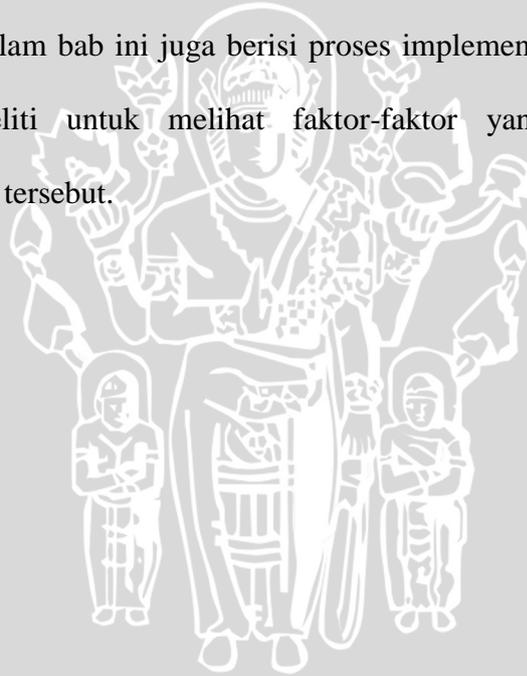
Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian dilakukan, sesuai dengan fokus penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dipaparkan dan analisa teoritik oleh peneliti: kemudian, dalam bab ini juga berisi proses implementasi program yang dihimpun oleh peneliti untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *public administration* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Menurut Henry yang dikutip oleh Sjamsuddin (2006:113) *public administration* diartikan sebagai suatu yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sedangkan tokoh lain menyatakan bahwa *public administration* yaitu kegiatan dari sekelompok dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama (Simon dalam Sjamsuddin, 2006). Secara teoritis, pandangan akan administrasi publik memiliki banyak pengembangan dan perubahan. “Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses *management*, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian” (Sjamsuddin, 2006:116). Teori tersebut mengemukakan bahwa administrasi publik menekankan pada proses pengelolaan, politik, dan hukum. Administrasi publik juga memiliki subjek dengan fungsi yang berbeda yaitu pemerintah dengan fungsi eksekutif,

legislatif, dan yudikatif. Pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi tujuan utama dari penerapan administrasi publik.

Definisi lain administrasi publik dijelaskan oleh Nigro dan Nigro dalam Keban (2004:5-6) yang menyatakan bahwa:

Administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan pada proses institusional yaitu bagaimana usaha kerjasama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.

Menurut (Keban, 2004:8) cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu administrasi publik diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang merupakan pembuatan unit, pembagian tugas dan penetapan prosedur, aturan untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi publik berusaha melakukan penekanan pada pentingnya kegiatan pengelolaan dalam pencapaian sebuah tujuan.

Selanjutnya Sjamsuddin (2006:116) mengemukakan bahwa “administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara

lebih baik”. Artinya, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih baik, Negara memerlukan kegiatan pengelolaan di semua bidang mulai dari Pengambilan kebijakan hingga implementasi program pemberdayaan sosial. Maka dari itu, administrasi publik merupakan pandangan keilmuan yang mewakili segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pemerintahan.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebagai bentuk pemahaman studi mengenai kebijakan publik dapat dilihat berdasarkan beberapa pendapat tokoh kebijakan. Kebijakan publik menurut Dye “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*)”. Definisi kebijakan publik menurut Dye yang dikutip oleh Subarsono (2012:2) mengandung makna bahwa:

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Selanjutnya Anderson yang dikutip oleh Subarsono (2012:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor di luar pemerintah. Disisi lain, Anderson dalam Islamy (2007:19), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sebagai implikasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan publik, setidaknya-tidaknya dalam arti positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)

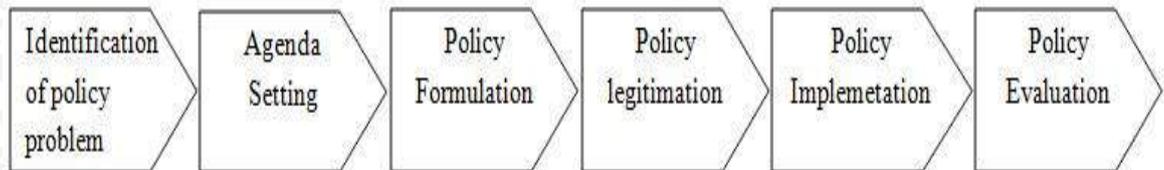
Sebagaimana perspektif mengenai pengertian dari kebijakan publik dari berbagai tokoh kebijakan memperlihatkan bahwasannya kebijakan publik merupakan pilihan yang dipilih pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan publik. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan berbagai tindakan dalam bentuk program ataupun keputusan ataupun lainnya guna tercapainya kepentingan masyarakat.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses Kebijakan publik secara umum dapat dipahami dalam kebijakan publik adalah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi

kebijakan. Tahapan pada kebijakan publik ini memberikan gambaran umum alur pembuatan kebijakan publik. Menurut Dye proses kebijakan publik dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 1. Tahapan dalam Prose Kebijakan



Sumber: Nugroho (2011:495)

Dye seperti yang dikutip oleh Widodo (2009: 16-17) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

e. Implementasi Kebijakan (*implementing of policies*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

f. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

3. Pengertian Implementasi

Menurut Grindle dalam Sabu, (2012:39) menyatakan bahwa, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sabu, (2012:39) terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik.

a. perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Pada akhir perang ke II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

b. Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan

perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini telah terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

4. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan tersebut dan mempunyai beberapa karakteristik di dalam implementasi kebijakan, adapun beberapa model implementasi yang ada menurut para ahli dibagi kedalam beberapa model implementasi kebijakan. Model-model implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn pada 1975. Model ini merupakan salah satu model kebijakan yang bersifat *top down*. Dalam model ini dijelaskan sekaligus mengandaikan bahwasanya kebijakan publik, implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model ini memiliki empat *variable* yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu :

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- 2) Karakteristik agen pelaksana/ Implementor

- 3) Kondisi ekonomi dan politik
- 4) Kecenderungan (disposisi) pelaksana/implementor.

(Nugroho, 2009:503-504)

Model Implementasi kebijakan ini bersifat linear yang artinya implementasi kebijakan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kelebihan dari model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn ini ialah kuat dalam komunikasi antara organisasi pembuat kebijakan dan organisasi implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh aktor implementor kebijakan publik. Maka dari itu, komunikasi antar organisasi kuat dalam menjalankan implementasi kebijakan publik model ini.

Kelemahan dalam model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn ialah dipengaruhinya kondisi ekonomi dan politik. Implementasi tidak akan berjalan lancar jika kebijakan tidak mendapatkan dorongan ekonomi, jika kebijakan diganggu oleh unsur politik. Selain itu kelemahan dari model kebijakan ini ialah kecenderungan disposisi. Aktor implementasi kebijakan lebih sering mendisposisikan tugas kepada aktor implementasi kebijakan lain yang dirasa lebih faham.

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn

Model implementasi ini berkembang sejak tahun 1978. Model ini bersifat *top down and enforced mechanism*. Dalam tulisannya kedua pakar di atas

memberikan beberapa untuk melakukan implementasi kebijakan. Adapun syarat dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya jaminan bahwasanya kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Adanya ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya lainnya dan khususnya adalah sumber daya waktu untuk melaksanakan kebijakan.
- 3) Tersedianya perpaduan sumber-sumber yang diperlukan. Hal ini dikarenakan sifat dari kebijakan publik adalah luas, oleh karena itu membutuhkan keterlibatan dari sumber-sumber yang ada, baik SDM atau aktor maupun sumber yang lain.
- 4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, maksudnya adalah memastikan kemampuan dari kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan.
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Semakin sedikit hubungan sebab akibat maka semakin tinggi hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut.
- 6) Apakah hubungan saling ketergantungannya kecil.
- 7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Memastikan tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. (Nugroho, 2009:506-509)

Model implementasi kebijakan publik Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn memiliki kelebihan dalam implementasi kebijakan publik yang

didasari mengkaji suatu kebijakan sebelum diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kelemahan dari model ini ialah adanya jaminan sosial bahwa lembaga pelaksana tidak akan mendapatkan masalah dari pihak eksternal. Kelemahan lainnya ialah adanya ketersediaan sumberdaya dalam implementasi kebijakan ini. Ketika tidak ada sumber daya manusia, waktu maka implementasi kebijakan ini tidak dapat berjalan.

c. Implementasi Kebijakan Publik Model Merile S. Grindle

Model ini berkembang pada tahun 1980. Berdasarkan model yang dibuat oleh tokoh di atas maka Wibawa (dalam Nugroho,2009:550) menyatakan bahwasanya model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah, bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan, dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari suatu kebijakan. Adapun isi dari kebijakan tersebut mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) Siapa pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan uraian diatas dapat

dicermati bahwasanya model ini merupakan model yang memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap konteks kebijakan. Selain itu model ini juga bersifat *top down and market mechanism*. (Nugroho, 2009:510-511)

Model implementasi kebijakan publik Merile S. Grindle memiliki kelebihan dalam segi proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat masuk kedalam implementasi kebijakan publik dilihat manfaatnya dan disesuaikan dengan tujuan. Jika dalam implementasi kebijakan publik tidak sesuai dengan tujuan dan manfaat maka implementasi kebijakan dilakukan evaluasi. Kelebihan selanjutnya dalam implementasi kebijakan publik mengedepankan derajat perubahan suatu klien atau objek yang yang diberikan implementasi kebijakan publik. Kekurangan dari implementasi kebijakan publik ini ialah ketika kebijakan telah diformulasikan dan dibuat, maka implementasi kebijakan publik baru dijalankan. Tidak ada pra implementasi kebijakan publik ketika kebijakan dibuat. Sehingga kebenaran dan kesalahan dari kebijakan dapat terjadi ketika pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

d. Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward

Dalam tulisannya pada tahun 1980 George Edward menegaskan bahwasanya masalah utama administrasi publik adalah: *lack of attention to implementation*. Selain itu dia juga mengatakan *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Model ini berdasarkan pemetaan model implementasi

kebijakan bersifat *top down and enforced mechanism*. Berdasarkan pernyataannya, menurut Edward untuk mewujudkan implementasi kebijakan publik yang efektif maka perlu memperhatikan empat aspek dibawah ini:

- 1) Komunikasi, dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan program, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- 2) *Resource*, dalam hal ini berkenaan dengan tersedianya sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
- 3) *Disposition*, dalam hal ini berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- 4) Struktur birokrasi, dalam hal ini berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadi proses implementasi yang tidak maksimal. (Nugroho, 2009:512-513)

Model implementasi kebijakan publik George Edward memiliki kelebihan dalam segi komunikasi dan *disposition*. Komunikasi diartikan bagaimana komunikasi disampaikan oleh organisasi atau publik sebagai dasar bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan. *Disposition* diartikan sebagai pelaksana implementasi kebijakan publik dalam kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan implementasi kebijakan publik. Poin kedua terkait pada *resource* atau pada sumber daya pendukung. Hal ini berkaitan dengan masalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya lainnya. Pada model ini implementasi akan bergantung pada sumber daya pendukung yang mempunyai untuk melaksanakan implementasinya. Selanjutnya kelemahan pada model implementasi kebijakan George Edward ialah pada aspek *disposition* dan struktur birokrasi. *Disposition* bergantung pada komitmen pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana tidak memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan dengan baik, maka implementasi kebijakan model ini tidak akan berjalan dengan baik. Aspek struktur birokrasi bergantung pada lembaga pelaksana kebijakan. Hal itu dikarenakan struktur birokrasi dalam suatu daerah atau pelaksana sering mengalami kesamaan jobdesc, sehingga cara kerja dalam implementasi kebijakan akan bersifat tumpang tindah.

Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri menggunakan model implementasi kebijakan George Edward. Hal itu berkaitan erat dengan aspek yang ada dalam model implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, *resource*, *disposition*, dan

struktur birokrasi. Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri berkaitan dengan aspek komunikasi. Hal itu terbukti dengan adanya sisi komunikasi yang ada dari UPT RSTS Kediri dengan dinas sosial yang ada di seluruh Jawa Timur. Aspek *resource* yang menekankan pada ketanggapan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal itu terbukti dengan adanya sumber daya pendukung khususnya manusia di UPT RSTS yang memenuhi kriteria sebagai pelayan rehabilitasi. Selain itu dari aspek *disposition* yang menekankan pada komitmen sumber daya manusia yang dirasa ketanggapan saja tidak cukup dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komitmen yang siap melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi guna mencapai tujuan yang ada. Aspek struktur birokrasi yang terbukti dengan adanya pembagian jobdesc dari setiap sie dan divisi yang ada di UPT RSTS sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Selain itu UPT RSTS Kediri merupakan satu-satunya panti di Jawa Timur yang memberikan program pelayanan dan rehabilitasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dengan panti yang lain khususnya dalam memberikan sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila.

Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dipastikan menggunakan model implementasi kebijakan George Edward. Berbeda dengan model implementasi kebijakan yang lain, Model implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn terdapat poin kondisi ekonomi dan politik yang mengatur model implementasi kebijakan.

Hal itu tidak terbukti dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, dikarenakan kondisi ekonomi dan politik yang ada di Jawa Timur tidak mengakibatkan pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila terganggu. Model implementasi kebijakan Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn juga terdapat poin adanya jaminan dari gangguan pihak luar terhadap pelaksana program. Hal itu tidak terbukti dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

Tidak adanya jaminan dari pihak eksternal terhadap pelaksana program menjadikan bukti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri tidak menggunakan model implementasi kebijakan tersebut. Model implementasi kebijakan Merile S. Grindle juga terdapat poin kedudukan pembuat kebijakan, hal itu terbukti dari adanya pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang tetap berlangsung di UPT RSTS Kediri meskipun pembuat program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila telah digantikan oleh pemimpin yang lain.

5. Kebijakan Sebagai Program

Menurut (Westra, dkk dalam Putra, 2014: 50), program merupakan rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara pelaksanaannya. Memperkuat hal tersebut (Kayatomo, 1985:162) yang mengatakan bahwasannya program merupakan rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian definisi program yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

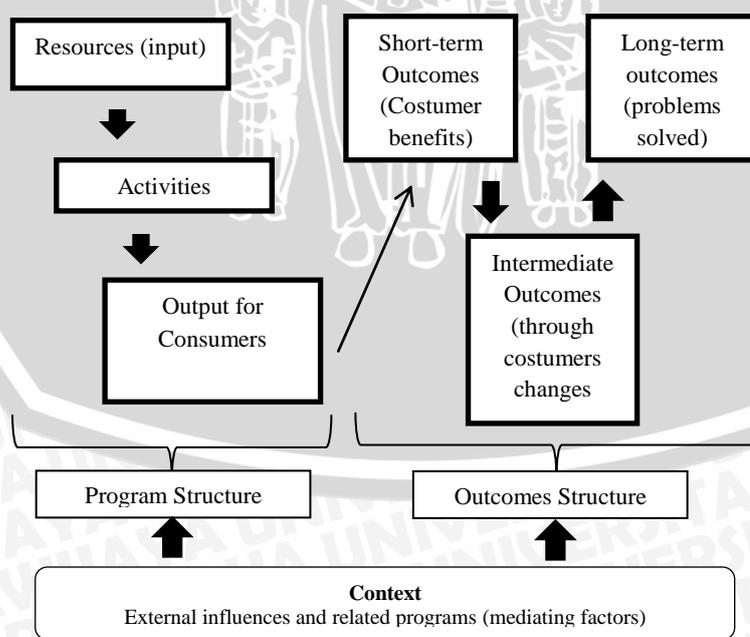
Pembangunan Nasional adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya program merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang dilakukan oleh subjek tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program juga merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang memiliki acuan yang sama. Subjek pelaksana program dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga, atau masyarakat. Tujuan dan sasaran ditentukan sehingga terlaksananya program lebih terfokus.

Mengutip dari United Nations dalam Zauhar, (1993:1) bahwa suatu program dapat terlaksanan dengan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan jelas.
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program secara selektif.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan hasil dari program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Kutipan tersebut pun menjelaskan bahwasannya sebuah program harus didukung dengan peralatan, sumber anggaran, dan relasi dengan instansi lain serta sumber daya pelaksana yang mendukung.

Dalam kajian implementasi program, terdapat berbagai model yang dikemukakan para ahli untuk mempermudah dalam memahami proses analisis implementasinya, salah satunya yang dikenal dengan *logic models* (model logika dasar). Model ini merupakan salah satu model yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program. Model logika dasar telah muncul pada tahun 1960-an, namun pemakaiannya mulai banyak dilakukan sejak beberapa dekade ini dikarenakan model logika dasar lebih fokus pada kerangka evaluasi dan ukuran kinerja sebuah program. Elemen-elemen dalam model ini meliputi sumber daya, proses, *output* yang hendak dicapai, sasaran, serta *outcomes*. Berikut adalah gambar kerangka analisis melalui model logika dasar;



Gambar 2. Basic Logic Model

Sumber : Wholey, dkk, 2010: 57

Bagan diatas menjelaskan bahwa suatu program memiliki program structure dan outcomes structure. Program structure merupakan kegiatan dalam program yang terdiri dari input, proses, dan output. Outcome structure merupakan manfaat yang didapatkan dalam program yang terdiri dari manfaat jangka pendek, manfaat jangka menengah, dan manfaat jangka panjang.

C. Pelayanan dan Rehabilitasi

1. Pelayanan

Menurut Boediono, (2003:60) bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Selanjutnya menurut Kurniawan dalam Sinambela (2006:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Menurut Moenir, (2002:88-89) ada beberapa masalah pokok dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut antara lain :

1. Tingkah laku yang sopan
2. Cara penyampaian
3. Waktu menyampaikan yang cepat
4. Keramah – tamahan

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
3. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Rehabilitasi

Soekanto (1985:423), rehabilitasi sebagai suatu proses atau teknik mendidik kembali serta mengarahkan kembali dan motivasi pelanggar atau penjahat, sehingga perilakunya sesuai dengan aturan-aturan kemasyarakatan. Rehabilitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perbaikan atau membangun dalam menanggulangi pekerja seks komersial agar dapat berkarya sesuai dengan harkat dan martabat dan menjadi anggota masyarakat. Selanjutnya UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa Pasal 1 ayat 14 menjelaskan: “Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”

Selanjutnya menurut Haryanto (2009:62) menjelaskan mengenai pengertian rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan yang baik, tetapi karena suatu hal kemudian menjadi tidak baik atau rusak.
- b. Rehabilitasi berkaitan erat dengan koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan team work menuju ke arah tujuan akhir.

3. Kegagalan dalam Program Rehabilitasi

Achlis dalam Haryanto (2009:65) menjelaskan terdapat beberapa poin yang mengakibatkan kegagalan rehabilitasi ialah:

- a. Perasaan tidak aman
Perasaan tidak aman didapatkan oleh pasien atau pelaku rehabilitasi yang menganggap adanya rehabilitasi tidak aman untuk dirinya.
- b. Tidak ada kematangan emosi
Tidak ada kematangan emosi merupakan rasa menolak dari adanya kegiatan rehabilitasi
- c. Kecemasan yang mendalam
Kecemasan yang mendalam akan kegiatan rehabilitasi menyebabkan gagalnya kegiatan rehabilitasi
- d. Perasaan rendah diri yang kuat
Perasaan rendah diri yang kuat merupakan kegiatan dimana seseorang malu untuk menanyakan akan apa yang diajarkan dalam kegiatan rehabilitasi

e. Tidak ada daya tahan terhadap frustrasi

Frustrasi dalam kegiatan-kegiatan yang diajarkan untuk merubah kebiasaan yang ada dalam kegiatan rehabilitasi

f. Masalah-masalah pribadi

Permasalahan pribadi yang berdampak pada individu untuk menolak kegiatan rehabilitasi. Permasalahan ini muncul pada setiap orang

g. Kurangnya motivasi

Kurangnya motivasi untuk menyadarkan bahwa dampak positif dari rehabilitasi untuk kedepanya

h. Sikap tidak wajar

Sikap tidak wajar diartikan sebagai *human error* dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwasanya kegagalan rehabilitasi dipicu oleh beberapa hal. Pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri termasuk dalam kegiatan rehabilitasi. Maka dari itu, kegagalan dalam kegiatan rehabilitasi di UPT RSTS Kediri dapat dilihat melalui poin-poin yang ada diatas.

4. Tujuan Rehabilitasi

Menurut Departemen Sosial (1990) dalam Haryanto (2009:65-66) menjelaskan tujuan rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.

- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa tujuan rehabilitasi ialah memulihkan diri sendiri berupa rasa percaya diri, kesadaran, dan rasa bertanggung jawab atas dirinya, masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Selain itu tujuan rehabilitasi diharapkan pasien rehabilitasi mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Kaitan dengan rehabilitasi yang dijalani oleh WTS di UPT RSTS Kediri ialah klien diharapkan mampu memiliki rasa percaya diri dan mampu menjalankan fungsi sosialnya dari kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri

Unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial tuna susila (UPT RSTS) merupakan tempat dimana para tuna susila atau perempuan-perempuan yang memiliki permasalahan-permasalahan sosial. WTS termasuk dalam wanita yang perlu diberikan bimbingan untuk kembali menjadi wanita yang mandiri dan tidak melakukan penyimpangan kembali dan berdaya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya seperti pada masyarakat pada umumnya. UPT RSTS memiliki tanggung jawab dan tugas dalam melaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas wts.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas sosial provinsi Jawa Timur, upt rsts mendapatkan kewenangan yang diberikan oleh dinas sosial provinsi Jawa Timur mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjut bagi tuna susila.

- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas tuna susila.
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjut bagi tuna susila.
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas tuna susila.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi dinas sosial provinsi Jawa Timur.

Rehabilitasi dilakukan untuk wts agar mereka dapat memiliki rasa percaya diri, kemauan, kemampuan dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah WTS yang ada di lokasi atau WTS yang ada dijalanan di seluruh Jawa Timur dan mengembalikan perilaku yang menyimpang mereka agar dapat diterima dimasyarakat kembali dan tanpa adanya diskriminasi. Kegiatan peningkatan kapasitas di UPT RSTS meliputi:

- a. Bimbingan Mental
- b. Bimbingan Sosial
- c. Bimbingan Fisik
- d. Bimbingan Ketrampilan

Selama berjalanya bimbingan WTS wajib mengikuti seluruh kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial. WTS akan mendapatkan pelayanan di dalam UPT RSTS termasuk adanya kegiatan pelatihan/pembekalan empat bidang tersebut. Lama pelatihan dan pembekalan kompetensi atau bimbingan tersebut ialah selama empat bulan. Artinya, WTS akan ditempatkan dalam satu asrama atau panti dengan jumlah untuk satu angkatan adalah 60 WTS.

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diadakan di UPT RSTS meliputi:

1. Pendekatan awal dan penerimaan klien
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*)

3. Bimbingan sosial, fisik, mental, dan ketrampilan
4. Resosialisasi
5. Penyaluran
6. Bimbingan lanjut
7. Evaluasi
8. Pengakhiran

Serangkaian program tersebut dilaksanakan selama empat bulan dan bertempat di UPT RSTS Kediri. Selama berjalanya program tersebut, WTS diharapkan mengikuti program dan tidak diperkenankan meninggalkan asrama hingga tahap pengakhiran dengan alasan apapun. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir WTS yang mengandalkan penghidupan dengan menjual diri serta mampu bersaing dengan masyarakat lain setelah mendapat keterampilan di UPT RSTS. Adanya program ini diharapkan mampu menurunkan angka WTS di Jawa Timur.

D. Wanita Tuna Susila

1. Definisi Wanita Tuna Susila

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Menurut Sutrisno, (2005:341) mengatakan bahwa, pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedangkan *prostitut* adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau PSK (Kartono, 2011:207).

Kartono (2011:216), menuliskan bahwa pekerja seks komersial merupakan peristiwa penjualan diri baik perempuan maupun laki-laki dengan jalan

memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Definisi tersebut sejalan dengan Koentjoro, (2004:36) yang menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Banyak negara yang melarang pelacuran hingga seseorang yang melakukan pelacuran dikenakan hukuman, serta dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Pelacuran adalah salah satu bentuk dari zina, maka agama pun melarang keras tentang itu. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, mata pencaharian pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani. Maka timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis yaitu sejak adanya penataan relasi seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan (Kartono, 2011:208).

Helen Buckingham, dalam Sutrisno, (2005:343) mengatakan bahwa perempuan menghargai dirinya sendiri dan menolong dirinya sendiri dengan bekerja untuk dirinya sendiri, nampak pada profesinya sebagai pelacur. Sebagai pelacur merupakan tempat untuk pertama kalinya seorang perempuan memperoleh penghasilan yang modalnya adalah tubuhnya sendiri, menjual dirinya sendiri dalam kedudukan ekonomi yang sulit. Lanjut dikatakan pula bahwa perempuan memanfaatkan tubuhnya untuk meraup lembaran uang, sehingga

mendapatkan julukan penjaja seks oleh masyarakat. Predikat yang dimiliki perempuan sebagai penjaja seks tidak semakin membatasi ruang gerak privat dari perempuan, bahkan semakin mantap melangkah menekuni pekerjaan sebagai penjaja seks. Penjelasan beberapa pengertian di atas menyimpulkan bahwa WTS atau PSK adalah orang yang melakukan kegiatan seks di luar nikah, dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

2. Sejarah dan Konsep Pelacuran di Indonesia

Pelacuran telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Namun menelusuri sejarah pelacuran di Indonesia dapat di runtut mulai dari masa kerajaan-kerajaan Jawa, di mana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Prostitusi sudah terjadi di Indonesia sejak kerajaan Majapahit, diketahui dari penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabrata dan pada zaman Mataram semakin meningkat. Meningkatnya permintaan akan pelayanan seks, yaitu pekerja seks pada abad ke-19 (Ingleson dalam Koentjoro, 2004:61-62). Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi dua menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Mataram merupakan kerajaan Islam Jawa yang terletak di sebelah selatan Jawa Tengah. Pada masa penjajahan Jepang, semakin banyak wanita Indonesia yang dijadikan sebagai seorang pelacur yang disebut sebagai *Jugun Ianfu*. Istilah *Jugun Ianfu* merupakan wanita yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia

dan juga di negara-negara jajahan Jepang 12 lainnya pada kurun waktu tahun 1942-1945 (Emaus, 2013).

Istilah wanita yang menjual dirinya berganti dari waktu ke waktu. Dahulu seorang wanita yang menjual dirinya disebut pelacur. Seiring berkembangnya zaman pemerintah mengganti istilah pelacur dengan istilah WTS, hal itu mendapat protes dari banyak pihak. Karena tidak semua wanita yang menjajakan dirinya itu tak punya norma susila. Dan untuk norma susila sendiri sangat banyak cakupan, maka masyarakat menggunakan istilahnya sendiri yaitu pekerja seks komersial. Walaupun istilah ini juga sebenarnya kurang tepat.

3. Jenis Pekerja Seks

Pekerja seks di Indonesia beraneka ragam, menurut Henderina, (2012:19)

Pekerja seks mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya :

a. Segmen kelas rendah

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b. Segmen kelas menengah

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

c. Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan ayau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Pemaparan jenis pekerja seks diatas didukung oleh klasifikasi jenis pelacuran oleh Koentjoro (2004:64) yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jenis Pekerja Seks

Jenis Pelacur Menurut	Klasifikasi Pelacur			
	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Wanita	Waria
Tarif	Atas	Menengah	Bawah	
Usia	Dewasa	Remaja (ABG)	-	
Tempat Kerja	Kompleks	Bordil/Salon/Panti pijat	Rumah	
Profesionalitas	Profesional	Semi Profesional	Amatir	
Cara Kerja	Ikut mucikari	Terkadang ikut mucikari	Mandiri	
Tuntutan Kebutuhan	Uang/Narkoba	Status/Gengsi	Kesenangan	
Pendidikan	Terpelajar	Tidak terpelajar	-	

Sumber: Koerntjoro, 2004.

Jenis pekerjaan ini juga memiliki *diversifikasi* yang baik dalam struktur hingga operasional kerjanya. Melihat fenomena di Indonesia, Kadir (2007:151-153) membagi jenis pekerjaan seks ke dalam beberapa kategori besar berdasarkan kriteria struktur dan sistem operasional, diantaranya:

a. Pekerja seks jalanan

Pekerja seks ini sering kita temui di berbagai jalanan besar di Indonesia. Sang pekerja lebih bersifat independen. Ketika terjadi interaksi tak ada perantara ketiga seperti geromo maupun penjaga keamanan. Harga tubuh yang ditawarkan pun lebih miring. Hal ini karena selain tak ada tips kepada pihak ketiga secara tetap. Pekerja seks jenis ini tidak terlalu cantik serta seusia mereka terkadang lebih tua dibanding mereka yang berada di dalam lokalisasi.

b. Pekerja seks salon kecantikan

Istilah ini semacam penghalusan makna secara tersembunyi terhadap bisnis seksual yang sebenarnya mereka lakukan. Orang biasa menyebutnya dengan salon plus. Sistem operasional pekerja seks ini pertama kali merawat serta membersihkan sang pelanggan atau pasien. Di luar itu mereka juga bersedia melayani secara ekstra seperti pijat, dan hubungan seks. Untuk mengenali salon plus dapat dilihat dari bangunannya. Salon plus biasanya berkaca gelap, ada beberapa ruang di dalamnya yang ditutup tirai. Pencahayaan di dalamnya kurang terang (remang-remang).

c. Pekerja *phone sex* Sistematis

Pekerjaan seks ini didasarkan pada jasa telepon sebagai mediator. Terdapat dua jenis kinerja dalam hal ini, pertama mereka yang biasa disebut wanita panggilan atau *call girls*. Transaksi awal dibuat berdasarkan janji pertemuan (kencan) yang berlanjut ke tempat tidur.

Sedangkan kinerja kedua adalah seksualitas yang didasarkan pada orgasme melalui hubungan telepon (*phone sex*). Promosi ini sering kita temui pada berbagai majalah-majalah semi porno atau koran. Secara struktural, kinerja mucikari, calo, pekerja keamanan hingga pekerja seks itu sendiri mempunyai batas-batas kerja yang jelas dan profesional (Kadir, 2007:153).

Jika melihat latar belakang kultural dan tempat transaksi ekonomi Indonesia yang beragam maka transaksi seksualitas tak hanya ada dalam kategori di atas. Banyak juga pekerja seks yang bekerja di *mall* (sebagai pegawai *mall* dan merangkap pekerja seks untuk mencari uang tambahan). Pekerja seks sekaligus mahasiswi, akrab disebut ayam kampus, pekerja seks yang merangkap sebagai para pekerja atau pelayan di tempat-tempat hiburan malam yang ada di daerah perkotaan dan di kantor-kantor sebagai sekretaris, yang harga tubuh mereka cukup tinggi dan transaksi terkadang melalui kartu kredit. Dari hal di atas dapat kita lihat bahwa pekerja seks sebagai bagian dari prasyarat kinerja dan transaksi dagang yang tidak selalu lepas dari ramainya pusat-pusat ekonomi yang strategis. Sistem pekerja seks cenderung mempunyai hubungan yang bersifat temporer insidental. Strategi tersebut tampak pada mekanisme kerja mereka mengenai istilah *Short time* dan *Long time booking* yang semuanya hanya terjadi dalam waktu tertentu (Kadir, 2007:155).

4. Faktor penyebab munculnya WTS

Setiap tindakan atau perilaku yang terjadi selalu mempunyai alasan dibelakangnya. Begitu pula WTS yang mempunyai alasan untuk terjun ke dalam

dunia yang kelam. Koentjoro, (2004:134) menjelaskan ada lima faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pekerja seks, yaitu:

a. Materialisme

Materialisme yaitu aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Pandangan hidup ini terkadang membuat manusia dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi yang diinginkan

b. Modeling

Modeling adalah salah satu cara sosialisasi pelacuran yang mudah dilakukan dan efektif. Terdapat banyak pelacur yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan di komunitas yang menghasilkan pelacur sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan model. Masyarakat menjadikan model ini sebagai orang yang ingin ditiru keberhasilannya. Sebagai contoh dalam dunia pelacuran, ada seorang PSK yang kini sukses dan kaya sehingga memicu orang di sekitarnya untuk meniru kegiatan PSK.

c. Dukungan orangtua

Dalam beberapa kasus, orangtua menggunakan anak perempuannya sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka akan materi. Dukungan yang diberikan oleh orangtua membuat anak lebih yakin untuk menjadi

PSK. Dalam hal ini, terkadang orangtua termasuk dalam anggota dunia prostitusi. Misal, seorang ibu adalah PSK dan anak perempuan dipaksa ibunya untuk menjadi PSK pula.

d. Lingkungan yang permisif

Jika sebuah lingkungan sosial bersikap permisif terhadap pelacuran berarti kontrol tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan jika suatu komunitas sudah lemah kontrol lingkungannya maka pelacuran akan berkembang dalam komunitas tersebut. Lingkungan sosial adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, maka dari itu masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit masyarakat.

e. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah alasan klasik seseorang untuk menjadi PSK. Faktor ini lebih menekankan pada uang dan uang memotivasi seseorang menjadi pekerja seks komersial. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, menyebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.

5. Dampak timbulnya WTS

Kehadiran WTS di masyarakat dapat memberikan dampak yang dapat memicu perubahan sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya WTS (Kartono, 2011: 249) antara lain:

a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit

Adapun penyakit yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi ini ialah HIV/AIDS, HIV/AIDS sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Agar virus ini tidak merambat terlalu jauh perlu adanya pencegahan yaitu dengan mempersempit jaringan prostitusi ini. Sebab dengan luasnya jaringan prostitusi, akan semakin mempermudah penyebaran penyakit kelamin yang dapat menular melalui hubungan seksual.

b. Merusak kehidupan keluarga

Dengan adanya wanita tuna susila akan mengakibatkan sendi-sendi dalam keluarga rusak. Semakin banyak pengguna jasa akan semakin memperbanyak jumlah WTS ini, dan akan menular ke masyarakat luas. Keluarga yang awalnya harmonis bisa hancur karena kepala rumah tangga mencari jasa WTS.

c. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika dan minuman keras

Prostitusi sangat berkaitan erat dengan minuman keras dan narkotika. Minuman keras dan narkotika akan digunakan sebagai doping dalam hubungan seksual. Hal ini mudah dijumpai di bar atau cafe. Di lokasi tersebut selain sebagai tempat untuk menjual minuman keras, juga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.

d. Merusak moral, susila, hukum dan agama

Dengan meluasnya prostitusi akan merusak nilai moral, susila, hukum dan agama. Karena pada dasarnya prostitusi bertentangan dengan norma

moral, susila, hukum dan agama. Rusaknya nilai dan moral membuat tatanan masyarakat berantakan. Sehingga nilai dan norma moral, susila, hukum dan agama harus ditanamkan pada masyarakat sedini mungkin.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan memakai metode-metode penelitian, sehingga dapat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan, untuk melihat situasi dan kondisi yang unik dalam implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Widodo dan Mukhtar dalam Harsono (2006:109) menyatakan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian suatu saat tertentu. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

1. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman-penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Melihat berbagai alasan diatas dapat ditarik kesimpulan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif diharapkan mampu melihat proses penelitian yang dilakukan, dengan hasil memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang proses implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sanapiah dalam Sugiyono (2009) fokus penelitian merupakan batasan masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana adanya penetapan fokus juga akan mempermudah penulis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang telah diteliti. Selain itu, fokus telah mempermudah penulis untuk mengetahui secara tepat dalam usahanya mengumpulkan data yang ada dilapangan. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, dilihat dari:
 - a) Proses program pelayanann dan rehabilitasi sosial tuna susila
 - b) Sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila
 - c) Partisipasi WTS dan *instruktur* bimbingan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila
 - d) Tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila
 - e) Manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program pelayanan dan rehabiltasi sosial tuna susila, dilihat dari:
 - a) Faktor pendukung
 - b) Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data dan juga informasi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri Jawa Timur. Adapun pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa di Kota Kediri terdapat UPT RSTS dibawah naungan dinsos Provinsi Jatim yang menampung WTS dari seluruh Jawa Timur. Disamping itu UPT RSTS Kediri merupakan UPT satu-satunya yang memberikan program pelayanan dan rehabilitasi sosial di Jawa Timur. Alasan selanjutnya pemilihan lokasi UPT RSTS Kediri ialah cakupan dan hubungan UPT RSTS dengan dinas sosial Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Setiap tahun dalam UPT RSTS memiliki tiga angkatan.

Setiap angkatan tersebut selalu terdapat WTS yang mendapatkan program pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ditentukan dengan tujuan untuk memudahkan penetapan lokus agar tidak meluas. Adapun situs penelitian ini sendiri yaitu:

1. Kantor UPT rehabilitasi sosial tuna susila Kediri;

- Sub bagian tata usaha UPT RSTS
- Seksi rehabilitasi dan bina lanjut UPT RSTS
- Seksi pelayanan sosial UPT RSTS

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang penggaliannya menggunakan informan, yaitu orang yang dianggap mengetahui benar fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk memperoleh data-data informasi yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan.

Adapun sumber data primer yang telah digunakan adalah:

1. ST(L,55th) sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 17 Mei 2016 pada pukul 14.00 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.

2. RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan Sosial UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 17 Mei 2016 pada pukul 09.00 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.
3. AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 17 Mei 2016 pada pukul 10.30 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.
4. SN(P,50th) sebagai Pengasuh Klien dan Staf Rehabilitasi dan Bina Lanjut UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 17 Mei 2016 pada pukul 08.30 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.
5. MY(P,40th) sebagai *instruktur* bimbingan ketrampilan tata boga UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 18 Mei 2016 pada pukul 11.00 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.
6. UD(P,40th) sebagai *instruktur* bimbingan ketrampilan rias rambut UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 18 Mei 2016 pada pukul 12.00 WIB di kantor UPT RSTS Kediri
7. IR(L,42th) sebagai *instruktur* bimbingan ketrampilan tata busana atau jahit UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 18 Mei 2016 pada pukul 13.00 WIB di kantor UPT RSTS Kediri
8. STI(P,36th) sebagai klien UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 10.15 WIB di Kantor UPT RSTS Kediri.

9. RS(P,44th) sebagai klien UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 11.00 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.
10. WI(P,29th) sebagai klien UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 12.00 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.
11. ABD(L,40th) sebagai *instruktur* bimbingan mental UPT RSTS Kediri yang dapat diwawancarai pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 13.10 WIB di kantor UPT RSTS Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
2. Peraturan Gubernur Jatim No 119 Tahun 2008
3. Lifflet UPT RSTS Kediri Tahun 2015
4. Buku Standart Pelayanan Publik UPT RSTS Kediri
5. Buku Memori Rehabilitasi UPT RSTS Kediri Tahun 2015
6. Power Point Draft Rancangan Rencana Kerja Straegis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan dengan menggunakan cara wawancara dilakukan pada informan yang memiliki informasi secara mendalam, sehingga peneliti dan obyek penelitian telah berhadapan langsung. Hal ini dilakukan agar semua berjalan tanpa adanya rekayasa data.

Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penulis untuk mendapatkan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan alat yang digunakan dalam wawancara adalah *interviewguide* sebagai panduan yang berisikan pokok-pokok pertanyaan yang telah dikembangkan di lapangan. Wawancara dilakukan baik secara terbuka atau terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini dilakukan guna memperoleh obyektifitas dan kejujuran informan untuk memberitahukan apa yang sebenarnya. Diawali dengan dilakukannya wawancara dengan Staf Rehabilitasi dan Bina Lanjut UPT RSTS Kediri, Kepala Sie Pelayanan Sosial dan kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT RSTS Kediri hingga melakukan wawancara dengan Instruktur Bimbingan dan Klien (Wanita Tuna Susila) UPT RSTS Kediri.

2. Observasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data menggunakan seluruh alat indera untuk melihat implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Observasi disini diharapkan dengan adanya pengamatan akan memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Penelitian kali ini peneliti mencoba untuk melakukan observasi dari suasana kerja di kantor UPT RSTS. Selain itu peneliti mencoba untuk melakukan observasi pada asrama klien UPT RSTS dan tempat untuk bimbingan yang ada di lingkungan UPT RSTS Kediri.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Bentuk teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan melihat beberapa data dari *liftlet* resmi UPT RSTS Kediri. Selanjutnya untuk mencari data mengenai regulasi yang berkaitan dengan program pelayanan dan rehabilitasi sosial, peneliti juga mendapatkan buku memori rehabilitasi dan bina lanjut yang didalamnya terdapat regulasi beserta laporan-laporan terkait implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya peneliti mencoba mempelajari data dan hasil temuan yang ada di lapangan dengan melakukan diskusi yang berlanjut bersama beberapa karyawan UPT RSTS Kediri.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2007: 222). Selanjutnya menurut (Nasution, 1988 dalam Sugiyono, 2007: 223) menyatakan:

“Penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama Moleong (2006:4). Selama menjalankan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Oleh karena itu maka semua data yang diperoleh dilapangan peneliti benar-benar memahami.
2. Pedoman-pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam

data yang sudah didapatkan sebelumnya. Namun sejauh ini peneliti sangat jarang sekali menggunakan atau memperlihatkan pedoman wawancara saat melaksanakan penelitian dalam rangka meminimalisir kecurigaaan.

3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP peneliti, serta buku saku kecil.

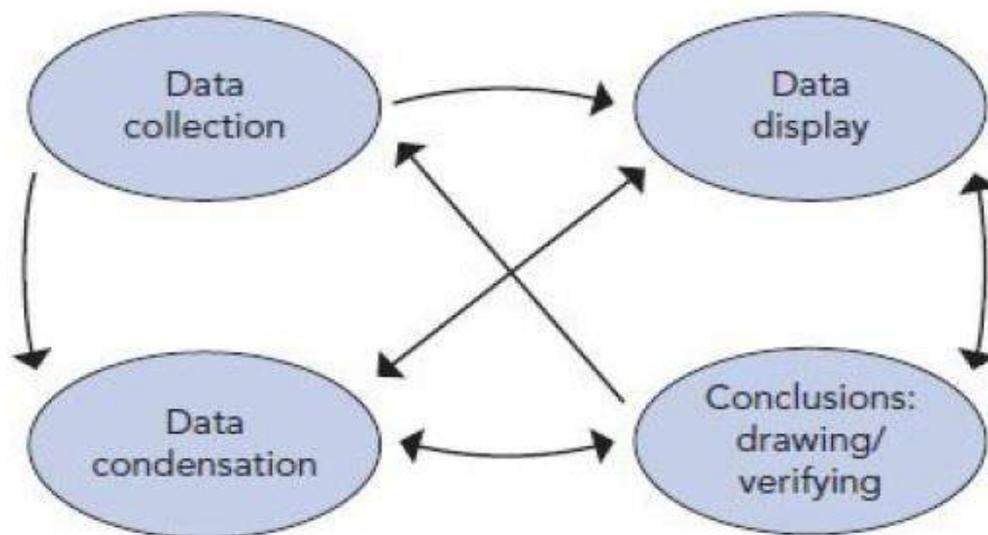
G. Analisa Data

Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul dibenak peneliti, dan juga untuk menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka peneliti harus mengadakan analisis data terhadap data yang diperoleh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sugiyono (2009:244);

“Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis- analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Selain itu dalam penelitian kualitatif analisa data harus dilakukan sejak awal dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan rancangan analisa data menurut model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1992). Akan tetapi terdapat beberapa perubahan dalam analisis data interaktif yang dikemukakan Miles dan Hubberman pada buku terbarunya edisi tiga. Adapun model analisis data interaktif yang diperbarui oleh Miles dan Hubberman sebagai berikut:



Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles dan Huberman (2014:33)

1. Pengumpulan data atau *data collection period* merupakan aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperlukan yaitu mengenai pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi data

sekunder mengenai implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut.

2. *Data condensation* merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen, dan fakta di lapangan. Dengan kondensasi data, data akan menjadi lebih kuat. (mengindari proses reduksi data karena menjadikan data yang di dapatkan menjadi lebih lemah dikarenakan ada beberapa data yang akan hilang).
3. Penyajian data atau *data display* secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data yang telah didapat. Dengan mendisplay data, peneliti mendapatkan keuntungan berupa kemudahan yaitu dengan cara data yang telah diperoleh di lapangan, disederhanakan oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk paparan data (secara paratif) , gambar, dan bukan angka.
4. Penarikan kesimpulan data atau *conclusion drawing/verification* merupakan tahap terakhir dari model analisis data. Dalam proses ini data yang telah dikondensasi dan dirangkaikan secara sistematis (di-*display*) selanjutnya diambil benang merahnya sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah kesimpulan yang berhubungan

dengan fokus penelitian. Yaitu implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila dan faktor pendukung dan penghambat dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

H. Keabsahan Data

Hasil penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses penelitian. Baik atau tidaknya hasil penelitian sangat tergantung dari proses yang dijalani oleh peneliti selama melakukan dan menyusun penelitian. Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar itu disebut sebagai keabsahan data. Menurut Moelong, (1999: 173) menetapkan keabsahan data diperlukan dengan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*).

Berikut ini penjelasannya:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*). Untuk mendapatkan dan memeriksa kredibilitas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Melakukan *peerdebriefing*

Hasil kajian didiskusikan dengan orang lain yaitu dengan karyawan UPT RSTS Kediri dan teman sejawat yang mengetahui implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila.

b) Triangulasi

Hal ini dilakukan oleh peneliti sejak terjun ke lapangan dengan berbagai wawancara maupun seperti berbincang biasa, observasi, dan dokumentasi dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data dari sumber lain. Penelitian ini mengecek data yang telah didapatkan dari wawancara dengan membandingkan wawancara yang telah diperoleh dengan wawancara dengan pihak lain beserta membandingkan dengan data sekunder yang telah ada baik peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang lain.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan berbagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti dalam penelitian ini bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya.

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diuji ulang melalui proses audit yang cermat terhadap seluruh komponen proses penelitian dan hasil penelitian. Oleh karena itu agar derajat reabilitas dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat tercapai, maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap hasil penelitian. Auditor

dalam penelitian ini yaitu dosen pembimbing yang terdiri dari Prof. Dr Sjamsiar Sjamsuddin dan Dr. Abdullah Said, M.Si. Selain itu juga audit yang dilakukan oleh dosen penguji.

4. Kepastian(*Confirmability*)

Peneliti untuk menentukan apakah hasil ini benar atau salah, maka peneliti mendiskusikannya dengan karyawan UPT RSTS Kediri dari setiap tahap terhadap temuan-temuan yang telah didapatkan di lapangan. Berdasarkan hasil diskusi tersebut maka karyawan UPT RSTS Kediri memberikan arahan dan kepastian bahwa apa yang telah dilakukan oleh peneliti itu adalah benar dengan mengacu pada pertimbangan bahwa (1) hasil penelitian adalah benar-benar berasal dari data, (2) penarikan kesimpulan dilakukan secara logis dan bersumber dari data, (3) peneliti telah meneliti dengan baik, dan (4) karyawan UPT RSTS Kediri telah berusaha menelaah kegiatan penelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data yang telah didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Gambaran Umum Kota Kediri

Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya. Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Luas wilayah Kecamatan Kota seluas 14,90 Km² yang terdiri dari 17 kelurahan. Kecamatan Mojoroto seluas 24,60 Km² yang terdiri dari 14 kelurahan. Kecamatan Pesantren memiliki luas 23,90 Km² yang terdiri dari 15 Kelurahan/ Sehingga luas total wilayah kota Kediri 63,40 Km². Peta administrasi Kota Kediri dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4. Kota Kediri



Sumber; Wikipedia kota Kediri

Wilayah administratif Kota Kediri terbagi menjadi 46 kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri. Sebelah selatan

berbatasan dengan kecamatan Kandat dan Ngadiluwih. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Wates dan Gurah. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Banyakan dan Semen. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gampengrejo. Kota Kediri dikenal sebagai pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia.

2. Letak dan Kondisi Geografis Kota Kediri

Secara geografi Kota Kediri terletak pada $7^{\circ}45'$ - $7^{\circ}55'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}15'$ – $112^{\circ}03'$ Bukur Timur. Wilayah Kota Kediri berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri. Kota Kediri dipisahkan oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren.

3. Penduduk dan sosiologi

a. Jumlah

Jumlah penduduk kota Kediri pada tahun 2013 mencapai 267.310 jiwa yang terdiri dari 134.409 jiwa penduduk laki-laki dan 132.901 jiwa perempuan

b. Komposisi

Mayoritas penduduk Kota Kediri adalah suku Jawa, diikuti dengan Tionghoa, Batak, Manado, Ambon, Madura, Sunda, Arab, dan berbagai perantau di luar suku Jawa lainnya yang tinggal dan menetap di kota ini.

c. Agama

Mayoritas penduduk kota Kediri beragama Islam, diikuti oleh Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan

lainya. Kerukunan dan toleransi umat beragama di Kota Kediri terjalin dengan baik.

d. Bahasa

Bahasa Indonesia menjadi bahasa formal dimasyarakat Kota Kediri, sedangkan Bahasa Jawa menjadi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga, tetangga, teman, atau orang-orang sesama penutur bahasa Jawa lainnya. Berbeda dengan bahasa Jawa dialek Surabaya dan dialek Malang yang memiliki dialek dan gaya bahasa Jawa yang blak-blakan dan egaliter, bahasa Jawa mayoritas masyarakat Kediri dan wilayah Mataraman Jawa Timur lainnya cenderung halus dari segi pemakaian kata dan penuturan.

4. Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan Kota Kediri dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat Kediri dalam pemilihan wali kota Kediri setiap lima tahun sekali. Wali kota Kediri membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara langsung pertama di kota Kediri pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008, setelah sebelumnya wali kota dan wakilnya dipilih oleh anggota DPRD kota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri saat ini adalah Abdullah Abu Bakar dan Lilik

Muhibbah yang berasal dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.

5. Visi Misi Kota Kediri

Visi :

Menata Kota Kediri lebih sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, berakhlak dan tanpa korupsi.

Misi :

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
- Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai Pusat Pendidikan.
- Memperkuat Ekonomi Kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Wisata, dan Industri Kreatif.

6. Lambang daerah Kota Kediri

Gambar 5. Lambang Kota Kediri



Penjelasan lambang Kota Kediri:

- a. Buto locoyo (Ki Ageng Dhoho) patih yang setia, teguh dan jujur dari Sri Aji Joyoboyo, penjaga Kota Kediri, lambang Kesetiaan, Keteguhan dan Kejujuran.
- b. Perisai, lambang Pertahanan
- c. Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo) Raja Pujangga ahli nجوم ternama dari Kediri, lambang Waspada
- d. Bunga Melati, bunga nasional (Bunga Pusaka Indonesia) berdaun lima lambang Pancasila
- e. Padi dan Kapas, lambang Kemakmuran
- f. Dewi Kilisuci namanya sesuai dengan jiwanya. Ia bertapa untuk kepentingan saudaranya yang diberi haknya untuk memimpin rakyatnya (dia lapar untuk orang lain), lambang tidak mementingkan diri sendiri
- g. Pita "Djojo ing Bojo" adalah bahan pengikat atau mempersatukan, lambang Persatuan
- h. Sayap dan ekor berbulu 17, 8, 4 dan 5 atau 17-8-1954, lambang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berada di jalur transportasi regional yang menghubungkan antara Kota Surabaya dan Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Malang. Kota Kediri telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder. Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata secara

regional. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Kota Kediri memiliki kawasan-kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensinya masing-masing sebagai berikut:

a. Kawasan Khusus Militer

Kawasan khusus militer di Kota Kediri, yaitu terdapat:

1. Asrama militer yang berlokasi di Kelurahan Bujel
2. Kompleks TNI di Kelurahan Banjaran, Kelurahan Mojo, dan Kelurahan Sukorame

Kawasan militer tersebut memiliki pengaruh strategis terhadap stabilitas keamanan dan politik yang juga berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pengembangan wilayah Kota Kediri secara keseluruhan.

b. Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan strategis di Kota Kediri yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pasar induk (Pasar Grosir Ngronggo) yang merupakan pusat kegiatan perdagangan skala besar untuk berbagai komoditas hasil pertanian seperti : sayuran, buah, ikan dan barang-barang kebutuhan pokok, selain itu di beberapa kawasan Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Hayam Wuruk dan daerah Kediri Town Square terdapat pusat perdagangan produk garment, elektronik, klontong, dan sebagainya. Untuk menunjang kegiatan perdagangan diperlukan fasilitas-

fasilitas pendukung yang memadai seperti lahan parkir, pelengkap kebersihan, tempat bongkar muat barang dan sebagainya.

2. Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri potensial di Kota Kediri meliputi industri besar, menengah, dan kecil dan home industri. Industri besar terdiri dari industri rokok Gudang Garam di Kelurahan Semampir, Balowerti, dan Dandangan serta pabrik gula di Kelurahan Semampir, Balowerti, dan Dandangan serta pabrik gula di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Industri sedang berupa industri pengolahan kayu di Kelurahan Pesantren dan industri pembuatan makanan di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak. Industri kecil, khususnya tahu tersebar di beberapa wilayah Kota Kediri. Home Industri di Kelurahan Bandar Lor, Banjarmlati, Bandar Kidul, Pakelan, Kampung Dalem dan Blabak.

3. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Kediri didukung oleh banyaknya hotel berbintang serta beberapa penginapan yang tersebar di wilayah Kota Kediri. Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Kediri meliputi pariwisata industri: pariwisata belanja dan kuliner, serta pariwisata olahraga dan seni. Pariwisata industri merupakan kegiatan pariwisata untuk melihat proses produksi industri besar, sedang, dan kecil, maupun home industri. Kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata industri meliputi Pabrik Gula Mrican dan Pesantren; Pabrik Rokok Gudang Garam; Pabrik pengolahan kayu, industri pembuatan

makanan dan home industri. Pengembangan pariwisata belanja dan kuliner meliputi pusat souvenir dan makanan khas di Jl. Yos Sudarso dan Jl. A. Yani serta Pasar Wisata di Campurejo. Pengembangan pariwisata olahraga dan seni meliputi pengembangan gedung kesenian di Selomangleng, GOR Banjarmlati dan Stadion Brawijaya Banjaran. Disamping itu juga terdapat berbagai kawasan wisata rohani sejalan dengan perkembangan syiar islam di Kota Kediri dengan keberadaan pondok-pondok pesantren besar seperti Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Kedunglo, Pondok Pesantren LDII yang secara rutin mengadakan agenda yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai penjuru nusantara.

B. Gambaran Umum UPT RSTS Kediri

1. Sejarah UPT RSTS Kediri

UPT tuna susila didirikan bertujuan untuk mengusir lokalisasi liar yang berbentuk warung-warung di daerah Kediri. Oleh karena itu departemen sosial mempunyai rencana untuk mendirikan suatu Unit Pelaksana Teknis yang mana khusus menangani atau merehabilitasi masalah WTS yang berlokasi di Jawa Timur, maka di pilihlah lokasi tersebut dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

1. Untuk menghilangkan lokalisasi-lokalisasi liar disekitar daerah tersebut.
2. Lokasi yang berada di tepi jalan raya dan transportasi mudah di jangkau dari semua jurusan.
3. Arealnya memungkinkan untuk pengembangan.
4. Jauh dari keramaian pada waktu itu.

Namun demikian dengan didirikannya UPT tersebut sempat mendapat protes dari warga atau masyarakat karena adanya kesalah pahaman yang di asumsikan. Salah paham tersebut terkait lokasi yang berada didekat UPT akan dipindahkan ke Desa Campurjo. Setelah masyarakat mendapat penjelasan-penjelasan dari pihak Pemerintah, barulah masyarakat menerima keberadaan UPT yang saat itu memiliki nama Sasana Rehabilitasi Wanita (SRW) "NGUDI RAHAYU" Kediri yang mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi para WTS yang berada di Jawa Timur.

Adapun nama UPT diatas, semula diusulkan dengan nama SRW "KILI SUCI" Kediri tetapi nama tersebut ternyata dipermasalahkan karena "KILI SUCI" adalah merupakan lambang sejarah kerajaan Kediri, sehingga perlu dicarikan penggantinya. Selanjutnya nama tersebut dikosultasikan ke kantor wilayah departemen sosial Provinsi Jawa Timur dan disederhanakan menjadi *NGUDI RAHAYU*. Jika diartikan *ngudi* adalah upaya *rahayu* adalah keselamatan. Maksud dari nama *ngudi rahayu* ialah memiliki pengertian yang maknanya upaya untuk mendapatkan keselamatan melalui pembinaan bimbingan mental, sosial dan ketrampilan yang diasramakan.

SRW *NGUDI RAHAYU* Kediri didirikan pada tahun 1982/1983. Operasional kegiatannya di mulai pada tanggal 1 Agustus 1984. Status formalnya baru ditetapkan oleh Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial RI dengan SK tanggal 1 April 1994, Nomor : 06 / KEP / BRS / IV / 1994, kemudian ditetapkan kembali dengan SK Menteri Sosial RI tanggal 23 April 1994, Nomor : 14 / HUK / 1994. Selanjutnya ditetapkan kembali dengan SK Menteri Sosial RI tanggal 24 April

1995, Nomor : 22 / HUK / 1995 dan yang terakhir dengan adanya Otonomi Daerah, maka *NGUDI RAHAYU* Kediri ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 12 tahun 2000, pada tanggal 27 September 2000, kemudian ditetapkan lagi Perda Provinsi Jatim Nomor 14 / 2002 melalui SK Gubernur nomor 51 tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur . Kemudian diperbarui lagi dengan adanya peraturan Gubernur No. 119 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, nama *NGUDI RAHAYU* diganti menjadi UPT RSTS Kediri. Demikian Sejarah singkat berdirinya UPT RSTS Kediri.

2. Gambaran Umum UPT RSTS

Masalah sosial tuna susila merupakan masalah Nasional dan sebagian besar masyarakat sering membicarakannya mengingat dampak yang ditimbulkan. Masalah yang berskala nasional ini memiliki dimensi yang sangat kompleks. Arti kompleks disini berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban, keamanan, kesehatan dan sebagainya.

Meningkatnya fenomena tindak tuna susila sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis multi dimensi, sehingga menjadikan peningkatan masalah sosial tuna susila. Sekanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 119 tahun 2008, maka UPT RSTS Kediri memiliki tanggung jawab dan tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi tuna susila yang berupa

bimbingan fisik, mental, keagamaan, sosial serta perubahan sikap dan klien, ketrampilan, dan resosialisasi.

3. Dasar Hukum UPT RSTS

- UU Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Konfensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Menteri No. 69 tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- Keputusan Menteri Sosial RI no.20 /HUK/1999 Tentang Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Tuna Susila
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi Dinsos Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 119 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

4. Visi Misi dan Motto UPT RSTS

Visi:

Terwujudnya tata kehidupan yang normatif bagi penyandang masalah dengan diliputi rasa kesucilaan.

Misi:

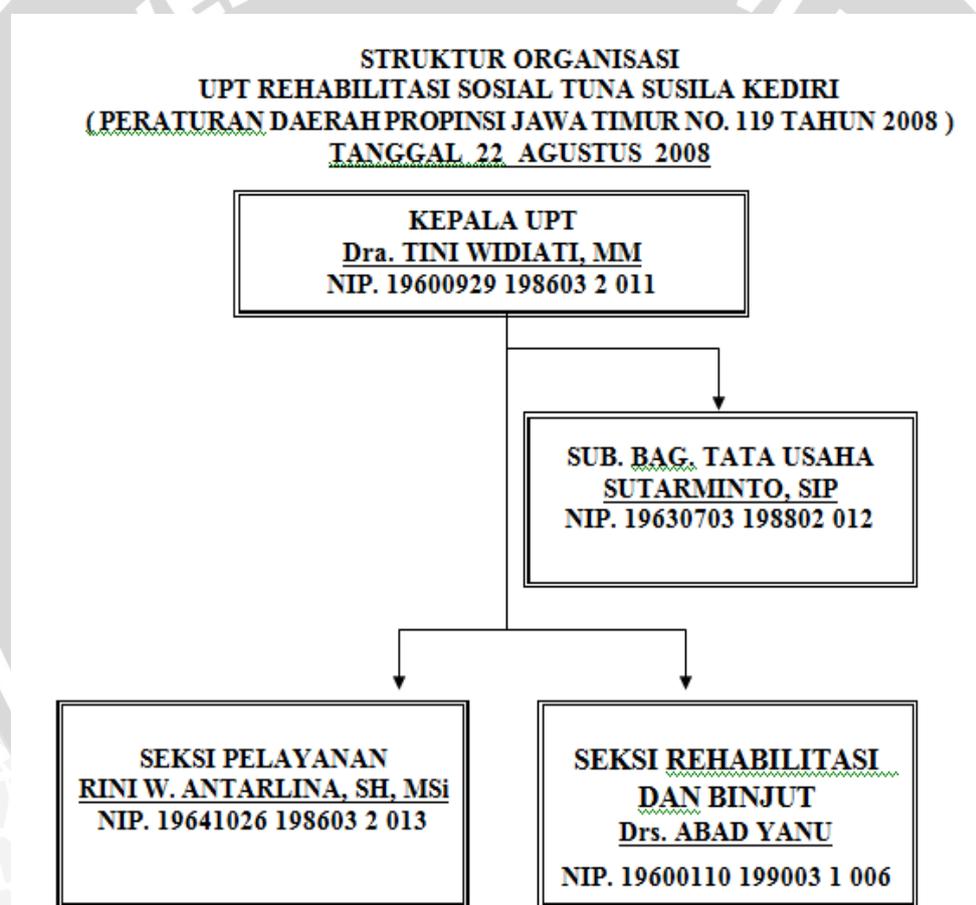
Meningkatkan sumber daya wanita melalui bimbingan sosial, fisik, mental, dan pelatihan ketrampilan.

Motto:

Wanita Mulya Negara Jaya.

5. Struktur Organisasi UPT RSTS Kediri

Gambar 6. Struktur Organisasi UPT RSTS Kediri



Sumber: Data Sub. Bag. Tata Usaha UPT RSTS Kediri

6. Maksud, Tujuan dan Fungsi UPT RSTS Kediri

a. Maksud

- Meningkatkan harkat dan martabat, kualitas hidup, kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat.
- Menumbuhkan harga diri, percaya diri, kemauan dan kemampuan dalam menghadapi kehidupan & pengidupan.

b. Tujuan

- Terhindarnya masyarakat rentan terhadap perbuatan tuna susila.
- Tercapainya kembali pemulihan harga diri, tanggung jawab sosial serta tumbuhnya kemauan dan berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya seara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
- Timbulnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya WTS dan dapat serta membina eks WTS.

c. Fungsi

- Menumbuhkan kesadaran klien akan pentingnya pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- Membantu klien melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari.
- Mambantu klien memenuhi kebutuhan dasar.
- Membantu klien mengembangkan potensinya.
- Membantu klien berperilaku normatif.

C. Penyajian Data

1. Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila

a. Proses Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila

Melihat implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tentunya wajib melihat dari sisi tahapan program. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti mencoba melihat dari sisi tahapan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila yang ada di UPT RSTS Kediri. Jika melihat dari *liflet* resmi UPT RSTS tahun 2015 dan buku standart pelayanan publik unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial tuna susila Kediri terdapat 8 kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut terdiri dari:

1. Pendekatan awal dan penerimaan klien
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assesment*)
3. Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, dan Ketrampilan
4. Resosialisasi
5. Penyaluran
6. Bimbingan lanjut
7. Evaluasi
8. Pengakhiran (*Terminasi*)

Proses program dalam *liflet* tahun 2015 dan buku standart pelayanan publik UPT RSTS Kediri tersebut diperkuat oleh pendapat ST(L,50th) sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menjelaskan,

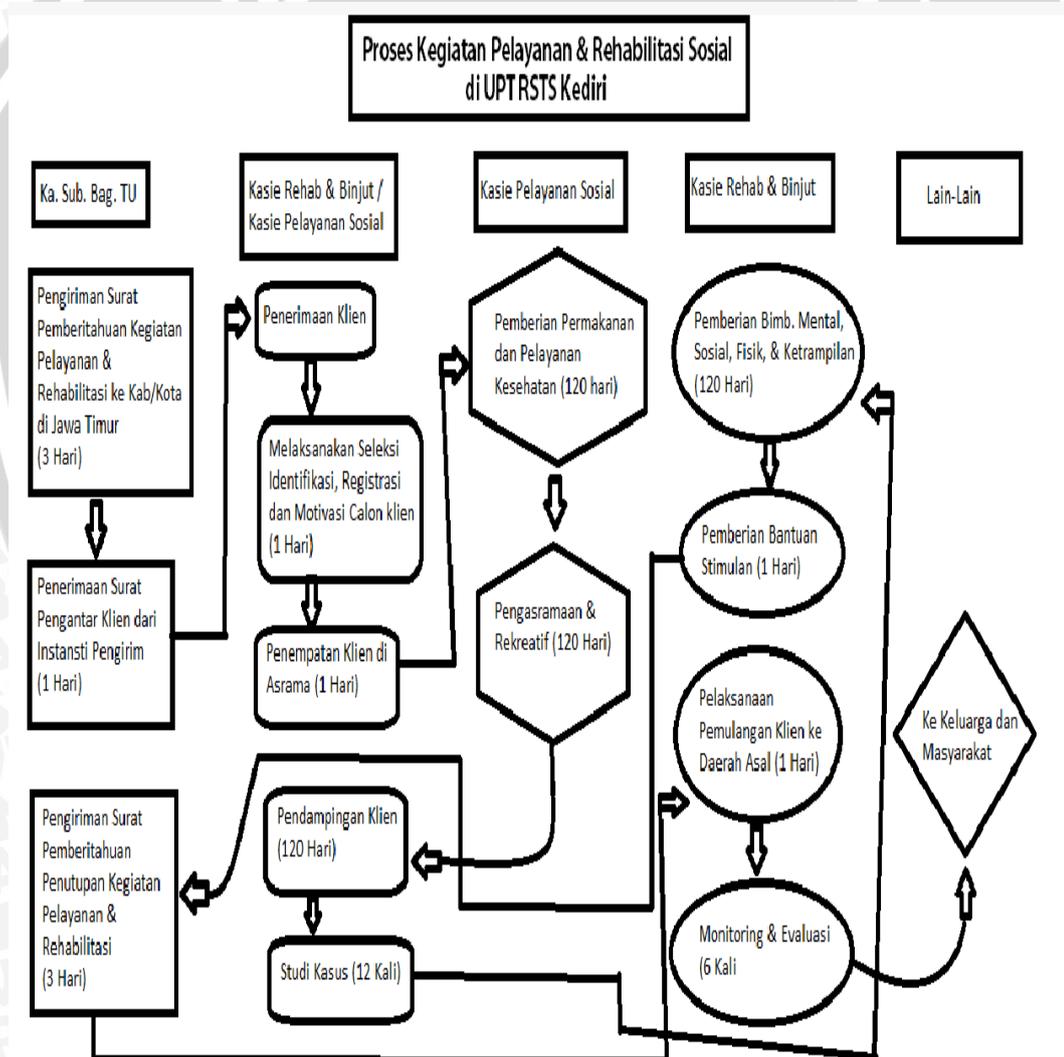
“Proses pelayanannya disini dari awal hingga akhir itu ada 8 kegiatan. Pendekatan awal dan penerimaan klien, *assesment*, bimbingan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, evaluasi, pengakhiran. Semua tahap itu dilaksanakan dalam waktu 4 bulan atau 120 hari. Selama berjalanya kegiatan-kegiatan itu, klien berada di UPT RSTS. Jadi gak ada yang boleh keluar UPT RSTS sama sekali” (Wawancara 17 Mei 14.00 UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti proses pelayananan dan rehabilitasi memiliki delapan kegiatan yang dilangsungkan selama seratus dua puluh hari atau empat

bulan. Selama pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri, klien tidak diperkenankan untuk meninggalkan asrama UPT RSTS dengan alasan apapun.

Berikut alur proses pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

Gambar 7. Alur Proses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri



Sumber: Data Sub. Bagian Tata Usaha (TU)

Penjelasan gambar diatas dimulai dari Kasubag TU mengirimkan surat kepada dinas sosial (DINSOS) kota dan kabupaten seluruh Jatim tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS. Pengiriman surat tersebut berlangsung selama tiga hari. Tahap kedua ialah surat yang dikirimkan telah diterima oleh dinsos kota dan kabupaten di Jatim dalam kurun waktu satu hari. Dinsos kota dan kabupaten yang akan mengirimkan klien segera menghubungi UPT RSTS untuk pengiriman klien. Selanjutnya dinsos kota dan kabupaten mengirimkan klien kepada UPT RSTS Kediri dan klien diterima oleh UPT RSTS Kediri.

Setelah klien diterima, Sie Pelayanan dan Rehabilitasi dan Bina Lanjut UPT RSTS melakukan *verifikasi* dan registrasi terhadap klien baru yang telah diterima oleh UPT RSTS serta dilanjutkan dengan kegiatan motivasi oleh UPT RSTS terhadap klien baru. Dalam kurun waktu satu hari klien langsung ditempatkan di asrama UPT RSTS Kediri. Terkait tahap tersebut, AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut menyampaikan, “klien diterima, didata, registrasi, terus diasramakan itu termasuk dalam kegiatan pendekatan awal dan penerimaan klien. Jadi karyawan menginput data mereka buat data awal kita” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri). Selanjutnya tugas Sie Pelayanan untuk memberikan pelayanan dan makan kepada klien dalam waktu seratus dua puluh hari. Sejalan dengan hal tersebut, RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan menyampaikan,

“Jadi pemberian makan dan pelayanan itu termasuk dalam pelayanan yang diberikan sie pelayanan. Kalo makan kan jelas mas, mereka dikasih makan sehari tiga kali. Pagi, siang, malam. Pelayanan lainnya yang kita berikan itu terkait sabun mandi, handuk, pakaian, spreng kasur, dll. Kalo

pelayanan kesehatan itu kita berikan rutin setiap seminggu sekali ada dokter dari puskesmas buat meriksa mereka yang sakit. Gak cuman periksa, obatnya juga kita sediakan” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 UPT RSTS Kediri).

Terkait pengasramaan dan rekreatif RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan menyampaikan,

“Emang itu tugas kita, pengasramaan disini kita melayani dan menyiapkan segala bentuk kekurangan dalam asrama. Contohnya mereka minta guling, spreng kasur. Kita dari pelayanan yang menyiapkan. Kalo rekreatif itu sama dengan resosialisasi. Dalam kegiatan resosialisasi kita memberikan pelayanan untuk mereka kembali memiliki nilai sosial, dan nilai kreatif. Kita menyediakan outbond ketika mereka jenuh, kita juga bentuk daftar piket untuk mengembalikan nilai-nilai sosial sebagai wanita, selain itu ada materi juga di kelas” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti bahwa pengasramaan dan rekreatif tersebut termasuk dalam kegiatan resosialisasi. Bukti dari kegiatan resosialisasi tersebut salah satunya ialah pembuatan jadwal piket. Berikut daftar piket yang dibuat sie pelayanan,

Tabel 4. Jadwal piket Angkatan II Tahun 2016 UPT RSTS Kediri

HARI	LOKASI/TEMPAT YANG DIBERSIHKAN		
	DAPUR	HALAMAN	ASRAMA/KAMAR
SENIN	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
SELASA	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK I
RABU	KELOMPOK III	KELOMPOK I	KELOMPOK II
KAMIS	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
JUMAT	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK I
SABTU	KELOMPOK III	KELOMPOK I	KELOMPOK II
MINGGU	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK I

(Sumber: Data Sie Pelayanan UPT RSTS Kediri)

Tabel diatas merupakan pembagian hari dan lokasi untuk piket klien UPT RSTS Kediri. Berikut nama-nama klien UPT RSTS yang terbagi dalam kelompok piket diatas

Tabel 5. Nama Anggota Kelompok Piket Angkatan II Tahun 2016 UPT**RSTS Kediri**

NO	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
1	2	3	4
1.	Putu Maya	Retno marti	Siti Solekah
2.	Suyati	Nita	Sumakyah
3.	Sutriani	Yuliatin	Arita Kristiyanti
4.	Endang/suelfiyah	Ika Fatmawati	Lamiyem
5.	Ulfatul Kasanah	Sutini	Dewi Anjarwati
6.	Siti Maimunah	Sulistyowati	Iin/Asmi
7.	Wiwin Sri Wahyuni	Fitri	Elisa
8.	Dewi Susantya	Asriyah	Monah/Nursani
9.	Tolasmah	Asmiyati	Siti Kholifah
10.	Dewi Atiyah	Yuni	Indung Megawati
11.	Andriyanti	Kosidah	Isti Setyoningsih
12.	Rusminah	Sumiyar	Hanik
13.	Wahyuni	Nur Fadilah	Madelah
14.	Nurrini	Mamik Sudarmi	Nur Aini
15.	Monasri	Siti Mukaromah	Winarseh
16.	Jumaroh	Sunarmi	Jamiiyah
17.	Manise	Suminten	Tarwati

(Sumber: Data Sie Pelayanan UPT RSTS Kediri)

Dua tabel diatas menjelaskan tentang kegiatan piket yang termasuk dalam resosialisasi. Selain kegiatan piket tersebut resosialisasi terdapat dalam kegiatan materi dikelas. Berikut beberapa materi tentang resosialisasi yang diadakan di dalam kelas.

Tabel 6. Kegiatan Resosialisasi Materi di Kelas UPT RSTS Kediri

No	Mata Latihan	Materi yang diberikan	Pelatih atau Penceramah
1	Dinamika Kelompok	Pengertian dinamika kelompok <ul style="list-style-type: none"> • Maksud & Tujuan Dinamika kelompok • Manfaat 7 Fungsi dinamika kelompok Interaksi Sosial yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Imitasi 	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri

2	Budi Pekerti/Etika	<ul style="list-style-type: none"> • Sugesti • Identifikasi Aplikasi dinamika kelompok dalam kehidupan sehari-hari Pengertian budi pekerti dan Tingkah laku Budi pekerti yang baik <ul style="list-style-type: none"> • Sopan santun • Tidak sombong • Tepat janji • Disiplin • Patuh pada peraturan • Saling menghormati • Saling menghargai • Tegang rasa • Jujur dan bertanggung jawab 	Swasta
---	--------------------	--	--------

Sumber: Buku Memori Rehab UPT RSTS Tahun 2015

Tabel diatas membuktikan bahwa kegiatan resosialisasi bukan hanya mengembalikan fungsi sosial klien dalam bentuk praktek, namun UPT RSTS juga memiliki kegiatan resosialisasi di kelas.

Tahap selanjutnya ialah pendampingan klien. Tahap tersebut termasuk dalam *assesment*. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut yang menyampaikan,

“Pendampingan klien selama 120 hari itu memang ada. Itu termasuk dalam kegiatan *assesment*. Buat neglancarin hal itu, kita buat yang namanya bapak dan ibu asuh. Bapak ibu asuhnya ya karyawan UPT RSTS sendiri. Jadi kan *assesmet* itu sebagai pengungkapan dan pemahaman masalah. Jadi kita fasilitasi dengan adanya bapak dan ibu asuh itu. Biar mereka bisa cerita, minta pendapat ke bapak ibu asuhnya terkait mau ambil kelas jahit apa masak apa tata boga. Selain itu pendampingan dengan adanya bapak ibu asuh, kita bisa tau keadaan klien dirumahnya, keluarganya kayak gimana, *assesment* gak cuman itu-itu aja kok. *Assesment* itu berupa data yang harus kita tinjau terus dari masalah kesehatan, keadaan keluarga, jati diri klien,serta penilaian kita selama mereka disini hingga 120 hari” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti bahwa pendampingan klien dalam waktu seratus dua puluh hari digunakan sistem bapak dan ibu asuh untuk memastikan keadaan klien. Pendampingan klien tersebut termasuk dalam kegiatan *assesment* dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila Kediri. Berikut nama-nama bapak dan ibu asuh klien UPT RSTS Angkatan II Tahun 2016 UPT RSTS Kediri.

Tabel 7. Pembagian Bapak dan Ibu Asuh Angkatan Kedua Tahun 2016 UPT RSTS Kediri

Pengasuh: Endang R Anak Asuh: 1. Suryati 2. Ika F. 3. Siti M. 4. Dewi Atiyah 5. Winarsih 6. Tarwati	Pengasuh: Tia R. Anak Asuh: 1. Yuliatin 2. Sutini 3. Wiwin 4. Andriyanti 5. Jumaroh	Pengasuh: Sunarni Anak Asuh: 1. Siti Solekah 2. Dewi Anjar 3. Kosidah 4. Sunarmi 5. Suminten	Pengasuh: Efendi Anak Asuh: 1. Lamiyem 2. Indung 3. Elisa 4. Madelah 5. Siti	Pengasuh: Imam M. Anak Asuh: 1. Sutriani 2. Sulistyoyo 3. Tolasmah 4. Wahyuni 5. Nur Aini
Pengasuh: Dardiri Anak Asuh: 1. Putu Maya 2. Asriyah 3. Siti Kolifah 4. Sumiyar 5. Nurini	Pengasuh: Sumardiyono Anak Asuh: 1. Nita 2. Iin 3. Dewi 4. Rusminah 5. Manisih	Pengasuh: Sukmono Anak Asuh: 1. Retno 2. Ulfatul 3. Mona 4. Isti 5. Jamiyah	Pengasuh: Nongki Anak Asuh: 1. Arita K. 2. Fitri 3. Yuni 4. Nur F. 5. Monasri	Pengasuh: Kuncoro Anak Asuh: 1. Sumaiyah 2. Endang 3. Asmiati 4. Hanik 5. Mamik

(Sumber: Data Sie Pelayanan UPT RSTS Kediri)

Tabel diatas memberikan penjelasan, bahwa UPT RSTS terbukti memiliki bapak dan ibu asuh yang bertugas untuk *mengcontrol* dan bertanggung jawab atas klien yang disebut sebagai anak asuh. Sejalan dengan pendapat AY(L,55th) diatas, SN(P,50th) sebagai Staf Rehabilitasi dan Bina Lanjut serta sebagai Ibu Asuh Klien UPT RSTS menyampaikan,

“Fungsinya bapak ibu asuh itu buat kedepannya biar enak. Jadi saya punya anak 5 disini, ya mereka yang saya bimbing. Saya dekati, saya ajak

curhat. Jadi mereka terbuka. Keinginan buat berubah jadi lebih baik itu semakin tinggi. Selain itu sebagai pelengkap data yang ada di *form assesment* juga” (Wawancara 17 Mei 2016 08.30 UPT RST Kediri).

Mendukung pernyataan diatas, SN(P,50th) kembali memberikan pendapat,

“Jadi saya ibu asuhnya anak-anak yang harus saya urusin. Mereka saya tanyahi. Mau ikut bimbingan apa? Kelas apa? Masak, jahit, apa yang lain? Kalau diasudah punya jawaban, ya kita dukung penuh. Kalau mereka masih bingung, ya saya arahin. Kalau ada yang tidak mau ikut bimbingan juga saya kasih penjelasan. Kalau kamu gak ikut mau ngapain? Kita juga jalani tugas, gak bisa ngeluarin kamu dari sini. Pelan-pelan pasti mereka paham” (Wawancara 17 Mei 2016 08,30 UPT RSTS Kediri).

Penyataan tersebut memiliki arti bahwa keberadaan bapak dan ibu asuh sangatlah berpengaruh terhadap *assesment* seorang klien. Bapak dan Ibu asuh yang memberikan arahan seorang klien untuk mengikuti bimbingan yang diharapkan mampu merubah keadaan klien kedepanya. Memberikan pertanyaan dan arahan tersebut termasuk dalam memberikan studi kasus kepada klien.

Maksud dari studi kasus, SN(P,50th) sebagai Ibu Asuh memberikan penjelasan bahwa,

“Kalau studi kasus itu kan 12 kali yang ada di aturan UPT RSTS. Tapi itu minimalnya aja kalau bagi bapak dan ibu asuh. Kita gak mungkin mikirin studi kasus yang hanya 12 kali. Saya kasih kasus mau masuk apa? Terus kita tanyai kenapa alasannya, itu kan sudah termasuk studi kasus mas. Gak mungkin dalam 120 hari kita hanya menjalankan studi kasus cuman 12 kali” (Wawancara 17 Mei 2016 08.30 UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti bahwa studi kasus merupakan aturan yang sudah harus dijalankan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri yang minimal dilakukan sebanyak dua belas kali dalam jangka waktu 120 hari. Studi kasus melibatkan klien dengan pengasuh, sehingga pengasuh memiliki kedekatan emosional dengan klien dalam berjalanya program

pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Contoh studi kasus yang ada di UPT RSTS Kediri terkait pengambilan keputusan klien dalam mengikuti bimbingan, pemberian motivasi pengasuh dengan klien terkait berjalanya program yang ada di UPT RSTS Kediri.

Selanjutnya terkait bimbingan, pernyataan ST(L,55th) sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan

“bimbingan disini ini prosesnya. Ini yang membedakan dengan panti tuna susila yang ada di kota dan di kabupaten di Jawa Timur. Kalo yang lain itu cuma nampung saja, sambil nunggu UPT RSTS ada yang kosong baru dikirim kesini. Bimbingan ini ada 4 macam. Bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik, sama bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilannya ada 4 mas, jahit, rias pengantin, tata boga, sama salon rambut mas” (Wawancara 17 Mei 2016 14.00 UPT RSTS Kediri).

Pernyataan diatas memiliki arti bahwa bimbingan ini ialah proses inti dari program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Hal itu yang membuat perbedaan dengan panti tuna susila yang ada di seluruh Jawa Timur. Perbedaan tersebut mencakup panti tuna susila yang berada di Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Timur hanya menampung dan menunggu UPT RSTS ada yang kosong untuk di rehabilitasi di UPT RSTS. Bimbingan yang ada di UPT RSTS meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan. Pada bimbingan keterampilan terdapat empat macam bimbingan yaitu bimbingan jahit, rias pengantin, rias rambut, dan tata boga.

Selanjutnya untuk memperjelas pernyataan diatas, RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan berpendapat,

“Bimbingan ini ya proses programnya mas. Empat bimbingan yang ada disini itu terkait bimbingan mental, fisik, sosial, dan ketrampilan. Bimbingan mental, fisik, sosial kita mewajibkan klien untuk mengikuti

seluruh rangkaian yang diadakan dalam tiga bimbingan itu. Kalau bimbingan ketrampilan mereka harus pilih satu, bisa boga, tata busana, rias pengantin, maupun tata rias rambut atau salon. Waktunya untuk mengikuti seluruh bimbingan ini empat bulan atau seratus dua puluh hari” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti bahwa, bimbingan ini proses dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seluruh klien yang ada di UPT RSTS diwajibkan mengikuti bimbingan yang ada di UPT RSTS. Terkait bimbingan keterampilan, klien diwajibkan memilih satu diantara empat bimbingan keterampilan yang disediakan. Waktu bimbingan yang digunakan di UPT RSTS selama empat bulan.

Selanjutnya dalam UU nomor 11 taun 2009 pada bab 1 pasal 1 ayat 3, 4, 6 menjelaskan mengenai tenaga pendidik. Pasal 3 menjelaskan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada ayat 4 menjelaskan, Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Ayat 6 menjelaskan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

UPT RSTS mengacu pada UU nomor 11 tahun 2009 tersebut untuk memilih tenaga pendidik atau *instruktur* dalam mengisi bimbingan. Sesuai dengan penjelasan diatas, RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan menyampaikan

“*Instrukturnya* kita gak langsung masukin sembarang orang mas, kita ngacu ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Disitu ada penjelasannya kok mas, siapa saja instruktur atau tenaga ahlinya yang buat ngisi bimbingan dalam panti rehabilitasi. Jadi kita ngikutin aturan mas” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, bahwa dalam pemilihan instruktur yang ada di UPT RSTS Kediri mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2009. UPT RSTS memiliki acuan dalam penyelenggaraan bimbingan dengan memilih *instruktur* dengan menganut pada UU tersebut.

Selanjutnya terkait paket stimulan, AY(P,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut menyampaikan,

“Paket stimulan itu paket untuk klien yang kita sediakan sesuai dengan bimbingan ketrampilan yang mereka ikuti. Jadi kalau ikut ketrampilan jahit ya kita siapkan mesin jahit dan bahan serta alat kebutuhan jahit. Hal itu bertujuan untuk melanjutkan ketrampilan klien diluar UPT RSTS, sehingga tidak balik kayak dulu lagi” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya paket stimulan merupakan paket yang disiapkan oleh UPT RSTS untuk seluruh klien terkait ketrampilan yang telah diikuti oleh klien selama masa rehabilitasi.

Penjelasan pemulangan klien tersebut dijelaskan oleh AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut yang berpendapat,

“Jadi pemulangan itu kita lakukan dengan mengembalikan ke daerah asalnya dibarengi oleh pengasuhnya. Jadi semisal dari daerah A ada 5 klien, kita sewa mobil penumpang dan mobil pengangkut barang stimulan untuk ke daerah A itu. Hal itu kita lakukan dengan alasan paket stimulan dan klien sampai kerumah keluarganya. Takutnya kalau mereka

pulang sendiri, paket ditengah jalan dijual dan klien melakukan pekerjaan lamanya lagi” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya pemulangan klien kedaerah masing-masing dilakukan oleh UPT RSTS dengan mengikut sertakan pengasuh klien untuk mengawasi klien dan paket stimulan sampai ke tujuan.

Terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama enam kali oleh UPT RSTS Kediri yang berhubungan dengan data *assesment*, kegiatan penyaluran, bina lanjut, evaluasi, dan pengakhiran. Hal itu disampaikan oleh ST(L,55th) sebagai Kepala Sub Bagian TU yang menyampaikan,

“Jadi monitoring dan evaluasi itu berkaitan dengan banyak kegiatan. Untuk memonitoring, ada kegiatan yang namanya *home visit*. Kegiatan *home visit* itu dilakukan saat bimbingan ketrampilan berjalan. Pemulangan klien juga termasuk dalam monitoring keadaan keluarga Setelah itu penyaluran, itu yang kita kunjungi berdasarkan keahlian klien selama direhabilitasi disini. Ada lagi yang namanya bina lanjut pertama, itu dilakukan setelah pemulangan klien selama satu tahun. Terus bina lanjut kedua, itu kegiatan mengunjungi eks klien kita diatas waktu satu tahun rehabilitasi dinyatakan selesai. Ada lima cara monitoring kita kepada klien yang berjalan selama 2 tahun 4 bulan. Terus satu kali evaluasi di waktu pengakhiran, semua data *assesment* kita kumpulkan dan kita bukukan. Terus kita evaluasi apa saja kurangnya dalam program pelayanan dan rehabilitasi angkatan itu. Setelah kita evaluasi, kita masuk pengakhiran yang kita serahkan kepada dinsos Jatim” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya tahap monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan assesment, penyaluran, bina lanjut, evaluasi, dan pengakhiran. Monitoring pertama dilakukan oleh UPT RSTS pada saat klien dalam tahap rehabilitasi. Monitoring kedua ketika masuk dalam tahap pemulangan klien, Monitoring ketiga saat diadakan penyaluran, Karyawan UPT RSTS melakukan kunjungan ke rumah klien untuk menawarkan pekerjaan yang dilihat dari data assesment ketika masa rehabilitasi. Monitoring keempat ialah bina lanjut pertama, karyawan UPT RSTS melakukan

kunjungan kerumah klien dengan tujuan mengecek kondisi klien pasca setahun direhabilitasi. Monitoring kelima ialah bina lanjut kedua yang dilakukan oleh karyawan UPT RSTS dalam waktu diatas satu tahun pasca rehabilitasi. Lima kegiatan monitoring tersebut dilakukan evaluasi dan dibukukan untuk diserahkan kepada dinsos Jatim untuk masa pengakhiran.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Pasal 63 Poin b menerangkan pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut. Pada poin c menerangkan tentang penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial.

b. Sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila

Sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila ialah WTS. Hal itu didukung oleh pernyataan RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan bahwa,

“Sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial ialah tuna susila yang *bergender* wanita. Biasanya disebut WTS. Kalau masyarakat bisa juga nyebutnya PSK. Perlu diketahui juga mas, kalau UPT RSTS ini tidak ikut menjalankan razia atau berburu WTS buat ikut program disini. Semua klien kita disini full kiriman dari razia yang dilaksanakan oleh dinsos daerah dan aparat daerah masing-masing” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti bahwa sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ada di UPT RSTS ialah WTS. Klien tersebut merupakan WTS hasil razia yang dilaksanakan oleh dinsos daerah dan aparat daerah masing-

masing. UPT RSTS Kediri tidak ikut campur dalam mencari klien. Pernyataan di atas didukung oleh AY(P,55th) selaku Kasie Rehab dan Binjut bahwa,

“Sasaranya program ini itu wanita tuna susila, bisa pekerja buat lelaki hidung belang, bisa yang punya anak-anak di tempat kerjanya, pokoknya wanita tuna susila. Sedangkan kita gak ikut razia atau gimana mas. Itu kewenangan dari dinsos kota dan kabupaten setempat, kita tinggal menerima dan memberikan bimbingan saja mas” (Wawancara pada 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Dua pernyataan di atas dapat diartikan bahwa klien di UPT RSTS ialah WTS yang dijaring atau dirazia oleh gabungan dari dinsos kota atau kabupaten di Jawa Timur, beserta satuan polisi pamong praja daerah. Klien yang ada dalam UPT RSTS merupakan klien kiriman dari setiap daerah yang melaksanakan razia WTS.

Dua pendapat di atas diperkuat oleh klien UPT RSTS Kediri yang mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. STI(P,36th) sebagai klien UPT RSTS Kediri memberikan pendapat bahwa,

“Saya kerjanya jaga di waung kopi mas, kerjanya ya gitu lah mas. Nemenin tamu laki-laki yang datang ke warung kopi itu. Gak cuman buatin kopi sama minuman terus tak tinggal mas, ya aku nemenin ngomong-ngomong juga. Pokoknya aku yang nemenin mereka biar mereka ngerasa seneng terus balik lagi ke warung mas.” (Wawancara 19 Mei 2016 10.15 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan di atas memiliki arti bahwa pekerjaan STI(P,36th) ialah sebagai penjaga warung kopi yang bertugas membuat minuman tamu dan menemani tamu sebagai lawan bicara dan membuat pelanggan merasakan puas. Hal tersebut bertujuan untuk membuat pelanggan warung kopi merasakan betah dan berkeinginan singgah kembali ke warung kopi. Selanjutnya WI(P,29th) sebagai klien UPT RSTS Kediri juga berpendapat bahwa,

“Aku kerjone pindah-pindah mas. Bien iku kerjone nang moroseneng sing nang perbatasan Gresik sama Surabaya iku loh mas. Terus kan

panggon kui kui podo ditutupi karo pemerintah. Aku yo ngaleh, nggolek panggon liane. Akhire aku jogo warung remang-remang nang Mojokerto mas. Kerjone yo hampir podo karo sing bien, cuman nek nang warung aku nggawekno ngombe sek, terus engkok mamiku nawakno aku. Nek cocok yo melbu nang kamarku mas” (Wawancara 19 Mei 2016 12.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti bahwa WI(P,29th) bekerja di lokalisasi Moroseneng. Lokalisasi yang berada di perbatasan Kabupaten Gresik dengan Kota Surabaya. Akibat dari kebijakan Pemerintah untuk menutup lokalisasi, WI(P,29th) beralih tempat di warung remang-remang di Mojokerto. Pekerjaan tersebut memiliki kesamaan sebagai bisnis porstitusi atau jual diri.

Selanjutnya pada UU nomor 11 tahun 2009 tentan kesejahteraan sosial pada bab III penyelenggaraan kesejahteraan sosial pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

UPT RSTS memiliki kegiatan assesment untuk melihat sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi tuna susila tepat sasaran, Hal itu sesuai dengan pernyataan RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan yang berpendapat,

“Kita disini ada *assesment*. Jadi *assesment* itu perannya pengasuh untuk memastikan bahwa klien itu benar-benar WTS. Caranya lewat personal dari pengasuh. Diajakin cerita, diajakin makan bareng di halaman asrama, intinya mengorek-ngorek klien kita. Itu buat memastikan. Kalau klien kita itu benar-benar WTS” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa untuk melihat sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial ini ialah WTS dan tidak salah sasaran. Kegiatan *assesment* digunakan sebagai cara untuk melihat latar belakang klien secara pasti.

Gambar 8. Sasaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Penanganan Anak Terlantar dalam Pengembangan Kota Layak Anak, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan anak terlantar
 - Perlindungan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus melalui RPSA
 - Pelayanan Rehabilitasi bagi Anak Jalanan
 - Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban NAPZA
 - Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)
- Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasarakatan
 - Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan
 - Rehabilitasi Sosial Pengemis
 - Rehabilitasi Sosial eks Tuna Susila
- Penanganan dampak sosial HIV/AIDS
- Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat
 - Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
 - Pelayanan Rehabilitasi Sosial eks Psikotik
 - Pelayanan Rehabilitasi Sosial Eks Penyandang Kusta/Lara Kronis

Sumber: Draft Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Gambar diatas menjelaskan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial di dinas sosial Provinsi Jawa Timur meliputi rehabilitasi sosial tuna susila meliputi rehabilitasi sosial bekas warga binaan permasyarakatan, gelandangan, pengemis, dan eks tuna susila.

c. Partisipasi Instruktur dan WTS dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila

Terkait partisipasi klien dan *instruktur*, ST(L,55th) sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT RSTS Kediri berpendapat bahwa,

“Partisipasi keduanya bagus, Pelatih ya pasti hadir terus kok, kalo mereka gak hadir ada kegiatan pasti ada pemberitahuan dan nanti minta ganti atau minta tambahan waktu biasanya mas. Kalo klien partisipasinya mereka juga tinggi mas, bahkan kalo ada yang sakit mereka juga masih mengikuti bimbingan. Alesanya males sendirian di kamar. Jadi kesimpulanya hadir terus mas, kan ada absen juga” (Wawancara 17 Mei 2016 14.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan diatas juga didukung oleh RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan yang menyampaikan pernyataanya tentang partisipasi instruktur dan klien seperti berikut,

“Partisipasi klien disini itu tinggi. Semua *sesion* kita mewajibkan harus semua ikut. Hukumnya wajib, wajib. Setiap *sesion* itu ada absen. Kalo 3x dia tidak ikutin, kami panggil. Jadi kita liat dari absenya. Mereka bilanganya kayak sekolah. Sedangkan kalo partisipasi instruktur ya gak perlu ditanya mas, mereka juga sudah kontrak sama kita, ada duitnya juga. Ya gak mungkin kalo mereka gak hadir. Bahkan kalo gak hadir, biasanya mereka minta nambah waktu atau ganti hari” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya pihak UPT RSTS menilai partisipasi instruktur dan klien sangatlah tinggi. Partisipasi klien dibuktikan dengan keadaan klien yang sakit masih mengusahakan ikut bimbingan. Selain itu klien juga melihat absen, sehingga takut ketika tidak mengikuti bimbingan. Sedangkan partisipasi instruktur dibuktikan dengan ketepatan waktu instruktur dalam mengisi bimbingan. Kehadiran instruktur dalam memberikan bimbingan, beserta bagaimana instruktur mengganti jawal ketika berhalangan hadir dan ijin. Berikut nama-nama instruktur yang mengisi bimbingan di UPT RSTS Kediri

Tabel 8. Nama Instruktur dan materi yang diberikan di UPT RSTS

No	Nama	Materi
1	Aibtu Sri Widiati Polsek Kecamatan Mojororoto Kediri	KAMTIBMAS
2	Zainal Arifin, S.Ag Kemenag Kota Kediri	Pendidikan Agama
3	Karyono, S. Sos DINSOSNAKERDUK Kota Kediri	Dinamika Kelompok
4	Ahmad Mufid Ponpes Lirboyo Kediri	Belajar Sholat dan Mengaji
5	Meissy Suryaningrum Sanggar Padma Surya Kediri	Tata Boga
6	Sri Sulastri PKK Kel. Campurejo Kediri	Bordir
7	Uud Istri Utami Salon Astri Tamanan Kediri	Tata Rias Rambut
8	Suprapti Widya Collection Kediri	Kerajinan Tangan
9	Imron Rosyadi Imron Taylor Kediri	Tata Busana
10	Ny. Badriah Thamrin Salon Diana Sari Campurejo Kediri	Tata Rias Pengantin
11	Ismu Jayanti Widya Elektion Kediri	Kesenian
12	Wiwik Sanggar Senam Wiwik Kediri	Olahraga/Senam
13	Yusron LSM Dimar Kota Kediri	Bimbingan HIV/ AIDS
14	Puji Rahayu	Budi Pekerti/ Etika

Sumber: Buku Memori Rehab UPT RSTS Kediri Tahun 2015

Nama pendidik diatas merupakan nama instruktur bimbingan mental, sosial, fisik, dan keterampilan. Insruktur tersebut bercampur dari seseorang yag terikat dengan lembaga pemerintahan, wiraswasta, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Selanjutnya terkait partisipasi dari *instruktur* atau pelatih yang mengisi bimbinganan klien, pendapat pertama disampaikan oleh MY(P,40th) sebagai *instruktur* tata boga beperndapat bahwa,

“Melihat partisipasi dari klien disini itu tinggi mas, mereka hadir terus, selain gara-gara absensi bilanganya sih kalo gak ikut nganggur ya mau

ngapain. Terus dibuktikan waktu saya kasih resep masakan, mereka antusias catatnya mas. Kalo cara prakteknya mereka juga antusias, setiap sesi kelas pasti mereka saya suruh tanya. Ternyata banyak juga yang nanya, sekedar resepnya ini kalo dibuat pedes, dll bagaimana? Kalo partisipasi instruktur, kita pelatih keterampilan saling ngelengkapin mas. Jadi saya dan pak Imron pelatih jahit juga kenal, kita saling diskusi gimana cara ningkatin motivasi mereka, gimana cara ngewanti ngewanti mereka biar kapok kayak gitu. Disisi lain kalo ngisi kelas ya kita selalu tepat waktu mas, kalo telat ya kita minta nambah waktu” (Wawancara 18 Mei 2016 11.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh instruktur ketrampilan tata rias rambut yaitu UD(P,40th) yang memberikan pendapat bahwa,

“Partisipasi klien disini tinggi, saya kan sudah 2 tahun disini. Jadi sudah ada 6 angkatan yang saya berikan bimbingan. Mereka kalo ikut kelas juga selalu hadir semua, banyak tanya tentang alat-alat salon rambut. Sampe kadang-kadang kalo guru jahit terlambat atau gak bisa masuk. Anak-anak kelas lain ya ada yang ikut kelas saya mas. Ya saya malah senang, mereka gak ganggu yang lain kok. Tapi juga ikutin pelajaran. Kalo partisipasi instruktur, saya profesionala mas. Saya nagajar minimal harus tepat waktu, kalo gak hadir saya harus minta ganti hari atau nambah jam. Selain itu saya juga selalu *welcome* kesemua klien disini. Masalahnya mereka itu butuh teman cerita orang yang bisa dipercaya disini. Yang penting mereka mau berubah, saya rela ngeluwangin waktu lebih buat mereka” (Wawancara 18 Mei 2016 12.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Kedua pendapat diatas memiliki arti bahwa partisipasi klien sangat tinggi, dibuktikan dengan antusias klien yang selalu mengikuti kelas secara rutin. Partisipasi klien yang selalu bertanya. Selain itu klien UPT RSTS memiliki semangat yang tinggi, dibuktikan jika kelas lain kosong, terdapat anggota kelas lain yang mengikuti keterampilan kelas lain. Selain itu partisipasi *instruktur* juga dikatakan tinggi. Untuk membuat partisipasi klien semakin tinggi para *instruktur* saling berdiskusi untuk memotivasi anak-anak setiap kelasnya. Setiap pertemuan juga diharapkan memberikan masukan sehingga mereka gerah untuk bekerja seperti sebelumnya. Menjadi teman cerita klien juga merupakan tugas instruktur

untuk terus merubah kehidupan klien untuk lebih baik lagi. Selain itu, dari sisi profesionalisme *instruktur* dikelas, *instruktur* memiliki sikap tidak terlambat dalam memberikan materi dan memberikan waktu ganti ketika tidak dapat hadir.

Pernyataan diatas mengenai partisipasi klien dan instruktur didukung kembali oleh beberapa instruktur bimbingan yang lain. Salah satunya ialah pendapat ABD(L,40th) selaku bimbingan mental yang menyatakan,

“Saya disini ini sebagai imam sholat hari senin kamis mas, saya pasti hadir terus. Setiap sholat Senin Kamis saya wajib hadir pokoknya. Selain itu saya ngenalin diri ke klien ini, saya kasih nomor saya. Biar mereka bisa cerita, minta pendapat. Ternyata sampe sekarang klien-klien yang dulu juga masih sering sms saya. Bilang sudah tidak kembali lagi seperti dulu, saya sekarang buka warung makan, ada yang kerja ditempat catering. Ngucapin makasih. Ada juga yang tanya tentang agama ke saya mas. Jadi silaturahmi klien dengan pembimbing alhamdulillah gak mutus. Kalo partisipasi klien disini, tadi kan masnya ngeliat kan, waktu kita istighosah mbak-mbaknya pada nangis. Waktu saya doa mereka banyak yang nangis, ingat dosanya mereka. Kehadiran mereka juga selalu hadir kecuali yang halangan sholat saja. Kalo istighosah mereka juga saya suruh ikut semua mas, kalo yang halangan saya suruh duduk disamping-samping masjid kayak tadi. Alhamdulillah ternyata selama ini mereka nurut saja mas” (Wawancara 19 Mei 2016 13.10 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan diatas merupakan bukti bahwasanya kegiatan bimbingan mental tetap diikuti oleh seluruh klien UPT RSTS. Mengenai partisipasi klien dapat dilihat dari kehadiran klien yang tidak pernah absen dalam kondisi apapun kecuali berhalangan sholat. Selain sholat, terdapat kegiatan istighosah yang selalu diikuti oleh klien UPT RSTS setiap hari senin dan kamis. Kegiatan tersebut juga selalu diikuti oleh klien UPT RSTS. Partisipasi klien juga dapat dilihat ketika klien terharu serta menangis merasa malu dengan dosa yang telah dibuat. Disisi lain partisipasi instruktur dilihat dari kedekatan dengan klien. Hal itu dibuktikan dengan instruktur mental yang meberikan nomor hpnya untuk keperluan

silaturahmi dan saling berkomunikasi dengan klien UPT RSTS. Selain itu partisipasi instruktur dapat dilihat dengan kehadirannya yang selalu hadir ketika dibutuhkan dan selalu mengisi kelas atau tanggung jawabnya di UPT RSTS.

Klien UPT RSTS yaitu WI(P,29th) menyampaikan terkait partisipasi klien dan instruktur di UPT RSTS Kediri,

“Gurune iku nek ngajari enak mas, kan aku melu jahit. Jadi diajari sek, de’e disik sing ngekei contohe. Terus kene dikongon coba. Nek gawe cerito-cerito iku guru-gurune enak mas. Ngerungokno, ngekei saran sisan gawe masalah-masalah kene. Sabar sisan guru-gurune. Nek aku dewe yo pasti melu terus nek jahit mas, sholat, istighosah yo melu. Nek sholat kecuali mens tok aku gak melu. Nek kelas kelas liane yo teko mas, kadang-kadang ngantuk yo tak belani teko. Nek gak teko iku sungkan nang konco-konco liane mas” (Wawancara 19 Mei 2016 12.00 WIB UPT RSTS Kediri)

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa WI(P,29th) merupakan klien yang mengikuti bimbingan jahit. *Instruktur* jahit memberikan contoh terlebih dahulu dalam memberikan bimbingan, sehingga klien mudah memahami dan mudah dimengerti. Selain itu *instruktur* memiliki kedekatan emosional dengan klien, sehingga tidak jarang instruktur sebagai tempat bercerita klien. Selain itu WI(P,29th) juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan jahit, bimbingan mental berupa sholat berjamaah dan istighosah. WI(P,29th) juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengikuti sholat berjamaah ketika berhalangan atau datang bulan. Pada kelas lain atau bimbingan yang lain WI(P,29th) selalu hadir, ketika tidak hadir WI(P,29th) merasakan malu dengan teman-teman klien yang lain.

RS(P,44th) sebagai klien UPT RSTS Kediri juga ikut menyampaikan pendapat yang sama yaitu,

“Aku ikut terus mas, gak pernah absen. Mau rias mau sholat lanjut terus mas, kecuali waktu mens tok, senam, piket dapur, asrama dll pasti ikut. Kalo mau gak ikut itu gak enak sama teman-teman mas, sungkan. Harus rukun sama yang lain. Terus kalo gurunya ya hadir mas, kalo gak hadir pasti dikabari satu hari sebelumnya. Gurunya enak kalo ngajar mas, sabar telaten banget” (Wawancara 19 Mei 2016 11.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan diatas memiliki arti bahwa RS selalu mengikuti bimbingan yang ada di UPT RSTS dari bimbingan keterampilan, bimbingan mental. RS berpendapat bahwa dirinya merasa malu jika tidak mengikuti kegiatan yang ada. Sedangkan instruktur bimbingan bersifat sabar dan ulet dalam memberi bimbingan.

Terkait partisipasi klien dan *instruktur* yang ada di UPT RSTS Kediri, absensi *instruktur* dan klien dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 9. Absesnsi Klien Bimbingan Tata Boga Angkatan Kedua Bulan Mei UPT RSTS Kediri

DAFTAR HADIR KLIEN

BIMBINGAN : KETRAMPILAN TATA BOGA
 BAGIAN BULAN : Angkatan II / 2016 Bulan Mei 2016
 PUKUL : 09.45 – 12.00 WIB

NO	NAMA	TANGGAL														
		2	3	4	5	10	11	12	16	17	18	19	23	24	25	26
1.	Pute Maya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Sabriyani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Sueliyah/suher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Bijarwati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Lisbu Megawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Aritu K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Siti Sholikhah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Reno Marb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Juliah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Sumayah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Krasitza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Sih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Fiteri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Talalmah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.	Mursani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16.	Hanik m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17.	Manisih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18.	Khosidah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19.	Sumrar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20.	Wahyuni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21.	Andriyanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22.	Lamiyem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23.	Jumarah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24.	Suyati./Iaras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25.																

Sumber: Data Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut UPT RSTS Kediri

**Gambar 10. Absensi Instruktur Bimbingan Tata Boga Angkatan
Kedua Bulan Mei UPT RSTS Kediri**

DAFTAR HADIR INSTRUKTUR KE-TRAMPILAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA KEDIRI
ANGKATAN 1
BAGIAN BULAN 1

NO.	NAMA	JAM	TANGGAL	INSTANSI/ALAMAT	BIDANG STUDY	MATERI YANG BERHASIL	TANDA TANGAN
1.	Messy. S	09.30 - 11.45	2/5 '16	Sanggar Kadon Kediri	Tata Boga	Pertemuan	
2.	Messy. S	09.30 - 11.45	3/5 '16	- - -	- - -	Bahan Makanan	
3.	Messy. S	09.30 - 11.45	4/5 '16	- - -	- - -	Ohn Tawabk Bangay	
4.	Messy. S	09.30 - 11.45	9/5 '16	- - -	- - -	POKJ n' resep	
5.	Messy. S	09.30 - 11.45	10/5 '16	- - -	- - -	Reze kue lempeng sanggau	
6.	Messy. S	09.30 - 11.45	12/5 '16	- - -	- - -	Kue Lemper	
7.	Messy. S	09.30 - 11.45	16/5 '16	- - -	- - -	Atas dan resep	
8.		09.30 - 11.45	17/5 '16	- - -	- - -	Kue Lemper sanggau	

Kediri, 2016
KASIE REHABILITASI DAN BINTU

MENGETAHUI
KEPALA UPT REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA
KEDIRI

Dr. TINI WIDHATLAMI
NIP. 19600929 198603 2 011

Dr. ABAD YANU
NIP. 19600110 198003 1 003

DAFTAR HADIR INSTRUKTUR KE-TRAMPILAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA KEDIRI
ANGKATAN 1
BAGIAN BULAN 1

NO.	NAMA	JAM	TANGGAL	INSTANSI/ALAMAT	BIDANG STUDY	MATERI YANG BERHASIL	TANDA TANGAN
1.	Messy. S	09.30 - 11.45	2/5 '16	Sanggar Kadon Kediri	Tata Boga	Pertemuan	
2.	Messy. S	09.30 - 11.45	3/5 '16	- - -	- - -	Bahan Makanan	
3.	Messy. S	09.30 - 11.45	4/5 '16	- - -	- - -	Ohn Tawabk Bangay	
4.	Messy. S	09.30 - 11.45	9/5 '16	- - -	- - -	POKJ n' resep	
5.	Messy. S	09.30 - 11.45	10/5 '16	- - -	- - -	Reze kue lempeng sanggau	
6.	Messy. S	09.30 - 11.45	12/5 '16	- - -	- - -	Kue Lemper	
7.	Messy. S	09.30 - 11.45	16/5 '16	- - -	- - -	Atas dan resep	
8.		09.30 - 11.45	17/5 '16	- - -	- - -	Kue Lemper sanggau	

Kediri, 2016
KASIE REHABILITASI DAN BINTU

MENGETAHUI
KEPALA UPT REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA
KEDIRI

Dr. TINI WIDHATLAMI
NIP. 19600929 198603 2 011

Dr. ABAD YANU
NIP. 19600110 198003 1 003

Sumber: Data Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut UPT RSTS Kediri

Selanjutnya dalam proses bimbingan, UPT RSTS memberikan hak kepada instruktur untuk memberikan materi yang akan diajarkan kepada klien. Hal tersebut juga dinyatakan oleh ST(L,55th) “Jadi kalo panduan kita gak punya mas, yang ada mereka buat kurikulum yang akan diajarkan dan diserahkan ke bagian rehab” (Wawancara 17 Mei 2016 14.00 WIB UPT RSTS Kediri). Pernyataan ST(L,55th) didukung oleh ABD(L,40th) selaku instruktur bimbingan mental yang menyatakan, “Saya buat apa ya namanya, sejenis apa yang saya isi mas. Jadi saya senin ini mau ngisi diba’an, kamis yasinan, senin depan istigosah. Itu saya buat terus saya serahkan ke staf bagian rehabilitasi” (Wawancara 19 Mei 13.10 WIB UPT RSTS Kediri). MY(P,40th) selaku *instruktur* tata boga menyampaikan,

“Saya buat materi pembelajaran mas, kayak sekolah kan? Jadi saya minggu depan mau masak apa aja. Ya saya buat laporan saya serahkan ke pak Abad. Terus saya kasih bahan-bahanya juga apa aja yang harus disiapkan. Jadi saya gak ikut belanja, karyawan yang menyiapkan” (Wawancara 18 Mei 2016 11.00 UPT RSTS Kediri).

Tabel 9. Materi Instruktur tata boga

No	Materi yang diberikan	Jumlah Peserta	Hasil yang idharapkan
	Aneka cemilan goreng : (Stik renyah, keripik bawang, kelanting keju, pastel abon). Aneka kue basah goreng : (risoles, pastel, crackers, roket) Kue basah kukus : (bolu kukus, putu ayu,kue talam, mendut, nagasari) Aneka cake : (cake tape, cake ketan hitam, cake marmer, cup cake)	24 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Klien dapat memahami dan mampu untuk / mempraktekkan langsung semua. • Materi yang diberikan instruktur baik untuk keperluan diri keluarganya atau untuk dijual sebagai sumber mata pencaharian.

Sumber: Buku Memori Rehab UPT RSTS Tahun 2015

Tabel 10. Materi instruktur tata busana

No	Materi yang diberikan	Jumlah Peserta	Hasil yang diharapkan
	Teori dan praktek membuat pola rok di kertas kotan Teori dan praktek membuat rok di kait.	7 orang	Klien engenal dan dapat menggunakan alat-alat dalam menjahit. Klien memiliki ketrampilan di bidang penjahitan, sehingga dapat dijadikan mata pencaharian

Sumber: Buku Memori Rehab UPT RSTS Tahun 2015

Penjelasan tabel diatas merupakan contoh tabel materi yang diberikan oleh instruktur dalam jangka sebulan. Contoh diatas merupakan materi dalam satu bulan yang diberikan oleh instruktur tata boga dan tata busana.

Mengenai partisipasi *instruktur* dalam kegiatan resosialisasi disampaikan oleh AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut yang menyatakan,

“Partisipasi *Instruktur* dan klien kalau resosialisasi gak ada yang masalah itu mas. Sama dengan bimbingan yang lain. Tinggi bagi saya. Kehadiran kalo karyawan yang ngisi gak pernah saya masalahkan. Kalo yang dari dalam gak ada yang ngisi jelas langsung ditegur sama kepala UPT RSTS Kediri. Kalo yang dari luar, contohnya dari dinsos kota Kediri pasti hadir tepat waktu. Dari LSM-LSM juga gak mungkin kalo gak hadir, meskipun mereka gak dibayar. Ibaratnya relawan. Tapi mereka selalu hadir. Kalo gak hadir pasti ada pemberitahuan, nanti langsung kita ganti kelasnya dari karyawan buat ngisi” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya partisipasi instruktur tidak diragukan dalam partisipasinya. Instruktur selalu hadir tepat waktu dalam kegiatan resosialisasi. Adapun instruktur dari karyawan UPT RSTS jika tidak hadir dalam mengisi materi di kegiatan resosialisasi, maka akan ditegur langsung oleh kepala UPT RSTS. Pengisi materi resosialisasi diluar karyawan UPT RSTS ialah LSM yang tidak dibayar oleh UPT

RSTS. LSM juga selalu hadir tepat waktu meskipun tidak dibayar oleh UPT RSTS Kediri.

d. Tujuan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila

Tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila dalam *liflet* resmi UPT RSTS Kediri tahun 2015 ialah menuntaskan masalah tuna susila khususnya pada wanita. Mengutip tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial pada profil UPT RSTS Kediri di *liflet* resmi tahun 2015 yang menyampaikan tercapainya kembali pemulihan harga diri, tanggung jawab sosial serta tumbuhnya kemauan dan berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu terdapat satu poin lagi yang menjadi tujuan program ini ialah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya WTS dan dapat serta membina eks WTS. Tujuan tersebut didukung oleh AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut yang menyatakan,

“Kalau kita bicara tentang tujuan program ini jelas mas, kita membina WTS agar mampu menghidupkan kembali nilai sosialnya. Nilai sosialnya yang kita maksud itu mereka jualan secara wajar, bekerja secara layak. Disamping itu tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial disini membuat WTS sadar akan apa yang dikerjakan itu telah salah. Setelah mereka keluar dari sini, mereka bisa mengandalkan keterampilan yang mereka miliki. Kalau buat pemerintah tujuan adanya program ini ya biar WTS yang ada di Jawa Timur bisa dikurangi jumlahnya” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan diatas memiliki arti bahwa tujuan dari program pelayanan dan rehabilitasi sosial memiliki tujuan untuk mengembalikan nilai sosial pada klien.

Maksud dari nilai sosial ialah mengembalikan fungsi sosial klien untuk bekerja secara layak. Selanjutnya tujuan dari program ini mencegah klien untuk kembali

kepermasalahan yang ada. Pemerintah juga memiliki tujuan dalam program ini untuk membina WTS sehingga mendapatkan kelayakan dalam pekerjaan dan mengurangi jumlah WTS yang berada di wilayah Jawa Timur. RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan juga menyampaikan,

“Kalau tujuannya jelas lah mas, biar mereka bisa kembali diterima oleh masyarakat dan memiliki ketrampilan serta keahlian yang memadai. Masyarakat kalau sudah tau dia seorang WTS pasti didaerahnya orang itu dikucilkan. Lah tujuan program ini biar masyarakat percaya kalau anak itu sudah memiliki kemampuan untuk mencari rizki yang halal” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS ini menjadikan WTS yang telah dibina dapat kembali ke masyarakat dengan bekal ketrampilan yang sudah dimiliki. Keadaan masyarakat selalu menolak ketika telah mengetahui anak tersebut bekerja sebagai WTS. Tujuan programnya mengantarkan mereka kembali ke masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya pernyataan klien terkait tujuan program pelayanan dan rehabilitasi disampaikan oleh RS(P,44th) yang berpendapat bahwa, “Kapok pokoknya mas, udah gak mau gitu lagi. Setelah ini aku mau buka rias pengantin sama panti pijet tapi khusus wanita mas. Biar dikit-dikit yang penting halal (Wawancara 19 Mei 2016 11.00 WIB UPT RSTS Kediri). WI(P,29th) sebagai salah satu klien juga memberikan pernyataanya,

“Tujuane yo onok mas, aku gak iso jahit dadi iso jahit saiki. Mene nek wes metu tekan kene, aku yo pengen balik nang Banyuwangi buka warung kopi ae mas. Tapi sing gak atek plus plus. Daripada dirazia maneh. Terus jahit iki yo tak gawe sambian, kan gak mungkin bendino onok uwong jahit mas. Aku yo iso rajin sholat, biasa tangi isuk saiki” (Wawancara 19 Mei 2016 10.10 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa WI(P,29th) yang awalnya tidak memiliki kemampuan menjahit, sekarang memiliki kemampuan menjahit. Tujuan lain disampaikan oleh WI(P,29th) ketika telah keluar dari UPT RSTS Kediri, dirinya akan membuka warung kopi di daerahnya yaitu Banyuwangi. Keahlian jahit yang didapatkan di UPT RSTS tetap difungsikan sebagai kerja sampingan, dengan alasan tidak semua orang menjahit setiap hari. WI(P,29th) juga menyampaikan bahwasanya dirinya jadi rajin sholat dan bangun pagi ketika berada di UPT RSTS Kediri.

Terkait tujuan yang ada dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri, AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut menyampaikan

“Tujuan dalam program ini sudah terlaksana dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya klien kita yang sudah punya pekerjaan yang layak, dan tidak kembali ke pekerjaan dahulunya sebagai WTS. Klien kita banyak yang bilang kapok buat kerja gitu lagi. Ingat waktu direhabilitasi disini. Tapi kalau diminta data terkait klien kita telah bekerja ditempat lain atau tidak melakukan pekerjaan yang dulu lagi kita adanya di lembar bina lanjut” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti bahwa tujuan yang ada dalam program pelayanan dan rehabilitasi telah berjalan secara baik, terbukti dengan adanya klien yang menyatakan insaf setelah bekerja sebagai WTS. Data yang menyebutkan adanya klien UPT RSTS tidak melakukan pekerjaan seperti dulu tertuai pada lembar bina lanjut.

e. Manfaat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila

Mengenai manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila, ST(L,55th) sebagai Kepala Tata Usaha menyampaikan,

“Manfaatnya dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial disini didukung oleh beberpa kegiatan mas. Manfaat langsung yang bisa didapatkan klien memiliki modal yang terdiri dari ketrampilan dan alat beserta bahan untuk mengembangkan ketrampilan yang dia miliki. Manfaat yang bisa didapat dalam waktu satu tahunan klien dapat mengembangkan skill dan keahlian yang telah mereka latih disini, selain itu mereka memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Manfaat jangka panjangnya kita bilang mereka dianggap sebagai masyarakat yang mampu bangkit dan beradaptasi dengan masyarakat” (Wawancara 17 Mei 2016 14.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya manfaat yang dapat diperoleh oleh klien terbagi menjadi tiga manfaat. Pertama manfaat secara langsung, klien memiliki bekal yang terdiri dari ketrampilan dan bahan serta alat (paket stimulan) yang dapat mengembangkan ketrampilan yang dimiliki klien. Manfaat yang kedua ialah dalam waktu satu tahun, manfaatnya klien dapat mengembangkan skill dan keahlian yang dimiliki klien sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Manfaat yang ketiga ialah manfaat jangka panjang yaitu klien mampu beradaptasi dan diterima oleh masyarakat tanpa memikirkan kedudukan sosial klien dahulu.

Selanjutnya RWA(P,52th) Sebagai Kepala Pelayanan berpendapat,

“Manfaatnya ada yang bisa dilihat secara langsung saat mereka setelah keluar dari sini, ada manfaat yang dilihat dalam waktu setahun, ada manfaat yang baru bisa dilihat dalam waktu satu tahun keatas. Itu terbukti dari monitoring kita ke klien mas. Kalo yang langsung kan ada kegiatan pemulangan klien, Terus kalo yang jangka setahun, ada binjut pertama. Kalo yang setahun keatas itu ada binjut kedua. Disitu manfaatnya keliatan mas”

Artinya manfaat yang didapatkan oleh klien dapat diukur oleh kegiatan yang ada dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Melihat manfaat secara langsung

ialah dengan kegiatan pemulangan klien ke daerah asal. Manfaat dalam waktu satu tahun dilihat dari kegiatan bina lanjut pertama. Melihat manfaat diatas setahun dilakukan dengan bina lanjut kedua. Ketiga kegiatan tersebut yang dapat melihat manfaat dari program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila yang ada di UPT RSTS Kediri. Kedua pendapat tersebut menyimpulkan manfaat yang dapat dilihat secara langsung, satu tahun, dan dua tahun.

Sejalan dengan hal diatas RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan kembali berpendapat,

“Penyaluran sebenarnya manfaat secara langsung dari program ini mas. Tapi, selama ini tidak berjalan secara *efektive*. Dikarenakan gini mas, kita dulu sudah pernah nggandeng beberapa tempat untuk menyalurkan klien kita kesana. Tapi itu berjalan sampai tahun berapa saja. Banyak yang sudah mengundurkan diri dari kerja sama itu. Alasannya mereka takut suami atau keluarga dekat mereka kalau tau ada WTS mereka menggoda dan menggunakan jasanya. Ada juga yang beralasan sudah terlalu banyak karyawan. Ada pula yang bilang takut melihat keadaan mereka yang dulu” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya, penyaluran merupakan manfaat secara langsung yang harusnya didapatkan oleh klien UPT RSTS Kediri. Tetapi, implementasi dalam kegiatan penyaluran tidak berjalan *efektive*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya instansi swasta yang telah bekerjasama dengan UPT RSTS mengundurkan diri untuk jasa penyaluran. Alasan mengundurkan diri dari jasa penyaluran ialah takut suami atau keluarga terdekat instansi terjaring atau tergoda dengan WTS. Ada juga yang mengundurkan diri dengan alasan tidak membutuhkan tenaga kerja lagi. Selain itu, ada yang beralasan takut dengan jejak karir klien.

SN(P,50th) sebagai Ibu Asuh dan Staf Rehabilitasi dan Bina Lanjut menyampaikan,

“Emang gak *efektive* mas. Tapi menanggulangnya kita dengan cara waktu pemulangan klien. Kita titipkan kepada petinggi desa atau Lurah daerah tersebut. Kita minta untuk mendorong klien tersebut diberikan pekerjaan atau bantuan sehingga tidak melakukan tindakan yang salah lagi. Terbukti ada yang di daerah Kabupaten Malang, petinggi desanya memberikan tempat atau *stand* buat klien berjualan. Daerah Jombang juga ada petinggi desanya yang mendorong masyarakat daerahnya untuk pesan kue di klien tersebut. Hal semacam itu yang bisa buat menanggulangi permasalahan penyaluran yang dirasa tidak *efektive* mas” (Wawancara 17 Mei 2016 08.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya, penanggulangan kegiatan penyaluran dilakukan dengan cara menitipkan klien saat pemulangan ke daerahnya kepada petinggi desa atau Lurah daerah tersebut. Adanya penitipan tersebut dirasa mampu mendongkrak permasalahan penyaluran yang tidak *efektive*. Salah satu buktinya ialah klien yang berasal dari Kabupaten Malang diberikan tempat untuk berjualan secara gratis oleh petinggi desanya. Contoh lain di daerah Jombang, petinggi desa menggerakkan masyarakat daerahnya untuk memesan kue dalam acara hajatan kepada klien tersebut.

Selanjutnya klien UPT RSTS Kediri WI(P,29th) berpendapat tentang manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila bahwa,

“Yo mene nek oleh barang-barang gawe alat jahit yo tak gawe mas. Pokoe aku wes kapok gak gelem kerjo nang enggon ngono iku mas. Wes wegah rasane. Mene barang-barang teko kene yo tak gawe usaha nang omah. Tapi tak gawe sambian. Aku mau kan wes ngomong pengen buka warung kopi mas. Lah pengenku buka warung kopi karo jahit. Sitik-sitik sing penting halah” (Wawancara 19 Mei 2016 12.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya, ketika mendapatkan barang untuk usaha (paket stimulan) akan digunakan untuk bekerja. Adanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial membuat klien merasa gerah untuk bekerja lagi seperti dulu.

Dalam melihat manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri, RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan menyampaikan,

“Ada yang namanya kegiatan bina lanjut pertama. Disitu kita bisa melihat klien mengembangkan *skill* yang sudah mereka miliki. Salah satu contohnya ketika bina lanjut pertama banyak klien yang telah membuka usaha sendiri. Banyak yang sudah bertempat dirumah dan tidak kembali ke pekerjaan yang dulu. Saya bilangny mereka berhasil mengembangkan kemampuan mereka. Ada yang sudah buka warung makan, ada yang ikut penjahit di daerahnya. Ada juga yang sudah meninggalkan rumah lagi, bilangny bekerja ikut orang, tapi paket stimulanya masih ada dirumahnya. Itu sebagai contohnya saja sih mas.” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Artinya, dalam melihat manfaat dalam waktu satu tahun ada kegiatan bina lanjut pertama. Kegiatan tersebut berfungsi melihat perkembangan klien selama satu tahun selesai rehabilitasi. Beberapa contoh perkembangan klien ialah, terdapat klien yang sudah tinggal dirumah membuka warung makan, bekerja sebagai penjahit, ada pula yang telah meninggalkan rumah dengan alasan bekerja diluar dan tidak membawa paket stimulan yang telah diberikan.

SN(P,50th) sebagai Ibu Asuh dan Staf Rehabilitasi dan Bina Lanjut yang berpendapat,

“Bina lanjut pertama itu diawali oleh surat perintah tugas, dan sesampainya dirumah klien kita buat laporan tentang keadaan klien, dan dokumentasi bina lanjut pertama. Bina lanjut kedua juga kayak gitu mas. Selama saya melakukan bina lanjut pertama dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya rehabilitasi. Klien banyak yang sudah buka usaha sendiri mas. Mantan anak asuh saya juga masih sering sms saya. Laporan sekarang kerja jadi pembantu rumah tangga, ada yang buka warung kopi dirumah” (Wawancara 17 Mei 2016 08.30 WIB UPT RSTS Kediri)

Artinya, bina lanjut pertama dan bina lanjut kedua diawali oleh surat perintah tugas, sesampainya dirumah klien petugas bina lanjut diharapkan membuat laporan keadaan klien, dan dokumentasi bina lanjut. Selama melakukan bina

lanjut pertama, petugas sering menemui keberadaan klien yang telah mandiri dan mengembangkan usaha yang telah dibuat. Hubungan anak asuh dan pengasuh juga masih sering berhubungan, Sunarni sebagai ibu asuh masih sering mendapatkan sms dari anak asuhnya mengenai pekerjaan anak asuh Sunarni.

Selanjutnya manfaat jangka panjang didukung dengan adanya kegiatan bina lanjut kedua. RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan menyampaikan,

“Bina lanjut yang kedua itu buat ngelihat manfaat dari program ini mas. Gak semua kita kunjungi, hanya kita lakukan pemilihan secara acak dan yang masih mudah dijangkau oleh kita, hal itu karena terbentur anggaran yang masih belum cukup kalau buat ngunjungi semua klien kita.. Manfaatnya terkait keberadaan klien dapat diterima oleh masyarakat” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

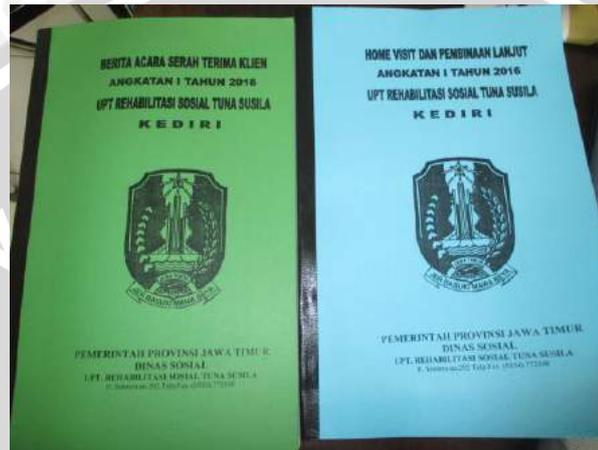
Sejalan dengan pendapat RWA diatas, SN(P,50th) sebagai Ibu Asuh dan Staf Rehabilitasi dan Bina lanjut kembali memberikan pendapatnya,

“Bina lanjut yang kedua ini acak mas. Gak semua kita kunjungi. Ya selama saya bina lanjut kedua. Keberadaan klien alhamdulillah banyak yang sudah menerima. Beberapa anak asuh saya juga ada yang sudah menikah. Bahkan suaminya juga tau kalo istrinya mantan WTS. Kalo yang bina lanjut kedua ini banyak perbedaannya dengan bina lanjut yang pertama. Keberadaan klien juga sudah lebih tenang, rukun dengan keluarga dan masyarakat daerahnya. Rata-rata masyarakat daerahnya juga sudah tidak takut lagi kalo klien gak mungkin melakukan perbuatan yang dulu lagi” (Wawancara 17 Mei 2016 08.30 UPT RSTS Kediri).

Artinya, kegiatan bina lanjut yang kedua merupakan kegiatan mengunjungi klien secara acak. Keberadaan klien pada waktu satu tahun keatas kebanyakan klien sudah diterima oleh masyarakat. Terdapat beberapa klien yang telah menikah. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 bab III pasal 6 menyebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berikut buku yang merangkum manfaat dari program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

Gambar 11. Buku Serah Terima Klien dan Home Visit dan Pembinaan Lanjut UPT RSTS Kediri



2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri

Permasalahan suatu program pasti memiliki faktor yang mempengaruhi berjalanya suatu program. Begitu pula dengan implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Peneliti melihat terdapat beberapa faktor yang bersifat mendukung dan menghambat berjalanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila yang ada di UPT RSTS Kediri.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penelitian ini merupakan faktor yang mendukung berjalanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Faktor pendukung dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS Kediri terkait peran pemerintah dan sumber daya manusia yang handal dalam

implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS didukung oleh peran dinas sosial yang ada di Jawa Timur. Tanpa adanya peran dinsos, implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS Kediri tidak akan dapat terlaksana. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ST(L,55th) sebagai Kepala sub bagaian tata usaha yang berpendapat,

“Berjalanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial ini didukung oleh seluruh dinsos di Jawa Timur. Tanpa adanya peran dinas sosial kota dan kabupaten di Jawa Timur, ya program ini gak bakal terlaksana dengan baik mas. Yang pasti kita gak punya klien di sini. Kan kita gak ikut cari klien, yang berhak cari klien itu dinas sosial daerah dengan aparat gabungan daerah masing-masing. Kita hanya menjalankan programnya” (Wawancara 17 Mei 2016 14.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial didukung oleh dinas sosial kabupaten dan kota di Jawa Timur. Adanya kegiatan razia WTS di daerah masing-masing membuat UPT RSTS Kediri tidak pernah mengalami kekurangan jumlah klien yang besar.

Selanjutnya pernyataan RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan yang berpendapat

“Faktor pendukungnya dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS ini, yang pertama adanya peran yang besar dari dinas sosial di seluruh Jawa Timur. Jadi kalau disini sudah selesai masa programnya. Kita kirim surat ke dinsos di kabupaten dan kota di Jawa timur. Alhamdulillah mereka

langsung antusias, mereka pasti langsung menghubungi kami. Dari daerah ini, kirim 5 klien, dari daerah ini kirim 10 klien. Jadi klien di UPT RSTS tidak pernah mengalami kekurangan klien dalam angka yang besar” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, adanya peran dinas sosial Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Timur dalam memberikan atau mengirimkan klien ke UPT RSTS Kediri membuat pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila dapat berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan klien dalam jumlah yang besar.

2. Keuangan dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila

Keuangan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri termasuk dalam faktor pendukung. Hal itu dikarenakan keuangan bersifat penting dalam program ini. Sejalan dengan hal tersebut, RWA(P,52th) sebagai Kepala sie Pelayanan menyampaikan,

“Yang kedua, itu keuangan mas. Gak mungkin mas, kalau program ini gak butuh dana. Kalau keuangan tersendat aja, udah bingung semua pelaksana programnya. Jadi kalau keuangan ini kita pakai buat beli seragam klien, kebutuhan klien mulai sabun, sikat gigi, terus biaya permakanan mereka, dan kebutuhan alat-alat bimbingan. Servise alat, ganti alat yang rusak, beli bahan bimbingan, perjalanan dinas, terus yang paling penting paket stimulan, bayar *instruktur*. Semua kegiatannya berhubungan dengan pendanaan. Alhamdulillah keuangan dalam program ini gak pernah telat mas. Jadi kita bisa memberikan pelayanan kepada klien secara maksimal. Butuh bahan bimbingan, langsung kita sediakan, alat rusak langsung kita *service* atau kita ganti, makan juga memenuhi kualitas jadinya.” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, bahwa keuangan termasuk sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Keuangan sebagai pendukung dalam menyukseskan seluruh kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Segala kegiatan yang ada dalam program berhubungan dengan keuangan. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial tidak pernah mengalami keuangan yang tersendat. Adanya keuangan yang tidak tersendat tersebut menjadikan UPT RSTS Kediri dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien UPT RSTS Kediri.

Sejalan dengan pendapat diatas, AY(L,55th) sebagai Kepala Sie Rehabilitasi dan Bina Lanjut menyampaikan,

“Keuangan disini gak pernah telat mas, itu yang buat kita bisa memenuhi kebutuhan klien, kebutuhan instruktur, beserta kebutuhan kegiatan-kegiatan. Kayak *home visit*, bina lanjut. Kalau keuangan sudah gak lancar. Kita pegawai UPT RSTS pasti bingung mau ngelayani klien kayak gimana” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan tersebut memiliki arti, bahwa keuangan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS Kediri tidak pernah terlambat. Hal tersebut menjadikan pelayanan yang diberikan kepada klien, *instruktur*, dan kegiatan lainnya berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa keuangan yang tidak pernah terlambat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

3. Fasilitas yang Memadai

Fasilitas yang memadai termasuk dalam faktor pendukung. Hal itu berhubungan dengan kenyamanan klien dalam menerima bimbingan selama empat bulan didalam UPT RSTS Kediri. Sejalan dengan hal itu RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan berpendapat,

“Pendukung yang ketiga adanya fasilitas yang dibidang memadai. Mereka datang kesini kan juga gara-gara terpaksa. Jadi kita buat nyaman disini biar mereka bisa tenang. Fasilitas yang memadai itu, adanya asrama yaang nyaman. Kasur satu orang, bantal guling ada, ruang belajar yang nyaman, terus kebutuhan-kebutuhan yang selalu kita penuhi. Kalau dari sisi bimbingan, fasilitasnya bahan alat yang kita jamin selalu layak digunakan. Biar mereka belajarnya rajin juga.” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan tersebut memiliki arti, bahwa fasilitas yang memadai termasuk dalam faktor pendukung berjalanya kesuksesan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Fasilitas termasuk dalam kamar asrama yang nyaman, kebutuhan klien, beserta ruang keterampilan yang nyaman. Fasilitas dalam hal bimbingan termasuk kebutuhan alat dan bahan dalam bimbingan yang membuat klien mengikuti bimbingan semakin merasa antusias.

Selanjutnya AY(L,55th) menyampaikan,

“Fasilitas termasuk dalam faktor pendukung dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Kalau fasilitasnya gak memadai, klien juga pasti tidak antusias. Malah makin males yang ada, adanya fasilitas apa saja disini boleh digunakan oleh klien tanpa dipungut biaya. Itu semua kita tujuan biar klien merasa nyaman disini. Bukan kayak dipenjara” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Pendapat diatas menjelaskan, bahwa fasilitas termasuk dalam faktor pendukung pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Adanya fasilitas yang disediakan di UPT RSTS Kediri boleh digunakan oleh klien tanpa dipungut biaya. Selanjutnya MY(P,40th) sebagai instruktur tata boga berpendapat,

“Kalo fasilitas dalam bimbingan ketrampilan tata boga ini saya bilang lengkap mas. Wajan, panci, kompor, tabung gas, kulkas, serokan, semua alat ada disini. Kalau bahan, ya sesuai yang saya butuhkan apa aja juga ada disini. Jadi klien bisa semangat belajarnya” (Wawancara 18 Mei 2016 11.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, fasilitas dalam bimbingan ketrampilan tata boga terpenuhi secara alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan sebagai alat belajar terdapat di ruang belajar tata boga. Bahan untuk belajar tata boga yang dibutuhkan oleh instruktur telah disiapkan dan dipenuhi oleh Upt RSTS Kediri. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan nilai antusias klien ketrampilan tata boga terhadap bimbingan yang diberikan.

4. Sumber Daya Manusia yang Memadai

Sumber daya manusia (SDM) yang memadai merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Sejalan dengan hal itu, RWA(P,52th) menyampaikan,

“Terkait sumber daya manusia, sumber daya ini dibagi menjadi dua. Sumber daya karyawan UPT RSTS dan sumber daya instruktur atau gurunya mas. Karyawan disini saya bilang karyawan yang memadai dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Kita harus mengetahui karakter

klien, mikirin kesehatan klien, psikologi klien, dll. Jadi gak asal jalan aja program ini. Terus kalau instrukturnya sikapnya mereka membaur dengan klien. Jadi bukan hubungan guru dengan murid, seakan-akan kayak teman yang ngajarin temanya. Jadi mereka bisa nyaman ngikutin materi yang disampaikan. Selain itu instruktur juga selalu masuk dan tepak waktu kecuali dengan ijin. Jadi instruktur yang ada di UPT RSTS ini bukan instruktur yang gak tanggung jawab. Adanya SDM ini sebagai faktor pendukung pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, SDM merupakan faktor pendukung pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. SDM dibagi menjadi dua bagian, SDM karyawan yang memadai terbukti dengan karyawan yang diharapkan mampu mengetahui karakter klien, memikirkan kesehatan, beserta psikologi klien. Selanjutnya instruktur sebagai SDM yang memberikan materi dengan gaya mengajar yang asik selayakanya kawan. Hal itu membuat klien semakin giat dan tidak segan untuk bertanya kepada instruktur dalam proses bimbingan. Adanya SDM yang memadai tersebut mampu mendorong program pelayanan dan rehabilitasi sosial berjalan dengan lancar.

Selanjutnya IR(L,42th) sebagai instruktur tata busana menyampaikan,

“SDM guru disini saya bilang sebagai SDM yang handal mas. Gimana gak handal, klien yang karakternya suka bentak-bentak, mencureng ae wajahnya ya bisa akrab kayak teman sendiri kalo dengan kita ini. Ditambah lagi peran pengasuh dari karyawan disini benar-benar berfungsi ngerubah karakter klien yang kayak gitu jadi lebih sopan. Ya kalo ditanya SDM ini sebagai faktor pendukung kesuksesan program disini ya saya rasa iya mas” (Wawancara 18 Mei 2016 13.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan tersebut memiliki arti, bahwa SDM termasuk dalam faktor pendukung kesuksesan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Hal itu dibuktikan dengan karakter klien yang suka merengut dengan nada bicara membentak bisa berkawan dengan *instruktur*. Peran SDM pengasuh klien sebagai pengasuh yang mampu merubah karakter klien yang jelek menjadi lebih baik lagi, terbukti dengan perilaku klien yang semakin hari semakin sopan dengan orang lain.

Selanjutnya STI(P,36th) sebagai klien UPT RSTS Kediri yang menyampaikan,

“Kalau guru dan ibu asuh saya baik orangnya mas. Suka nanyanya keadaan saya. Guru saya ya ngajarinya enak, kayak temen saya sendiri, jadi saya nyaman dikelas. Kalo ibu asuh saya itu ibu Sunarni, dia ya baik. Suka nanya keadaan saya, merhatiin saya, kalau saya ada maslah juga sering nanya pendapat ke dia” (Wawancara 19 Mei 2016 10.15 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, bawa *instruktur* dan pengasuh bersikap baik terhadap klien. Hal itu dibuktikan oleh klien yang merasakan *instruktur* sebagai temannya. Selain itu pengasuh yang dianggap suka bertanya tentang keadaan klien, membuat klien merasa nyaman dengan pengasuh dan suka bertukar pendapat ketika ada masalah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi namun bersifat sebagai penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Adapun faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila adalah:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Klien

Permasalahan tingkat pendidikan klien merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Hal ini menjadikan mudah atau sulitnya klien menerima materi yang diberikan oleh instruktur kepada klien. Sesuai dengan pernyataan RWA(P,52th) sebagai Kepala sie pelayanan yang berpendapat,

“Penghambatnya yang pertama, terkait rendahnya pendidikan klien. Latar belakang klien yang hanya menempuh bangku sekolah rata-rata hingga SMP. Tapi ada juga yang tidak sekolah. Hal ini menjadikan instruktur harus bekerja keras untuk memberikan bahasa yang mudah mas. Yang paling parah, tapi jarang terjadi yang ini mas, masih adanya klien yang tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana instruktur bisa memberikan materi kepada klien kalau mereka gak ngerti angka dan huruf mas. Antisipasinya kalau ada yang seperti itu, bagian rehab dan pelayanan memberikan pelayanan berupa kelas baca dan menulis yang diisi oleh karyawan kita sendiri dengan waktu tertentu” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan tersebut memiliki arti, bahwa faktor penghambat pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS ialah rendahnya pendidikan klien. Hal itu menjadikan instruktur susah untuk menyampaikan materi yang akan diberikan.

Selanjutnya, masih adanya klien yang buta huruf dan buta angka menyebabkan klien tidak bisa mengikuti kelas bimbingan. Mengantisipasi hal itu, bagian rehabilitasi dan pelayanan memberikan kelas tambahan kepada klien dengan waktu tertentu untuk mengajarkan klien membaca dan menulis.

AY(L,55th) sebagai Kepala sie rehabilitasi dan bina lanjut berpendapat,

“Terkait penghambatnya ada beberapa klien yang sukar membaca dan menulis. Gak di semua angkatan tapi mas, angkatan sekarang ini semuanya bisa membaca dan menulis. Kalau kayak gitu, bagian saya dan bu Rini yang harus mengajarkan klien biar bisa lancar baca dan tulis” (Wawancara 17 Mei 2016 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memberikan maksud bahwa penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi adalah terdapat klien yang masih susah untuk membaca dan menulis. Antisipasi yang dilakukan terkait hal itu, karyawan memberikan pendampingan berupa kelas membaca dan menulis kepada klien yang mengalami hal itu. Selanjutnya UD(P,40th) sebagai *instruktur* tata rias rambut berpendapat,

“Saya pernah mengalaminya, ada klien yang gak bisa baca tulis dikelas saya tahun lalu. Ya saya lapor ke bagian rehab mas, terus anaknya dikasih pembelajaran biar bisa baca dan tulis sama karyawan. Sebulan kemudian baru dia ikut kelas saya lagi. Kalau angkatan ini dikelas saya, semuanya alhamdulillah bisa baca tulis mas. Saya taunya kalau saya nerangin, mereka saya suruh catet. Saya liat emang mereka bener-bener catet yang saya terangin. Berarti mereka sudah bisa baca tulis. Saya rasa itu termasuk penghambat dalam program ini mas, saya gak bisa ngasih materi yang harusnya klien dapatkan disini untuk waktu

tertentu” (Wawancara 18 Mei 2016 12.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Pendapat diatas memiliki arti, bahwa adanya klien yang tidak bisa membaca dan menulis membuat instruktur kesusahan menyampaikan materi yang diberikan. Instruktur tata busana pernah mengalami kasus klien yang tidak dapat membaca dan menulis pada angkatan tahun 2015. Mengantisipasi hal tersebut, instruktur melaporkan kepada bagian rehabilitasi untuk ditindak lanjuti dan diberikan kelas membaca dan menulis. Selanjutnya RS(P,44th) sebagai klien UPT RSTS Kediri berpendapat, “Kalo baca tulis saya bisa mas. Saya dulu terakhir sekolah SD kelas 5 mas. Anak-anak disini ya bisa semua kok mas” (Wawancara 19 Mei 2016 11.00 WIB UPT RSTS Kediri).

2. Tingkat Kesehatan Klien

Kesehatan klien merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Hal itu disampaikan oleh RWA(P,52th) sebagai Kepala sie pelayanan yang berpendapat,

“Yang kedua itu penghambatnya masalah kesehatan klien mas. Kita sebagai karyawan UPT RSTS tidak ikut menjalankan razia WTS di daerah. Sehingga sering kita kecolongan masalah klien yang menderita penyakit HIV/AIDS. Ya tidak bisa kita salahkan, WTS itu rentan sekali dengan penyakit mas. Kalau penyakit yang biasa-biasa kita menyiapkan dokter dari puskesmas untuk memeriksa kesehatan klien. Kalau yang HIV ini kita kerjasama dengan LSM terkait HIV, Jadi klien yang mengidap HIV dipantau secara rutin oleh LSM HIV selama berada disini. Terkait obat-obatan LSM semua yang memberikanya. Kalau rehabilitasi sudah selesai, waktu pemulangan klien LSM HIV menitipkan klien kepada LSM HIV yang ada di daerahnya. Minimal daerah terdekat, hal itu

untuk mengawasi terus agar virus itu tidak menyebar secara bebas, obatnya juga dari LSM daerahnya. Jadi kalau sudah selesai rehab, LSM daerahnya yang memantau. Bukan LSM yang bekerja sama dengan kita lagi” (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan tersebut memiliki arti, bahwa kesehatan klien merupakan faktor penghambat yang kedua. Adanya kasus klien yang mengidap HIV/AIDS menjadikan UPT RSTS harus waspada terhadap klien dari segi obat-obatan dan pergaulan klien. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi virus tidak menyebar. Mengantisipasi hal itu, UPT RSTS bekerja sama dengan LSM HIV/AIDS untuk memberikan obat-obatan dan pemantauan secara rutin. Pasca masa rehabilitasi selesai, klien pengidap HIV dipulangkan dan dititipkan oleh LSM HIV/AIDS di daerahnya untuk obat-obatan dan pemantauan klien.

Sejalan dengan pendapat diatas, AY(L,55th) menyampaikan,

“Ya emang masalah penyakit yang diderita oleh klien disini itu termasuk dalam penghambat program pelayanan dan rehabilitasi sosial mas. Ya kita antisipasi aja, jagang sampai klien yang lain tahu bahwa klien tersebut mengidap penyakit itu. Antisipasinya biar gak nular kita siapkan obat-obatan dari LSM tentang HIV/AIDS. Mengingatkan klin untuk meminum obatnya juga termasuk tanggung jawab karyawan UPT RSTS. Ini termasuk faktor penghambat, kalau gak kita jaga benar-benar klien bisa menularkan virus kepada klien yang lain atau kepada karyawan dengan cara yang mudah” (Wawancara 17 Mei 10.30 WIB UPT RSTS Kediri).

Pernyataan tersebut memiliki arti, bahwa penyakit yang diderita oleh klien termasuk dalam penghambat pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Antisipasi yang dilakukan dengan adanya pencegahan yaitu pemberian obat-

obatan kepada klien secara teratur. Karyawan juga bertugas untuk mengingatkan klien untuk meminum obatnya. Hal tersebut menjadikan permasalahan kesehatan klien sebagai faktor penghambat dikarenakan klien mampu menularkan virus kepada klien lain dan karyawan UPT RSTS Kediri dengan cara yang mudah. Dari hasil wawancara diatas, tingkat kesehatan klien merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di Upt RSTS Kediri. Antisipasi UPT RSTS Kediri ialah dengan cara memberikan obat-obatan secara teratur kepada klien agar klien tidak dapat menularkan virus yang diderita.

3. Klien Rindu akan Keluarga

Fakto penghambat selanjutnya ialah klien merindukan keluarga yang ditinggalnya selama masa rehabilitasi selama empat bulan. Hal ini menjadikan masalah klasik klien untuk bermalas-malasan. Sesuai dengan pernyataan RWA(P,52th) sebagai Kepala sie pelayanan yang menyampaikan,

“Yang ketiga itu alasan klasik mas, kangen, rindu, keluarga. Pengasuh-pengasuh disini sering lapor ke saya, bu si A kangen sama keluarganya, si B kangen anaknya. Ya kalau sudah gitu, kita juga tetap tidak bia memberikan ijin kepada klien untuk pulang. Antisipasinya kita menelpon keluarga klien untuk datang kesini, bilang kalo A kangen dengan ibu. Efek yang ditimbulkan dari kangen rindu keluarga ini, klien jadi gak fokus buat ikut bimbingan mas. Kayak males-malesan, ya gimana lagi. Selain menyuruh keluarga datang untuk besuk klien, biasanya kita adakan acara *have fun*, kayak *outbond*. Lomba bareng-bareng sama klien. Itu kita lakukan buat *mengupgrade* mereka biar semangat lagi’ (Wawancara 17 Mei 2016 09.00 Wib UPT RSTS Kediri).

Pendapat diatas menjelaskan bahwa, faktor penghambat yang ketiga ialah permasalahan klien merindukan keluarga. Hal itu berdampak pada pribadi klien terlihat murung, sedih, dan bermalasan-malasan. Antisipasi yang dilakukan oleh UPT RSTS Kediri dengan menelpon keluarga klien untuk melakukan besuk kepada klien. Antisipasi yang kedua dengan cara menghibur klien dengan melakukan outbond atau lomba yang dilakukan oleh klien. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesemangatan klien.

Sejalan dengan hal itu, klien UPT RSTS Kediri yaitu WI(P29th) menyampaikan,

“Yo nek kangen karo dolor-dolor yo pasti mas. Tapi yaopo maneh, tak lakoni ae mas. Sing penting metu tekan kene aku iso ketemu bojoku karo anaku maneh. Wes kapok aku kerjo nang panggon ngono-ngono kui pokoe mas” (Wawancara 19 Mei 2016 12.00 Wib UPT RSTS Kediri).

Penjelasan diatas memiliki arti, bahwa klien merindukan keluarga. Tetapi bagaimana saja, klien tidak bisa keluar dari sini hingga waktu rehabilitasi dinyatakan selesai.

D. Pembahasan dan Analisis Data

1. Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri

a. Proses Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri

Proses implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial menggunakan model implementasi George Edward. Hal itu dibuktikan dari model implementasi Edward yang memperhatikan empat aspek dibawah ini:

- 1) Komunikasi, dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan program, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- 2) *Resource*, dalam hal ini berkenaan dengan tersedianya sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
- 3) *Disposition*, dalam hal ini berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- 4) Struktur birokrasi, dalam hal ini berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi

kebijakan publik, tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadi proses implementasi yang tidak maksimal. (Nugroho, 2009:512-513)

Empat aspek tersebut berkaitan erat dengan proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Sesuai dengan pernyataan ST(L,55th) proses implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri terdapat delapan kegiatan yang berkesinambungan yaitu: Pendekatan awal dan penerimaan klien, *assesment*, bimbingan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, evaluasi, dan pengakhiran.

Model implementasi kebijakan George Edward menekankan pada aspek komunikasi. Aspek komunikasi dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS dimulai pada pengiriman surat oleh UPT RSTS Kediri kepada seluruh dinas sosial di Jawa Timur untuk mengirimkan klien kepada UPT RSTS. Selanjutnya aspek komunikasi juga termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia beserta sikap tanggap pelaksana kegiatan, dan struktur organisasi pelaksana. Terkait penyediaan sumber daya manusia, UPT RSTS memiliki karyawan yang mampu menangani kebijakan tersebut secara tanggap. Terkait struktur organisasi pelaksana telah terbagi dalam bagian tata usaha, sie pelayanan dan sie rehabilitasi dan bina lanjut. Ketiga bagian tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bagian tata usaha sebagai alur komunikasi kepada dinas sosial di seluruh Jawa Timur. Sie rehabilitasi yang menyediakan materi dalam program beserta penyedia *instruktur* bimbingan. Sie pelayanan yang menyediakan perawatan permakanan dan pelayanan kesehatan klien.

Resouces pada model implementasi kebijakan Edward menekankan pada aspek sumber daya pendukung khususnya manusia. Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila memiliki sumber daya pendukung khususnya manusia yang handal dalam memberikan materi kepada klien sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Selanjutnya pada aspek *disposition* yang beranggapan kecakapan saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan program. Hal itu dibuktikan pada kegiatan pendekatan awal dan penerimaan klien, ketika klien dikirim oleh dinsos daerah ke UPT RSTS Kediri, karyawan UPT RSTS Kediri berkomitmen untuk langsung melakukan penerimaan klien pada pukul berapa saja ketika klien tiba. Selanjutnya pada tahap struktur birokrasi yang menekankan pada penyelenggara implementasi. Penyelenggaraan implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial di Jawa Timur hanya dilaksanakan di UPT RSTS Kediri. Penjelasan diatas termasuk dalam proses implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang termasuk dalam model implementasi kebijakan George Edward.

Proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ada di UPT RSTS Kediri telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 Pasal 63 poib B dan C yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan sosial di UPT RSTS meliputi rehabilitasi dan pembinaan lanjut serta penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial. Hal ini menjadikan proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terdiri dari delapan tahapan tersebut tidak menyalahi aturan karena telah termasuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 tahun 2008. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tenaga pendidik sejalan dengan pernyataan

RWA(P,52th) yang berpendapat tenaga pendidik untuk menjalankan praktek pekerjaan sosial telah memenuhi dari UU Nomor 11 Tahun 2009.

Penjelasan diatas telah membahas bahwa proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS Kediri merupakan program yang telah menganut UU Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 yang implementasinya menggunakan model implementasi kebijakan George Edward. Proses program telah berlangsung dengan baik karena telah tertata secara rapi melalui alur program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Selain itu proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS Kediri telah sesuai dengan teori model implementasi kebijakan publik George Edward dan tidak menyalahi peraturan Gubernur dan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pada proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri menerapkan delapan tahapan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Delapan kegiatan tersebut telah disampaikan oleh ST(L,55th) sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari pendekatan awal dan penerimaan klien, pengungkapan dan pemahaman masalah, bimbingan (sosial, fisik, mental, dan ketrampilan), resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, dan evaluasi, serta pengakhiran. Pernyataan tersebut didukung oleh alur program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Hal itu membuat proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial berjalan dengan baik dan secara teratur. Dalam UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa Pasal 1 ayat 14 menjelaskan: "Rehabilitasi

adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”

Proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial dilihat dari delapan kegiatan yang ada dalam program bertujuan untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar. Hal itu dibuktikan dengan delapan kegiatan yang disampaikan oleh ST(L,55th). Sejalan dengan UU RI Nomor 21 tahun 2007 pasal 1 ayat 14 tentang rehabilitasi sebagai pengembalian kondisi klien dari gangguan fisik, pskis dan nilai sosial. RWA (P,52th) berpendapat dalam kegiatan rekreatif dan resosialisasi sebagai kegiatan yang memiliki fungsi untuk mengembalikan nilai sosialnya melalui cara piket kebersihan, *outbond* dan materi dikeleas. Selain itu, AY(L,55th) juga berpendapat terdapat kegiatan pendampingan selama seratus dua puluh hari yang disediakan dengan cara membentuk pengasuh klien yang berfungsi untuk pengungkapan dan pemecahan masalah klien. Hal itu juga termasuk untuk memberikan klien UPT RSTS Kediri dalam mengembalikan nilai sosial dan gangguan psikis. Selanjutnya dalam mengembalikan gangguan fisik, RWA(P,52th) juga berpendapat bahwa untuk mengembalikan kondisi fisik, RWA(P,52th) berpendapat UPT RSTS Kediri menyiapkan tim kesehatan yang memeriksa kesehatan klien seminggu sekali. Tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi obat-obatan sebagai pengembalian fisik yang sehat juga ikut diberikan.

Selain itu, pada model implementasi kebijakan publik George Edward, aspek ke empak ialah struktur birokrasi. Hal tersebut berkaitan dengan struktur birokrasi yang ada di UPT RSTS Kediri. Proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri memiliki struktur birokrasi yang complete. Struktur tersebut membagikan tugas yang ada dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Hal itu terbukti dari adanya gambar 7 proses pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Dalam gambar tersebut membagikan tugas yang jelas antara proses program yang dibagikan kedalam sub bagian tata uusaha, sie pelayanan, dan sie rehabilitasi sosial tuna susila.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri telah sesuai aturan dan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang rehabilitasi untuk mengembalikan gangguan fisik, psikis, dan sosial. Delapan kegiatan yang ada dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila telah menyangkut pengembalian gangguan fisik, psikis, dan sosial. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri telah berjalan dengan baik dan tidak menyalhi aturan atau perundang-undangan.

b. Sasaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila UPT RSTS Kediri

Sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri ialah WTS hasil razia yang dilakukan oleh dinas sosial dan aparat

daerah masing-masing. WTS merupakan istilah nama yang berbeda dengan PSK. Tetapi dalam segi pekerjaan PSK dan WTS merupakan profesi yang sama. Menurut Kartono (2011:216), pekerja seks komersial ialah peristiwa penjualan diri baik perempuan maupun laki-laki dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Dari penjelasan Kartono tersebut dapat disimpulkan bahwa WTS merupakan PSK perempuan yang menjualbelikan badan untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

Sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila tepat sasaran. Hal itu dibuktikan dengan klien yang diwawancarai peneliti yaitu WI(P,29th) dan STI(P,36th) yang mengaku bekerja diwarung kopi yang bertugas menemani tamu lelaki dan ada yang bekerja di lokalisasi Moroseneng. Sesuai dengan pendapat Koentjoro (2004:64) yang menjelaskan terdapat kriteria pelacur wanita. Pada klasifikasi tempat bekerja, WTS bekerja pada panti pijat, rumah bordil, Salon. Tempat bekerja pelacur yang disebutkan oleh Koentjoro tersebut tempat awal dimana klien UPT RSTS bekerja. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila tepat sasaran.

Selanjutnya sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila yang diadakan di UPT RSTS Kediri telah diatur dalam draft rancangan rencana strategis dinas sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dalam rancangan rencana kerja tersebut telah mengatur bahwa tuna sosial yang terdiri dari warga binaan permasyarakatan, gelandangan, pengemis, dan eks tuna susila. Hal itu membuat UPT RSTS Kediri tidak menyalahi aturan dalam memilih

sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila yang berfokus pada WTS.

Melihat model implementasi kebijakan publik George Edward yang dipaparkan oleh Nugroho, (2009:512-513) terdapat aspek komunikasi. Aspek tersebut menekankan pada komunikasi lembaga dengan lembaga lain. Pada sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS Kediri telah memperjelas bahwa model implementasi George Edward digunakan pada program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS Kediri. Sesuai dengan pernyataan AY(L,55th) sebagai Kepala sie Rehabilitasi yang menjelaskan bahwa UPT RSTS berhubungan dengan dinas sosial kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur untuk pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS dengan mengirimkan klien kepada UPT RSTS Kediri. Model implementasi George Edward dan pernyataan AY(L,55th) tersebut membuktikan secara jelas bahwa komunikasi merupakan aspek penting yang ada dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri,

Model implementasi kebijakan George Edward juga dapat dibuktikan kembali dalam sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Hal tersebut didukung oleh adanya kegiatan assesment dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila. Hal tersebut didukung oleh pernyataan RWA(P,52th) menjelaskan bahwa kegiatan assesment merupakan kegiatan yang mencari tahu latar belakang klien dari sudut pekerjaan dan keadaan pekerjaan dahulu. Hal itu membuat kaitan yang jelas bahwa dalam menentukan sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri

terdapat aspek komunikasi antara karyawan UPT RSTS Kediri dengan klien UPT RSTS Kediri. Hal tersebut berfungsi untuk menilai bahwa klien yang ada di UPT RSTS Kediri merupakan klien yang berprofesi sebagai WTS lewat kegiatan *assesment*.

Sejalan dengan hal tersebut pada UU Nomor 11 Tahun 2009 pasal 5 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya meliputi ketunaan sosial. Sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dikatakan tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan. Sasaran yang ada di UPT RSTS Kediri diperkuat oleh model implementasi kebijakan publik George Edward dan UU Nomor 11 Tahun 2009. Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri sesuai dengan sasaran atau garapan program yang ada.

c. Partisipasi Instruktur dan WTS dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri

Partisipasi merupakan alat pengukur berjalanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila berjalan dengan baik atau tidak. Sejalan dengan hal itu, menurut model implementasi George Edward Nugroho, (2009:512-513) mengemukakan bahwa pada model ini terdapat aspek *resource* yang menekankan pada sumber daya pendukung. Implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia yang handal. Hal itu dibuktikan oleh pernyataan ST(L,55th) sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berpendapat partisipasi dari tenaga ahli bimbingan dan resosialisai sangatlah tinggi. Terbukti dari adanya absensi

kehadiran *instruktur* yang selalu hadir dan tepat waktu. Sejalan dengan hal itu, partisipasi klien juga disampaikan oleh RWA(P,52th) dikatakan tinggi. Klien juga selalu mengikuti segala kegiatan yang ada di UPT RSTS terbukti dengan adanya absensi yang selalu hadir.

Pernyataan ST(L,55th) dan RWA(P,52th) diatas, didukung oleh dokumen absensi klien dan *instruktur*. Dokumen tersebut menjelaskan pada tanggal 2-26 Mei 2016 klien selalu hadir dan mengikuti bimbingan ketrampilan tata boga. Absensi instruktur ketrampilan tata boga juga sebagai dokumen penjas bahwa pada tanggal 2-26 Mei 2016 instruktur tata boga selalu hadir dan mengisi bimbingan. Melihat partisipasi keduanya, dapat dikatakan partisipasi instruktur dan klien dalam bimbingan berjalan dengan baik.

Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam UU tersebut mengatur bahwa pelatih berasal dari lembaga pemerintahan, swasta dan lembaga sosial. Instruktur yang ada di UPT RSTS bercampur dari lembaga pemerintahan, lembaga swasta, dan lembaga sosial. Partisipasi ketiganya dikatakan bagus karena selalu hadir dan memberikan materi yang sesuai. Klien UPT RSTS yaitu WI(P,29th) berpendapat bahwa partisipasi dari instruktur sangatlah tinggi terbukti dengan kehadirannya dan cara penyampaian instruktur yang mengasikan. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa sumber daya manusia yang termasuk dalam model implementasi kebijakan George Edward berjalan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS kediri.

Sejalan dengan penjelasan diatas, bahwa UPT RSTS Kediri dalam menilai partisipasi klien dan instruktur bimbingan yang ada di UPT RSTS Kediri sesuai

dengan model implementasi kebijakan George Edward memang terbukti. Penemuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian, dokumen absensi dari klien dan instruktur selalu penuh. Selain itu dalam pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di UPT RSTS Kediri, klien dan instruktur antusias dan selalu penuh sesuai dengan jumlah yang mengikuti bimbingan. Hal itu membuktikan bahwa partisipasi klien dan instruktur dalam bimbingan dikatakan tinggi dan memberikan kesesuaian dengan model implementasi kebijakan George Edward terkait aspek *resource* khususnya pada sumber daya pendukung manusia yang dapat melaksanakan program dengan efektif.

d. Tujuan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri

Tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri ialah mengembalikan WTS untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Haryanto (2009:65-66) menjelaskan tujuan rehabilitasi sebagai berikut:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penjelasan diatas sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh RWA(P,52th) sebagai Kepala sie pelayanan dan rehabilitasi yang berpendapat tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan nilai sosial klien dari

ketunaan sosial. Pendapat Haryanto dan RWA(P,52th) tersebut memiliki kesamaan, bahwa WTS perlu mendapatkan kegiatan rehabilitasi untuk memulihkan kembali kemampuan dalam dirinya untuk melaksanakan fungsi sosialnya.

Selanjutnya dari United Nations dalam Zauhar, (1993:1) bahwa suatu program dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki tujuan yang dirumuskan jelas. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan AY(L,55th) yang berpendapat tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial dari WTS. Tujuan yang dimiliki oleh UPT RSTS merupakan tujuan yang jelas dengan beberapa kegiatan yang telah jelas.

Implementasinya pada tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial ini berjalan dengan baik karena didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Kaitan antara sumber daya manusia dengan tujuan program ialah, dalam penjelasan model implementasi kebijakan George Edward (Nugroho, 2009:512-513) bahwa *disposition* yang menekankan pada sumber daya manusia yang memiliki komitmen dalam menjalankan program terbukti dalam tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Komitmen karyawan UPT RSTS Kediri dibuktikan dengan adanya hasil wawancara AY(L,55th) yang menekankan untuk melihat tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial dilihat dari lembar pembinaan lanjut. Pada tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila berbeda dengan sasaran dan partisipasi instruktur dan klien. Tujuan dapat diukur dari segala kegiatan dalam program berjalan dengan baik.

Melihat tujuan dari rehabilitasi yang disampaikan oleh Haryanto (2009:65-66) diatas, sejalan dengan pernyataan WI (P,29th) yang menyatakan menyesal telah bekerja sebagai WTS dan merasakan jera ketika merasakan proses rehabilitasi. Adanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri ini membuat klien merasakan jera dan tidak ingin mengulangi profesi yang dulu dilakukan oleh klien. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Haryanto (2009:65-66) poin pertama yaitu Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri membuat klien merasakan jera sehingga timbul kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, dan keluarga. Penjelasan diatas menjadikan bukti bahwa teori yang dikemukakan oleh Haryanto (2009:65-66) tentang tujuan rehabilitasi, model implementasi kebijakan George Edward (Nugroho, 2009:512-513), sejalan dengan tujuan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri untuk memulihkan kembali nilai sosial dan harga diri dari klien. Pada dasarnya tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan adanya teori model implementasi kebijakan George Edward yang sesuai pada aspek disposition dengan data hasil wawancara AY(L,55th) yang menyatakan bahwa tujuan dari program dapat dilihat dari lembar bina lanjut.

e. Manfaat dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri

Manfaat yang dihasilkan dari program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri terbagi dalam beberapa kegiatan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, pendapat Haryanto (2009:62) rehabilitasi berkaitan erat dengan koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan team work menuju ke arah tujuan akhir.

Teori Haryanto tersebut sejalan dengan pendapat ST(L,55th) yang menyatakan manfaat dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri didapatkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi menjadi manfaat langsung, manfaat jangka menengah dalam kurun waktu satu tahun, dan manfaat jangka panjang dalam waktu diatas setahun. Teori yang disampaikan oleh Haryanto tersebut berkaitan dengan model implementasi kebijakan George Edward (Nugroho, 2009:512-513) pada aspek komunikasi, *resource, disposition*. Ketiga aspek tersebut didapatkan dalam manfaat yang ada di UPT RSTS Kediri. Manfaat jangka pendek dibuktikan dari adanya manfaat penyaluran. Hal itu disampaikan oleh RWA(P,52th) yang menyampaikan bahwa manfaat secara langsung ialah penyaluran klien ke lembaga-lembaga usaha, namun penyaluran tidak berjalan effektive dikarenakan banyak lembaga yang mengundurkan diri dari kegiatan penyaluran ini. Sejalan dengan hal itu SN(P,50th) sebagai Staf Rehabilitasi dan Bina Lanjut serta sebagai Ibu Asuh Klien menyampaikan penyaluran memang tidak berjalan secara effektive, sehingga kegiatan

pemulangan tidak diikuti oleh kegiatan penyaluran dan digantikan oleh penitipan klien kepada warga atau petinggi daerah untuk memberikan klien pekerjaan. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa manfaat jangka pendek yang ada dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri berkaitan dengan model implementasi kebijakan George Edward.

Selanjutnya pada manfaat jangka menengah, dibuktikan dengan pendapat RWA(P,52th) yang menjelaskan adanya kegiatan bina lanjut yang pertama. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengunjungi klien pasca pemulangan klien dalam kurun waktu satu tahun. Kegiatan tersebut melihat klien telah mengembangkan kemampuan klien dari apa yang didapatkan dalam rehabilitasi. Pernyataan tersebut menjadikan bukti bahwa manfaat jangka menengah yang dikemukakan RWA(P,52th) berhubungan erat dengan aspek komunikasi, resource, dan disposition. Komunikasi terbukti dengan adanya bina lanjut yang berkomunikasi dengan klien dan keluarga klien. Penekanan pada manfaat jangka menengah ialah pada bina lanjut yang disampaikan oleh SN(P,50th) yang berpendapat bina lanjut pertama itu pada perubahan klien yang merubah profesinya. Jadi dari kegiatan tersebut, kita bisa mengetahui klien bekerja seperti apa pasca rehabilitasi.

Pada manfaat jangka panjang, masih berkaitan dengan model implementasi kebijakan George Edward yang menekankan pada aspek komunikasi. Hal itu berhubungan dengan pernyataan RWA(P,52th) yang menyatakan kegiatan bina lanjut kedua ini untuk melihat klien dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi tidak semua klien dikunjungi oleh UPT RSTS karena terbentuk keuangan program.

Memperkuat pernyataan RWA(P,52th) tersebut, terdapat pernyataan SN(P,50th) sebagai Staf Rehabilitasi dan Bina Lanjut serta Ibu Asuh Klien UPT RSTS Kediri yang menyatakan keberadaan klien sudah banyak yang diterima oleh masyarakat, bahkan ada yang telah menikah dan suami mengetahui wanita tersebut mantan WTS. Pernyataan SN(P,50th) dan RWA(P,52th) diatas dapat dikaitkan dengan teori model implementasi kebijakan George Edward yang menekankan pada aspek komunikasi. Hal itu jelas tertera, bahwa komunikasi yang dimaksud dalam manfaat jangka panjang ialah berhubungan dengan klien UPT RSTS Kediri pasca masa rehabilitasi.

Ketiga manfaat tersebut didukung oleh gambar 11 tentang buku penyerahan klien kepada keluarga dan petinggi daerah beserta home visit dan pembinaan lanjut. Pengamatan peneliti dalam kedua buku tersebut, banyak klien yang telah beralih profesi dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga manfaat yang diharapkan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dapat dikatakan sebagai program yang berhasil.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri.

a. Faktor Pendukung

1) Peran Dinas Sosial Kota dan Kabupaten di Seluruh Jawa Timur

Dalam model implementasi kebijakan Model Implementasi George Edward menekankan pada aspek komunikasi (Nugroho, 2009:512-513).

Aspek komunikasi tersebut berhubungan dengan komunikasi UPT RSTS Kediri dengan dinas sosial kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur.

Hal itu didukung oleh pernyataan RWA(P,52th) yang menyatakan bahwa peran dinas sosial di seluruh Jawa Timur sangatlah besar. Hal itu terbukti dengan antusias dinas sosial yang mengirimkan klien kepada UPT RSTS Kediri. Sehingga UPT RSTS Kediri tidak pernah kekurangan klien dalam jumlah yang besar. Hal tersebut menjadikan bukti yang mendasar, bahwa peran DINSOS Kota dan Kabupaten di Jawa Timur sangatlah besar.

Komunikasi dalam model implementasi kebijakan George Edward sebagai bukti bahwa implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri menerapkan model implementasi kebijakan George Edward. Selanjutnya peran DINSOS kota dan kabupaten di Jawa Timur merupakan bukti komunikasi yang baik dari UPT RSTS Kediri dengan DINSOS kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur. Hal itu menjadikan bukti bahwa peran DINSOS merupakan faktor pendukung implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

2) Keuangan dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila di UPT RSTS Kediri

Berjalanya program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri didukung oleh faktor keuangan yang tidak pernah terlambat. Hal itu sesuai dengan pernyataan RWA(P,52th) sebagai Kepala Sie Pelayanan yang berpendapat keuangan yang tidak pernah terlambat menjadikan pelayanan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dapat berjalan dengan

baik. Melihat Aspek dari model implementasi kebijakan George Edward yaitu *resource* terdapat penjelasan sebagai sumber daya pendukung. Keuangan termasuk dalam sumber daya pendukung untuk menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Keuangan untuk mendanai segala kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Jika keuangan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri terlambat, maka pelayanan yang akan diberikan kepada klien di UPT RSTS Kediri tidak akan berjalan dengan baik.

Selanjutnya menurut Boediono, (2003:60) bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sejalan dengan teori Boediono tersebut, AY(L,55th) menyatakan keuangan yang tidak tersendat membuat pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Kaitan pernyataan AY(L,55th) dan teori pelayanan Boediono tersebut menjadikan penjelasan bahwa keuangan yang tidak pernah terlambat menjadikan bukti bahwa keuangan yang tidak pernah terlambat menjadikan implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial berjalan dengan baik.

3) Fasilitas yang memadai

Faktor pendukung selanjutnya ialah fasilitas yang memadai. Hal tersebut termasuk dalam model implementasi kebijakan George Edward

yang termasuk pada aspek *resource* yang menekankan pada faktor pendukung (Nugroho, 2009:512-513). Fasilitas yang memadai merupakan faktor pendukung untuk mensukseskan implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Sejalan dengan pernyataan AY(L,55th) yang menyatakan fasilitas yang memadai membuat klien menjadi antusias dalam mengikuti program. Penjelasan tersebut menjadikan bukti bahwa fasilitas yang memadai merupakan faktor pendukung dalam implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

4) Sumber Daya Manusia yang Memadai

Adanya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor pendukung dikarenakan tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi tidak akan berjalan dengan baik. Sejalan dengan hal itu, RWA(P,52th) berpendapat SDM dalam implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dibagi menjadi dua SDM. Pertama SDM *instruktur*, kedua SDM karyawan. Pernyataan RWA(P,52th) tersebut diperkuat oleh IR(L,42th) yang menyatakan SDM instruktur dan SDM karyawan di UPT RSTS dapat dikatakan sebagai SDM yang handal karena mampu mengubah karakter klien UPT RSTS Kediri.

Melihat aspek model implementasi kebijakan George Edward pada aspek *resource* yang menekankan pada sumber daya manusia khususnya kecakapan pelaksana kegiatan (Nugroho, 2009:512-513). Maksud

sumber daya manusia yang memiliki kecakapan yang tinggi ialah SDM yang handal. UPT RSTS Kediri memiliki sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan program. Sesuai dengan pernyataan IR(L,42th) diatas bahwa SDM instruktur dan SDM karyawan merupakan SDM yang handal dalam mengubah karakter klien UPT RSTS Kediri. Hal itu membuat bukti bahwa SDM yang handal merupakan faktor pendukung implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri,

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Tingkat pendidikan Klien

Faktor penghambat dalam implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri ialah rendahnya tingkat pendidikan klien. Hal itu membuat penyampaian materi tidak berjalan dengan lancar. Sesuai dengan teori Koentjoro (2004:64) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan pelacur wanita tidak terpelajar. Hal itu terbukti pada pernyataan RWA(P,52th) yang menyatakan rendahnya tingkat pendidikan klien yang rata-rata hanya menempuh bangku sekolah hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Sejalan dengan hal itu Haryanto (2009:65) menyatakan terdapat masalah pribadi yang menyebabkan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik. Masalah pribadi tersebut ialah rendahnya pendidikan klien. Pendapat Haryanto tersebut didukung oleh pernyataan RWA(P,52th) yang berpendapat rendahnya pendidikan klien, terbukti masih adanya klien yang tidak bisa

membaca dan menulis. Adanya permasalahan seperti itu, UPT RSTS menyediakan antisipasi dengan membuka tambahan kelas bagi klien UPT RSTS yang tidak bisa membaca dan menulis. Penjelasan diatas menjadikan bukti bahwa rendahnya tingkat pendidikan klien UPT RSTS Kediri merupakan faktor penghambat implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

2) Tingkat Kesehatan Klien

Kesehatan klien sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Sejalan dengan pendapat RWA(P,52th) yang menyatakan hal itu dikarenakan banyaknya klien yang menderita penyakit serius, salah satunya ialah HIV/AIDS. Antisipasi yang dilakukan UPT RSTS harus mengadakan monitoring secara rutin dan pemberian obat yang rutin denga bekerja sama dengan LSM tentang HIV/AIDS. Sejalan dengan hal itu Haryanto (2009:65) menyatakan terdapat masalah pribadi yang menyebabkan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik. Masalah pribadi itu mencakup penyakit yang diderita oleh klien dalam masa rehabilitasi. Adanya penyakit yang berbahaya menyebabkan berjalanya program pelayanan dan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik. Penjelasan diatas menjadikan bukti bahwa tingkat kesehatan klien merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

3) Klien Rindu akan Keluarga

Permasalahan ini termasuk dalam faktor penghambat. Sejalan dengan hal itu Haryanto (2009;65) menjelaskan bahwa terdapat kecemasan pribadi yang mendalam beserta kurangnya motivasi klien menjadikan gagalnya kegiatan rehabilitasi. Sejalan dengan hal itu RWA(P,52th) menyampaikan adanya klien rindu akan keluarga menjadikan klien merasakan kecemasan yang mendalam dan kurang motivasi dalam mengikuti kegiatan yang ada di UPT RSTS Kediri. Mengantisipasi hal tersebut UPT RSTS memberikan bantuan menghubungi keluarga klien untuk datang membesuk klien di kantor UPT RSTS. Selain itu kegiatan games atau oubond dijadikan sebagai sarana meningkatkan motivasi klien.

Pernyataan RWA(P,52th) tersebut jika dikaitkan dengan teori Haryanto (2009:65) bahwa permasalahan klien merindukan keluarga merupakan masalah yang dapat menyebabkan kegagalan dalam rehabilitasi. Klien UPT RSTS merasakan kecemasan dan kurangnya motivasi, sehingga berjalanya rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Penjelasan diatas menjadikan bukti bahwa klien merindukan keluarga merupakan faktor penghambat dalam implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial dimulai pada penerimaan klien, assesment, bimbingan, resosialisasi, penyakuran, bina lanjut dan evaluasi, beserta pengakhiran. Proses program memiliki jangka waktu 4 bulan atau 120 hari didalam asrama UPT RSTS Kediri. Monitoring klien dilakukan hingga berjalan selama dua tahun dengan kegiatan bina lanjut pertama, dan bina lanjut kedua.
- 2) Sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial ialah WTS dikarenakan WTS termasuk dalam tuna sosial yang menjajakan dirinya untuk keperluan bayaran atau imbalan. Pekerjaan tersebut dianggap tidak mensejahterakan dirinya dikarenakan profesi WTS menjual diri, kehormatan, dan belum terpenuhinya nilai materil secara wajar, nilai sosial.
- 3) Partisipasi instruktur dan klien UPT RSTS Kediri dapat dikatakan tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran yang dapat dilihat dari dokumen absensi kehadiran klien dan instruktur bimbingan yang ada di UPT RSTS Kediri.

- 4) Tujuan dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ada di UPT RSTS memiliki tujuan untuk memulihkan klien sehingga mampu menggunakan nilai sosialnya yang keberhasilannya disampaikan oleh AY(L,55th) dapat dilihat dalam lembar bina lanjut.
- 5) Manfaat yang didapatkan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi tiga tahap. Tahap pertama ialah manfaat jangka pendek yang didapatkan klien UPT RSTS Kediri ialah mendapatkan skill dan paket stimulan yang dapat dilihat dari dokumen buku penyerahan klien UPT RSTS Kediri. Manfaat jangka menengah merupakan manfaat yang didapatkan klien berupa pengembangan klien UPT RSTS Kediri yang dapat dilihat dari buku home visit dan pembinaan lanjut. Manfaat jangka panjang berupa keberadaan klien mampu diterima oleh masyarakat secara luas yang dibuktikan dengan dokumen buku home visit dan pembinaan lanjut UPT RSTS Kediri.
- 6) Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri terkait peran dinas sosial kota dan kabupaten seluruh Jawa Timur, keuangan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS yang tidak pernah telat, fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang memadai
- 7) Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT RSTS terkait pendidikan klien yang rendah, tingkat kesehatan klien, dan klien merasakan rindu akan keluarganya.

Antisipasi yang dilakukan oleh UPT RSTS Kediri terkait rendahnya pendidikan klien yang rendah ialah menyiapkan sarana baca dan tulis kepada klien yang tidak bisa membaca dan menulis. Pada faktor penghambat tingkat kesehatan klien, antisipasi yang dilakukan oleh UPT RSTS Kediri ialah dengan cara bekerja sama dengan puskesmas untuk memeriksa kesehatan klien UPT RSTS Kediri. Selain itu bekerja sama dengan LSM HIV/AIDS untuk klien yang mengidap penyakit tersebut dalam segi obat-obatan dan *controlling* klien. Selain itu, antisipasi dari penghambat klien merindukan keluarga, antisipasi yang dilakukan dengan cara menghubungi keluarga klien untuk melakukan besuk dan membuat *games* atau *outbond* untuk meningkatkan motivasi klien.

B. Saran

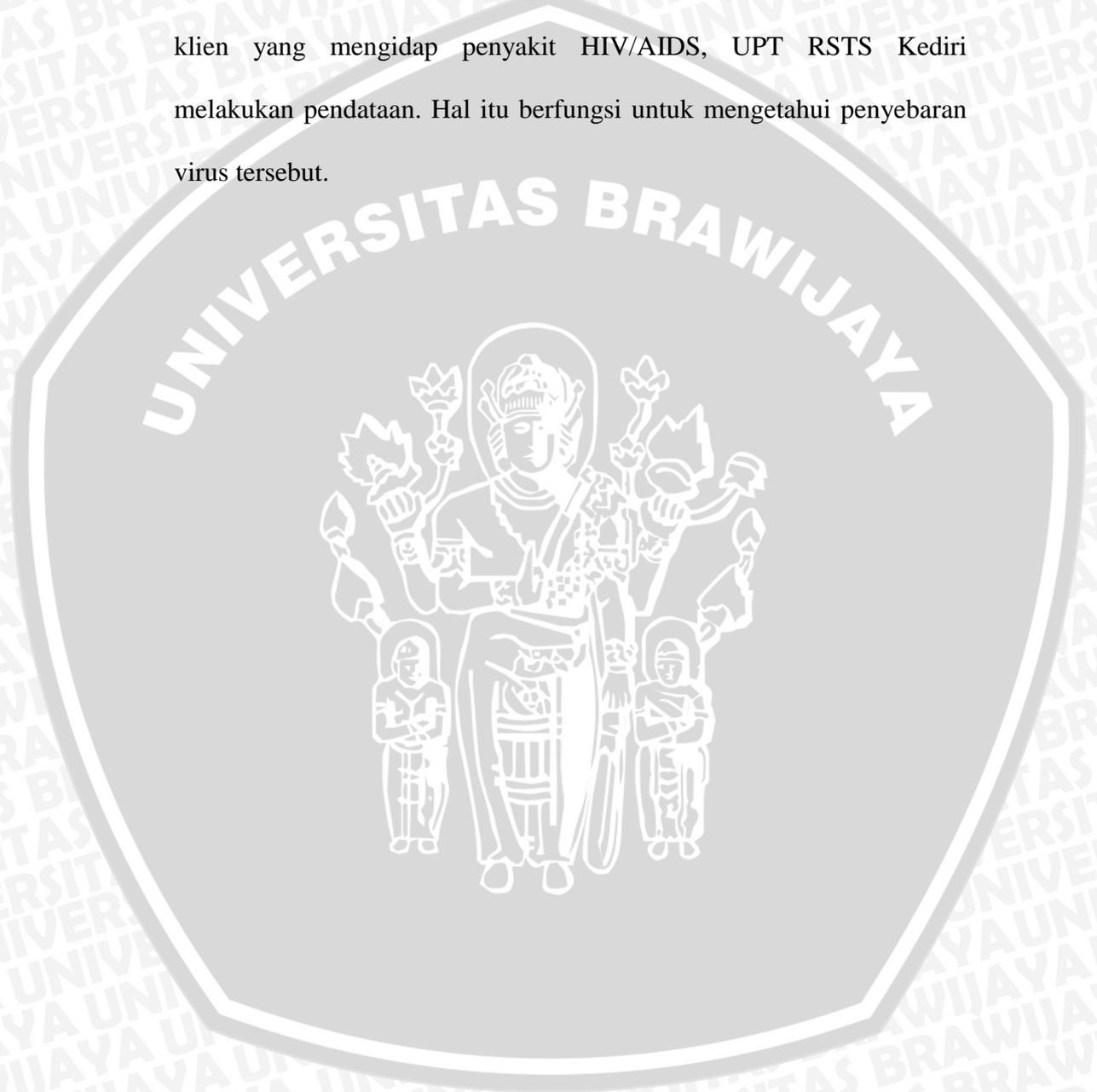
Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan:

- 1) Pada proses program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri diharapkan mampu memberikan penyegaran bimbingan ketrampilan. Sehingga pemberian bimbingan ketrampilan tidak hanya berupa ketrampilan tata boga, tata rias rambut, tata rias pengantin, dan tata busana. Hal itu untuk mengantisipasi klien mampu untuk bersaing pasca rehabilitasi dinyatakan selesai.
- 2) Penambahan kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri untuk meyakinkan bahwa klien

merupakan WTS selain kegiatan *assesment*. Hal itu untuk memperkuat kembali sasaran dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila ialah WTS.

- 3) Penambahan raport penilaian peningkatan partisipasi instruktur dan klien setiap bulan sebagai evaluasi berkelanjutan jika terdapat penurunan partisipasi instruktur dan klien disetiap angkatan.
- 4) Pemberian bimbingan mental yang memiliki porsi lebih dari bimbingan yang lain. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan klien agar memiliki nilai agamis dan sadar akan profesi sebelumnya menyalahi nilai agama. Selain itu, tujuan untuk mengembalikan nilai sosial klien dapat terwujud dengan mudah karena klien telah memiliki nilai agama yang tinggi.
- 5) Menaggulangi manfaat jangka pendek berupa kegiatan penyaluran yang tidak effektive dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri. Peneliti memberikan saran kegiatan penyaluran bekerja sama dengan dinas tenaga kerja daerah di Provinsi Jatim untuk klien UPT RSTS Kediri.
- 6) Dalam faktor pendukung implementasi program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri terdapat fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai tersebut termasuk kamar asrama yang dirasa mampu meningkatkan jumlah klien yang awalnya 60 klien setiap angkatan menjadi 70-80 klien setiap angkatan.

- 7) Peghambat dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila di UPT RSTS Kediri dirasa mampu diantisipasi oleh UPT RSTS Kediri. Saran yang diberikan oleh penulis, jika terdapat klien yang mengidap penyakit HIV/AIDS, UPT RSTS Kediri melakukan pendataan. Hal itu berfungsi untuk mengetahui penyebaran virus tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbaryansyah, Andhika dalam news.detik.com.
<http://new.detik.com/berita/2614608/ini-data-dan-persebaran-161-lokalisasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 15.05 WIB.
- Boediono, B, 2003 . Pelayanan prima Perpajakan. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Emaus, 2013. Diakses dari
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugun_ianfu&diff=6707184&oldid=86279 diakses pada 5 Maret 2015.
- Faizal, Achmad. 2016. Lokalisasi Prostitusi di Mojokerto Ditutup Sebelum Bulan Puasa. Regional kompas. (online) Diakses dari
<http://regional.kompas/read/2016/05/10/09491381/Lokalisasi.Prostitusi.di.Mojokerto.Ditutup.Sebelum.Bulan.Puasa> pada 20 Juli 2016 pukul 15.15 WIB.
- Harsono, Boedi.2006. *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Media Pustaka.
- Haryanto. 2009. Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta
- Hatib Abdul Kadir. (2007). Tangan Kuasa dalam Kelamin Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.
- Henderina. 2012. Wanita Pekerja Seks Komersial. Skripsi. Universitas Hasanudin Makasar
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kartini Kartono. 2011. Patologi Sosial jilid 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pelayanan Umum
- Koentjoro. 2004. On the Spot: Tuter Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta.
- Kurniawan, Dian. 2015. Pemprov Jatim Target bebas Lokalisasi Tahun ini.
- Liflet Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri Tahun 2015
- Liputan 6.com Surabaya (online) Diakses dari
<http://regional.liputan6.com/read/2318352/pemprov-jatim-target-bebas-lokalisasi-tahun-ini> pada 20 Juli 2016 pukul 15.00 WIB
- Memori Rehabilitasi UPT RSTS Kediri Tahun 2015

- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Arizona: SAGE Publication. Inc
- Moenir, H.A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara & Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Powerpoint draft rancangan rencana kerja strategis 2014-2019 dan evaluasi kinerja program kesejahteraan sosial dinas sosial provinsi Jatim 2010-2013
- Putra, Ade Maulana 2014. *Implementasi Program CSR Berbasis Community Development (Studi Tentang CSR PT Greenfields Indonesia di Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)*. [Skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya
- Sabu, Wahyuningsih. 2012. *Pelayanan Publik dalam Program Government Mobile di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gorontalo*. [Skripsi]. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang. Agritek yayasan pembangunan nasional.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Kamus Sosiologi*. CV Rajawali Jakarta.
- Standart Pelayanan Publik UPT RSTS Kediri

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2014. *Jurnal Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat* Volume VI Nomor 02. (Online) Diakses pada 28 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB.

Sutrisno, Mudji. 2005. *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Wholey, J. S, Hatry, H. P. & Newcomer, K. E., 2010. *Handbook Of Practical Program Evaluation*. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis. Proses Kebijakan Publik*. Malang. bayumedia Publishing.

Wikipedia, Kota Kediri. (online) Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Kediri pada 10 Juni 2016 Pukul 14.00 WIB

Zauhar, S. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.

LAMPIRAN I

SURAT IZIN PENELITIAN UPT RSTS KEDIRI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 2850 /UN10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Riset

Kepada : Yth. UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri
Jl. Semeru No 76 Jawa Timur
Kediri

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Studi Riset untuk Mata Kuliah Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Abdullah Fahmi
Alamat : Old Villa Bukit Sengkaling Blok AS-6 Kabupaten Malang
NIM : 125030105111003
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri)
Waktu Penelitian : 2 (Dua) Bulan
Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, Juni 2016

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Prodi Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si
NIP. 19690524 200212 2 002



Lampiran II

**FORM ASSESMENT PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
SOSIAL TUNA SUSILA UPT RSTS KEDIRI**

**ASESSMENT DAN DATA PRIBADI KLIEN
UPT REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA KEDIRI
TAHUN (1666)**

I. IDENTITAS

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat dan Tgl. Lahir / Umur :
- 3. Nomor Register :
- 4. Pendidikan :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan Terakhir :
- 7. Alamat Terakhir :
- 8. Alamat Asal :

II. KEADAAN KELUARGA

A. Orang Tua

1. Ayah : Kandung/Tiri/Angkat *)

- a. Nama Lengkap :
- b. Tempat Tgl. Lahir :
- c. Pendidikan :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat :
- g. Kondisi Sosial/Ekonomi : Rendah / Menengah / Tinggi *)

2. Ibu : Kandung/Tiri/Angkat *)

- a. Nama Lengkap :
- b. Tempat Tgl. Lahir :
- c. Pendidikan :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat :
- g. Kondisi Sosial/Ekonomi : Rendah / Menengah / Tinggi *)



B. Saudara

Urutan nama dari saudara paling tua sampai paling muda, termasuk Klien, bagi tanda T bagi Saudara Tiri pada Kolom keterangan :

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					

III. KEADAAN PRIBADI (STATUS MARITAL)

- 1. Bertunangan : Belum / Sudah *) *) Coret yang tidak perlu
- 2. Menikah : Belum / Sudah *)
- 3. Janda : Cerai / Meninggal *)
- 4. Jumlah anak : Kandung / Tiri Angkat Orang
- 5. Jumlah yang ditanggung : Orang
- 6. Suami (kalau ada diisi)
 - a. N a m a :
 - b. U m u r :
 - c. Pendidikan :
 - d. A g a m a :
 - e. Alamat Asal :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Kondisi Sosial Ekonomi : Rendah / Menengah / Tinggi *)

7. Pendidikan Kelayan (Klien)

No.	Nama Sekolah / Kursus	Tempat	Berijazah Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				

8. Pengalaman Kerja

No.	Jenis Pekerjaan	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar	Keterangan
1.					
2.					
3.					

- 9. Kegemaran / Hobbi :
- 10. Kondisi Profesi
 - a. Sudah berapa lama menjalani sebagai PSK :
 - b. Dimana saja :
 - c. Terjaring razia berapa kali :

Kepala Seksi
Rehabilitasi dan penyaluran

Kediri,
Pekerja Sosial / Petugas

NIP.

NIP.

MENGETAHUI,
Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila
Kediri

NIP.



D. BIMBINGAN KEROHANIAN

Aspek / Waktu / Penilaian	BULAN						Ket.
	I	II	III	IV	V	VI	
Penguasaan pengetahuan keagamaan							
Penghayatan nilai-nilai keagamaan							
Pelaksanaan ibadah beragama							
Pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan							
Dorongan untuk sembuh							

E. MENGIKUTI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL

Aspek / Waktu / Penilaian	BULAN						Ket.
	I	II	III	IV	V	VI	
Kehadiran dalam kegiatan							
Disiplin waktu							
Kesungguhan / ketekunan							
Dorongan semangat							
Partisipasi dalam kegiatan							
Dorongan untuk sembuh							

F. KETRAMPILAN KERJA

Aspek / Waktu / Penilaian	BULAN						Ket.
	I	II	III	IV	V	VI	
Jenis ketrampilan yang diikuti							
Penguasaan ketrampilan							
Kesungguhan / ketekunan							
Dorongan / semangat kerja							
Disiplin Kerja							
Tanggung jawab kerja							
Produktifitas kerja							
Kualitas kerja							
Kerapihan Kerja							

G. PENILAIAN TENTANG KECENDERUNGAN KAMBUH

Aspek / Waktu / Penilaian	BULAN						Ket.
	I	II	III	IV	V	VI	
Dorongan untuk kambuh							
Dorongan dan kecenderungan untuk sembuh sama sekali							
Kecajegan							
Dorongan untuk memperbaiki kehidupan							
Dorongan untuk berprestasi							

Lampiran III

LIFLET RESMI UPT RSTS KEDIRI

PEMERINTAN PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA
KEDIRI
Jalan Semeru 292 Kediri Telp. 0334-772548



A. GAMBARAN UMUM

Masalah sosial tuna susila merupakan masalah nasional dan sebagian besar masyarakat sering mengabaikan masalah ini. Masalah yang berkaitan dengan tuna susila meliputi aspek yang sangat kompleks, yaitu berkaitan erat dengan masalah perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Meningkatnya jumlah tuna susila sejalan dengan terbanyaknya kasus kekerasan dan akhirnya menjadi suatu muara dimana, sehingga menimbulkan masalah sosial. Tuna susila adalah mereka yang mengalami masalah sosial.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 119 tahun 2008, maka UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri memiliki tanggung jawab dan tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Tuna Susila dengan bimbingan fisik, mental, ketrampilan, dan sebagainya, serta membantu mereka untuk memperoleh kembali kemampuan.

B. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Menghapuskan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. UU nomor 20 tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
5. UU Nomor 21 tahun 2007 Tentang tindak Pidana Perdagangan orang
6. Peraturan Menteri No. 89 tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
7. Keputusan Menteri Sosial RI no. 20/MLK/1999 Tentang Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Tuna Susila
8. Peraturan GUB. Jatim No. 80 tahun 2008 Tentang Urusan Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi Demos. Prov. Jatim.
9. Peraturan Gubernur Jatim No. 119 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial/Provinsi Jawa Timur

C. VISI, MISI DAN MOTTO

1. VISI
Terwujudnya tata kehidupan yang normatif bagi penyandang masalah dengan diliputi rasa keadilan.

2. MISI
Mengembangkan sumber daya wanita melalui bimbingan sosial, fisik, Mental dan pelatihan ketrampilan.

3. MOTTO
Wanita Mulia Negara Jaya.

D. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

1. MAKSUD

- Meningkatkan harkat dan martabat, kualitas hidup, keadilan hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis.
- Meningkatkan harga diri, percaya diri, ketahanan dan kemampuan dalam menghadapi kehidupan & penghidupan.

2. TUJUAN

- Terbentuknya masyarakat reman terhadap perbuatan Tuna Susila
- Tercapainya kembali kesehatan, harga diri, tanggung jawab sosial serta tumbuhnya ketahanan dan berkembangnya melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
- Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya WTS dan dapat serta membina eks WTS.

3. FUNGSI

- Menyumbuhkan keadilan klien akan pentingnya pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- Membantu klien melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan bimbingan sehari-hari.
- Membantu klien memenuhi kebutuhan dasar.
- Membantu klien mengorganisir kehidupannya.
- Membantu klien berpedulikan komunitas.

E. SASARAN GARAPAN & PERSYARATAN

1. SASARAN GARAPAN

- Wanita Tuna Susila yang masih merupakan diri.
- Wanita Tuna Susila yang siap untuk aktif profesional.
- Wanita Tuna Susila yang dengan kesadarannya untuk merehabilitasi dirinya sendiri (dianggap sendiri).

2. PERSYARATAN

- Usia antara 18 s/d 45 tahun.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak sedang berurusan dengan pengadilan.
- Wajib tinggal di rumah & mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Wajib mengikuti program bimbingan sosial, fisik, mental dan ketrampilan.

F. PROSES PELAYANAN

1. Pendekatan awal dan Pemecatan klien
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (Assessment)
3. Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Ketrampilan
4. Resosialisasi
5. Penyakhiran
6. Bimbingan Lanjut
7. Evaluasi
8. Pengakhiran (Terminasi)



G. KEGIATAN OPERASIONAL

- 1. BIMBINGAN MENTAL**
Serangkaian kegiatan bimbingan/tuntunan yang bertujuan untuk memahami diri sendiri, orang lain dengan belajar tentang keagamaan, cara berfikir positif dan keinginan untuk berprestasi.



- 2. BIMBINGAN SOSIAL**
Serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan & meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien melalui metode bimbingan sosial perorangan dan kelompok.



- 3. BIMBINGAN FISIK**
Serangkaian kegiatan bimbingan/tuntunan yang bertujuan untuk pengenalan dan praktik cara-cara hidup sehat secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalu sehat.



4. BIMBINGAN KETRAMPILAN

- 1) KETRAMPILAN TATA RIAS RAMBUT
- 2) KETRAMPILAN TATA RIAS PENGANTIN
- 3) KETRAMPILAN TATA BUSANA
- 4) KETRAMPILAN TATA BUDA
- 5) KETRAMPILAN BORDIR



5. PRAKTEK BELAJAR KERJA
Serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang ketrampilan sehingga menjadi tenaga yang terampil di bidangnya dan siap untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya.

6. PENYALURAN
Kegiatan ini dilaksanakan setelah klien selesai mengikuti proses pelayanan yaitu kembali ke masyarakat, perusahaan / tempat kerja sesuai dengan jenis ketrampilan yang telah dimiliki.

7. BIMBINGAN LANJUT
Yang dimaksud adalah memantau perkembangan eks klien, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan eks klien dalam kehidupan dan penghidupan yang layak.

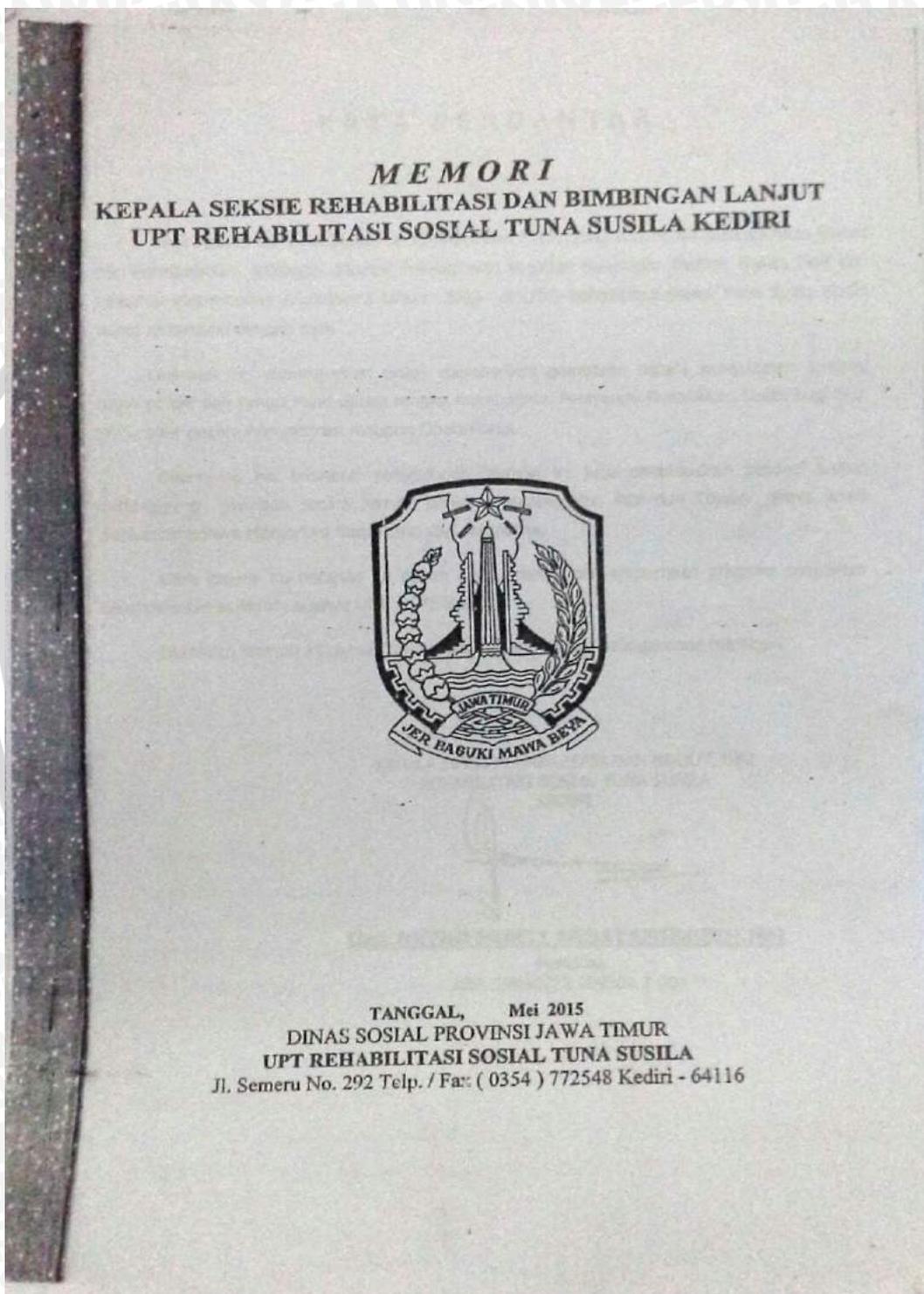


H. PENYERAHAN SERTIFIKAT DAN PAKET STIMULAN



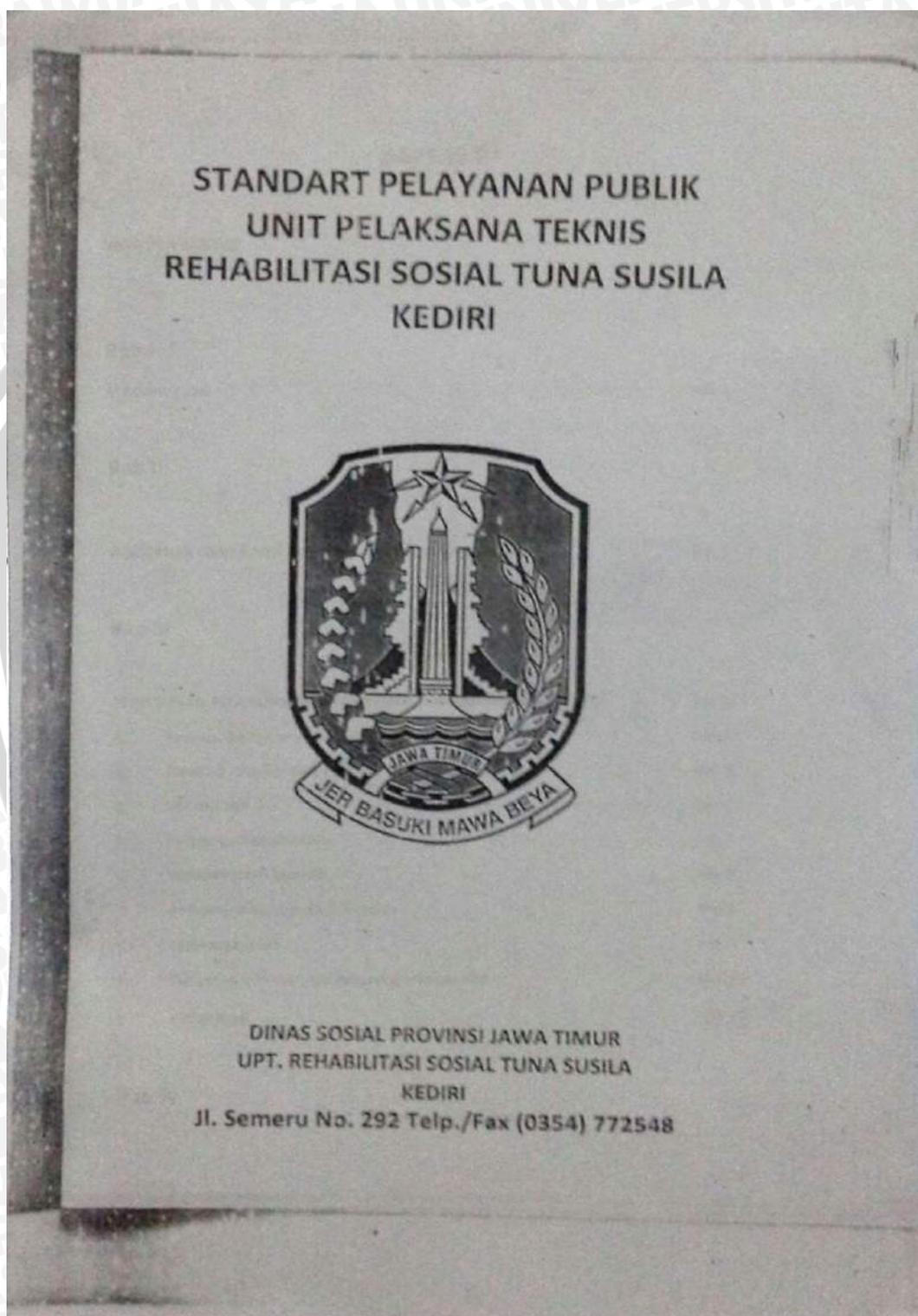

Lampiran IV

BUKU MEMORI REHABILITASI UPT RSTS KEDIRI



Lampiran V

BUKU STANDART PELAYANAN PUBLIK UPT RSTS KEDIRI



Lampiran VI
DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Bersama Karyawan UPT RSTS Kediri



Pemeriksaan Kesehatan Klien UPT RSTS Kediri



Bimbingan Ketrampilan Rias Pengantin



Fasilitas Kamar Asrama Klien UPT RSTS Kediri



Kegiatan Bimbingan Mental (Sholat Dzuhur Berjamaah)

NAMA DINAS SOSIAL KAB. / KOTA SE JAWA TIMUR

NO.	NAMA DINAS	ALAMAT	NO. TLP.	FAX
1	DINSOS NAKER DAN TRANS KAB. PACITAN	JL. GATOT SUBROTO, NO. 79	0357/885799 0357/881318	0357/883453
2	DINSOS NAKER DAN TRANS KAB. PONOROGO	JL. BUDI UTOMO, NO. 10	0352/481931	0352/487655
3	DISNAKER TRAS DAN SOS. KAB. TRENGGALEK	JL. PONDOK NURAHARAJA NO. 5 BRIGJEN SOETRAJAN NO. 11	0355/791490	
4	DINSOS NAKER DAN TRANS KAB. TULUNGAGUNG	JL. JAYENG KUSUMA NO. 19	0355/321293	
5	DINSOS KAB. BLITAR	JL. A. YANI NO. 38	0342/801357	
6	DINSOS KAB. KEDIRI	JL. MAYOR BISMO, NO. 28	0354/689661	0354/689626
7	DINSOS KAB. MALANG	JL. MOJOPAHIT, NO. 5	0341/362601	0341/320775
8	DINSOS KAB. LUMAJANG	JL. A. YANI, NO. 199	0334/888155	
9	DINSOS KAB. JEMBER	JL. PB. SUDIRMAN, NO. 31	0331/487766	
10	DINSOS NAKER DAN TRANS KAB. BANYUWANGI	JL. HOS. COKRO AMINOTO, NO. 30	0333/424506	
11	DINSOS DAN KESRA, KAB. BONDOWOSO	JL. BRIGJEN KATAMSO, NO. 52	0332/421536	0332/423067
12	DINSOS KAB. SITUBONDO	JL. ANGGREK, NO. 54	0338/671296	
13	DINSOS KAB. PROBOLINGGO	JL. A. YANI, NO. 23	0335/433840	
14	DISNAKER SOS DAN TRANS KAB. PASURUAN	JL. HR. II JUANDA, NO. 55	0343/421016	0343/414430
15	DINSOS DAN NAKER KAB. SIDOARJO	JL. RAYA JATIM, NO. 4	031/8947153 031/8946664	031/8921007 031/8956827
16	DINSOS KAB. MOJOKERTO	JL. RA. BASUNI, NO 1	0321/321539	
17	DINSOSNAKER DAN TRANS, KAB. JOMBANG	JL. KIL WACHIDIN HASYIM	0321/861459	0321/879951
18	DINSOSNAKER DAN TRANS, KAB. NGANJUK	JL. DERMOJOYO, NO. 45	0328/321785	0338/325200
		JL. PONDOK NURAHARAJA NO. 54	0351/465006	0351/465006

CP Dinas Sosial Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Abdullah Fahmi
 Tempat, Tgl Lahir : Gresik, 25 Maret 1994
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat di Malang : Old Villa Bukit Sengkaling Blok AS-6 Kabupaten Malang
 Alamat Asal : Jl. KH. Wakhid Hasyim Va/2 Pekauman Gresik
 NIM : 125030105111003
 Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi / Administrasi Publik
 Universitas : Universitas Brawijaya
 No. Telepon : 085755855559
 Alamat E-mail : fahmihabsyi25@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	TK Muslimat 29 Mahkota Gresik	1999-2000
2.	MINU Salafiyah Gresik	2000-2006
3.	SMP YIMI FDS Gresik	2006-2009
4.	SMA Semen Gresik	2009-2012
5.	S-1 Prodi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2012-2016

C. Pengalaman Berorganisasi

No.	Posisi	Organisasi	Tahun
1.	Staff Magang Divisi Advokasi	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA UB	2012
2.	Staff Divisi Pengabdian Masyarakat	Himpunan Mahasiswa Jurusan Adminstrasi Publik (HUMANISTIK)	2013
3.	Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat HUMAS	Himpunan Mahasiswa Jurusan Adminstrasi Publik (HUMANISTIK)	2014
4.	Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) FIA UB	Himpunan Mahasiswa Jurusan Adminstrasi Publik (HUMANISTIK)	2015

D. Pengalaman Kepanitiaan

No.	Posisi	Kepanitiaan	Tahun
1.	Ketua Pelaksana	Diesnatalis HUMANISTIK FIA UB	2013
2.	Co. Sponsorship	Temu Administrator Muda Indonesia (TEMU ADMI)	2013
3.	Staff Divisi Acara	Pengabdian Masyarakat HUMANISTIK FIA UB	2013
4.	Staff Divisi PDD	Temu Adminstrator Muda Indonesia (TEMU ADMI)	2013
5.	Staff Divisi	Temu Administrator Negara Jawa	2013

	Acara	Timur (TEMAN JATIM)	
6.	Staff Divisi Garda Mahasiswa (GAMA)	PKK MABA PANGLIMA FIA	2014
7.	<i>Steering Committee</i>	Night Concert Dies Natalies HUMANISTIK on Decade	2014
8.	<i>Steering Committee</i>	Ceremony Dies Natalies HUMANISTIK on Decade	2014
9.	<i>Steering Committee</i>	Temu Alumni Dies Natalies HUMANISTIK on Decade	2014
10.	<i>Steering Committee</i>	Pengabdian Masyarakat "Omat Jadi Raja & Pose Beras"	2014
11.	<i>Steering Committee</i>	Pengabdian Masyarakat "Irama Pemanis"	2015
12.	<i>Steering Committee</i>	Pengabdian Masyarakat "Kera Sakti"	2015
14.	<i>Steering Committee</i>	Seluruh Program HUMANISTIK FIA UB 2015	2015

E. Prestasi Non Akademik

No.	Prestasi Non Akademik	Tahun
1.	Delegasi Temu Administrator Muda Indonesia (TEMU ADMI) FIA UB	2013
2.	Penerima Beasiswa PPA Non Akademik	2015